



REPUBLIK
INDONESIA

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI 2025 – 2027



TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT



REPUBLIK
INDONESIA

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI 2025 – 2027

DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Daftar Grafik	4
Daftar Gambar	5
Daftar Tabel	5
Prakata	6
Ringkasan Eksekutif	7

BAB I LATAR BELAKANG

12

BAB II EVALUASI PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI 2022-2024

20

2.1	Evaluasi Pencapaian Inflasi 2022-2024	24
2.2	Evaluasi Pencapaian Program Kerja 2022-2024	28
2.2.1.	Keterjangkauan Harga (K1)	28
2.2.2.	Ketersediaan Pasokan (K2)	32
2.2.3.	Kelancaran Distribusi (K3)	36
2.2.4.	Komunikasi Efektif (K4)	37
2.3	Analisis Kesenjangan (<i>Gap Analysis</i>)	37
2.3.1.	Keterjangkauan Harga (K1)	38
2.3.2.	Ketersediaan Pasokan (K2)	39
2.3.3.	Kelancaran Distribusi (K3)	41
2.3.4.	Komunikasi Efektif (K4)	42

BAB III
PETA JALAN PENGENDALIAN
INFLASI 2025-2027

44

LAMPIRAN
TABEL PETA JALAN
PENGENDALIAN INFLASI
2025-2027

60

3.1	Arah Kebijakan	48
3.2	Program Kerja	49
3.2.1.	Keterjangkauan Harga (K1)	50
3.2.2.	Ketersediaan Pasokan (K2)	51
3.2.3.	Kelancaran Distribusi (K3)	56
3.2.4.	Komunikasi Efektif (K4)	57

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Inflasi IHK dan Kisaran Sasaran	15	Grafik 2.10.	Perkembangan Produksi Padi	33
Grafik 1.2.	Inflasi IHK, Inti, VF dan AP Tahunan	15	Grafik 2.11.	Produktivitas Menurut Mesin Pertanian yang Diterima Petani Tahun 2023	33
Grafik 1.3.	Persentase Ketepatan Sasaran Inflasi Provinsi	16	Grafik 2.12.	Perkembangan Jumlah Kerja sama Antardaerah dan Skema KAD	36
Grafik 1.4.	Disparitas Inflasi IHK Provinsi	16	Grafik 2.13.	Perkembangan Keandalan TPID 2022-2023	37
Grafik 1.5.	Inflasi IHK Indonesia dan Negara Kawasan	17	Grafik 2.14.	Perkembangan Harga Tahunan Komoditas Pangan Utama	38
Grafik 1.6.	Inflasi Pangan Indonesia dan Negara Kawasan	17	Grafik 2.15.	Selisih Standar Deviasi dan Bobot Komoditas Pangan Strategis	39
Grafik 2.1.	Disagregasi Inflasi Tahunan	24	Grafik 2.16.	Perbandingan HET dan Harga Jual	39
Grafik 2.2.	Lintasan Ekspektasi Inflasi 2025 <i>Consensus Forecast</i>	24	Grafik 2.17.	Perkembangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)	39
Grafik 2.3.	Tekanan Eksternal	25	Grafik 2.18.	Pasokan dan Harga dan Pasokan Aneka Cabai	40
Grafik 2.4.	Disparitas Inflasi VF Provinsi	26	Grafik 2.19.	Perkembangan Impor dan Inflasi Bawang Putih	41
Grafik 2.5.	Perkembangan Inflasi Berdasarkan Sub Kelompok AP	27	Grafik 2.20.	Disparitas Inflasi VF Tahunan 2022-2024	41
Grafik 2.6.	Perkembangan Determinan Harga Energi	27	Grafik 2.21.	Biaya Logistik per PDB	42
Grafik 2.7.	Jumlah Penumpang Jasa Angkutan	27	Grafik 2.22.	Ekspektasi Inflasi dan Realisasi	43
Grafik 2.8.	Perkembangan Inflasi Komoditas Rokok	27	Grafik 3.1.	Indeks Ketahanan Pangan	49
Grafik 2.9.	Perkembangan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian	32			

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Inflasi Spasial	16
Gambar 1.2.	Tahapan Penyusunan Peta Jalan 2025-2027	18
Gambar 2.1.	Sebaran Sentra Produksi Pangan Tahun 2023	40
Gambar 3.1.	<i>Framework</i> Peta Jalan 2025-2027	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Frekuensi Penyumbang Inflasi	26
Tabel 3.1.	Target Pengelolaan dan Stok Akhir Cadangan Pangan Komoditas Lainnya	54

PRAKATA



Airlangga Hartarto

Ketua Tim Pengendalian
Inflasi Pusat

Salam hangat,

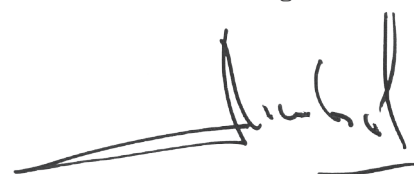
Sepanjang 2022 hingga 2024, ketidakpastian ekonomi global masih terus berlanjut seiring dengan peningkatan ketegangan geopolitik, divergensi perekonomian dunia, dan gangguan rantai pasok global. *Supply shock* energi global dan kenaikan harga komoditas global lainnya mendorong peningkatan tekanan inflasi di berbagai negara sehingga tantangan pengendalian inflasi menjadi sorotan utama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Selain dampak peningkatan tekanan global, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan domestik, terutama dampak cuaca ekstrem yang mengakibatkan terganggunya kesinambungan pasokan pangan.

Sinergi dan koordinasi pengendalian inflasi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dan inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran. Pengendalian inflasi 2022-2024 dihadapkan pada sasaran inflasi yang menantang dengan kecenderungan menurun yaitu $3\% \pm 1,0\%$ pada 2022 dan 2023, serta $2,5\% \pm 1,0\%$ pada 2024, di tengah berbagai peningkatan ketidakpastian. Dalam kurun waktu 2022-2024, realisasi inflasi tahunan secara umum telah berhasil dijaga pada rentang sasaran, masing-masing pada level 5,51% (2022), 2,61% (2023) dan 1,57% (2024). Meski pada 2022 inflasi Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan penyesuaian harga BBM dan transmisi kenaikan harga komoditas global, dalam waktu singkat inflasi dapat dikendalikan dan kembali berada dalam kisaran sasaran pada pertengahan 2023 didukung oleh berbagai *extra effort* yang ditempuh oleh Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia. Inflasi kembali terjaga rendah dan stabil seiring dengan stabilnya harga pangan dan energi, serta konsistensi sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan struktural yang ditempuh. Capaian inflasi yang terkendali tersebut memberikan ruang bagi pemulihan ekonomi nasional yang tetap berlanjut di tengah berbagai tantangan global dan domestik.

Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia telah menetapkan sasaran inflasi nasional melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2024 pada level $2,5\% \pm 1,0\%$ untuk tahun 2025, 2026 dan 2027. Penetapan sasaran ini mencerminkan komitmen untuk menjaga stabilitas harga sebagai prasyarat utama pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 menjadi landasan strategis dalam mengantisipasi dan merespons dinamika tekanan inflasi, baik dari sisi domestik maupun global. Sebagaimana amanat dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 148 Tahun 2017, penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi perlu disusun sebagai acuan dalam melaksanakan aksi pengendalian inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah guna mendukung pencapaian sasaran inflasi. Peta Jalan Pengendalian Inflasi juga menunjukkan koordinasi yang solid dalam pengendalian inflasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia. Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 ini menjabarkan berbagai tantangan yang dihadapi baik dari dalam dan luar negeri serta langkah-langkah mitigasi untuk mengendalikan inflasi.

Sinergi yang solid antar pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi. Komitmen penuh dan langkah nyata diperlukan agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara optimal. Dengan sinergi yang kuat dan menjalankan komitmen dengan baik, Indonesia optimis mampu menjaga inflasi tetap terkendali dan memperkuat fondasi ekonomi untuk mendukung pertumbuhan yang kuat dan berkesinambungan.

Jakarta, Agustus 2025
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Airlangga Hartarto

Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat

RINGKASAN EKSEKUTIF





RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan inflasi kembali dapat terkendali, meski sempat meningkat signifikan pada 2022 akibat kenaikan ketidakpastian global, ketegangan geopolitik dan disrupsi rantai pasok global. Inflasi IHK mengalami peningkatan yang tinggi pada 2022 akibat penyesuaian harga energi domestik yang mendorong kenaikan inflasi *administered prices* (AP), sehingga inflasi berada di atas sasaran. Inflasi 2022 yang tinggi juga dipengaruhi oleh peningkatan tekanan eksternal yang tecermin dari kenaikan harga komoditas global dan tekanan nilai tukar akibat ketidakpastian global dan tensi konflik geopolitik yang meningkat. Selain itu, peningkatan permintaan domestik seiring dengan pemulihan ekonomi domestik juga turut meningkatkan tekanan inflasi. Pada saat bersamaan, terjadi juga peningkatan inflasi *volatile food* (VF) seiring dengan gangguan produksi pangan akibat fenomena cuaca La Nina dan El Nino, serta cuaca ekstrem. Namun demikian, tekanan inflasi menurun sehingga inflasi sepanjang 2023-2024 kembali terkendali dan berada pada kisaran sasarannya. Secara spasial, inflasi IHK di mayoritas wilayah terjaga, meski disparitas antarwilayah lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Dalam rangka menjangkar ekspektasi inflasi yang stabil dan terkendali, Pemerintah bersama Bank Indonesia telah menetapkan sasaran inflasi 2025-2027 sebesar $2,5 \pm 1\%$ melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 tahun 2024.

Secara umum, pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat capaian program kerja yang belum sesuai target. Program kerja pengendalian inflasi yang mengacu pada kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) telah berjalan sesuai target dan turut mendukung pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. Namun demikian, terdapat program kerja yang belum mencapai target akibat kendala teknis di lapangan.

Ke depan, upaya pengendalian menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi global maupun domestik. Dari sisi

global, tekanan berasal dari ketidakpastian yang masih tinggi dan diperkirakan berlangsung lebih lama, perkembangan harga komoditas global, tekanan nilai tukar akibat gejolak ekonomi global dan dampak perubahan iklim. Sementara itu, dari sisi domestik, tantangan diperkirakan bersumber dari perekonomian yang masih dalam proses pemulihan, rantai pasok dan distribusi yang belum efisien, kendala struktural produksi pangan, disparitas pasokan antarwaktu dan antardaerah, serta peningkatan efektivitas kebijakan subsidi.

Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 disusun sebagai pedoman dalam kebijakan pengendalian inflasi ke depan. Peta Jalan Pengendalian Inflasi mengambil tema “Penguatan Struktur dan Efisiensi Perekonomian untuk Pencapaian Target Inflasi Menuju Indonesia Maju” sejalan dengan arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2024. Arahan Presiden untuk terus memperkuat pengendalian inflasi melalui beberapa strategi kebijakan antara lain, memperkuat sinergi antarlembaga untuk program stabilisasi harga dan pasokan pangan, memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah, memutakhirkan sistem dan infrastruktur logistik untuk mendukung kelancaran distribusi, serta mengembangkan integrasi data. Struktur perekonomian yang baik dan kokoh serta efisiensi perekonomian dapat menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran targetnya dan menunjang pertumbuhan ekonomi.

Program kerja pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 tetap berpedoman pada kerangka strategi 4K. Strategi Keterjangkauan Harga ditujukan untuk menjaga kestabilan harga melalui intervensi kebijakan Pemerintah serta menjaga keseimbangan internal perekonomian. Strategi Ketersediaan Pasokan berupaya untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan peternakan domestik, serta meningkatkan stok dan ketahanan pangan nasional. Strategi Kelancaran Distribusi bertujuan untuk menurunkan disparitas harga dan pasokan antardaerah dan antarwaktu. Adapun strategi Komunikasi Efektif berupaya untuk menjangkar ekspektasi



inflasi masyarakat pada sasaran, meningkatkan penyediaan dan kualitas data untuk mendukung perumusan kebijakan, meningkatkan sinergi pusat dan daerah, termasuk dengan mengoptimalkan TPID. Berdasarkan analisa *gap* terhadap strategi 4K tersebut, upaya pengendalian inflasi ke depan diprioritaskan pada strategi Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi, yang juga sejalan dengan arahan Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2024.

Implementasi strategi 4K dilaksanakan melalui sejumlah program kerja yang akan diimplementasikan sepanjang 2025-2027. Strategi Keterjangkauan Harga dilakukan melalui program strategis Stabilisasi Harga, dengan program kerja antara lain evaluasi harga acuan dan harga eceran, stabilisasi harga dan stok bahan pokok, optimalisasi program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), koordinasi penetapan komoditas AP, serta upaya menjaga keseimbangan internal perekonomian. Strategi Ketersediaan Pasokan dijabarkan melalui program strategis penguatan produksi dalam negeri, penguatan mekanisme

impor, optimalisasi bantuan sarana-prasarana pertanian dan penyimpanan produk pangan, penerapan praktik budidaya sesuai *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP), penguatan stok nasional melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Daerah (CPP dan CPPD), serta peningkatan akses pembiayaan petani. Strategi Kelancaran Distribusi dilakukan melalui program strategis Kerja sama Antar Daerah (KAD) dan infrastruktur perdagangan, dengan program kerja di antaranya optimalisasi KAD, fasilitasi distribusi pangan, pengembangan infrastruktur konektivitas dan peningkatan produktivitas kluster pertanian. Adapun strategi Komunikasi Efektif terdiri dari program strategis perbaikan kualitas data, penguatan koordinasi pusat-daerah, dan komunikasi kebijakan pengendalian inflasi. Beberapa program kerja yang tercakup didalamnya antara lain penyediaan data dan sistem informasi harga dan stok pangan, peningkatan keandalan TPID termasuk melalui komunikasi kebijakan yang efektif.

BAB 1

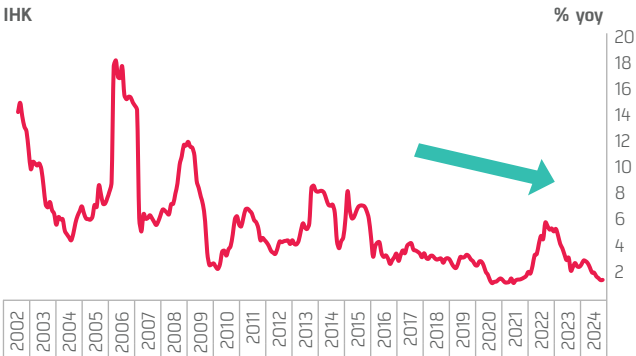
LATAR BELAKANG



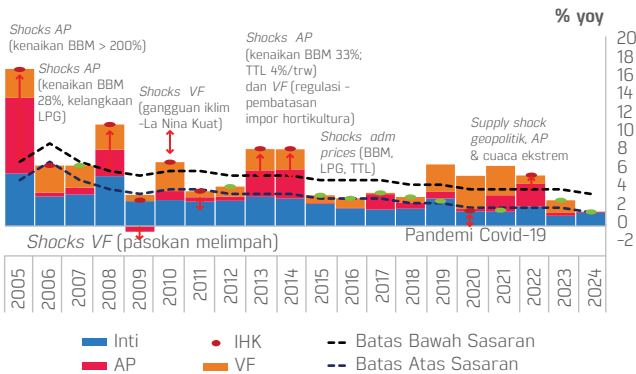


Latar Belakang Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027

CAPAIAN INFLASI MELANJUTKAN TREN PENURUNAN



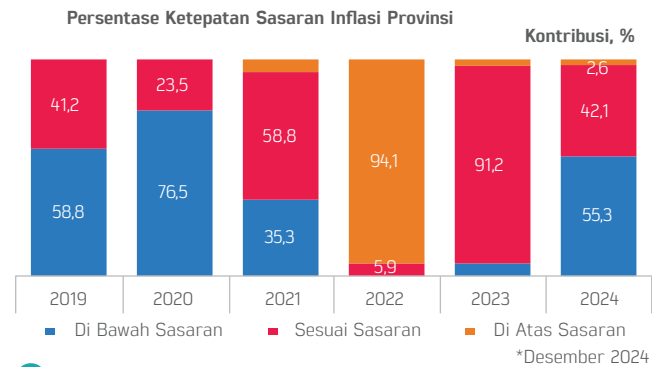
Inflasi dalam tren menurun



Inflasi IHK pada 2022 lebih tinggi dari sasaran akibat *supply shock*, geopolitik, dampak AP, dan cuaca ekstrem

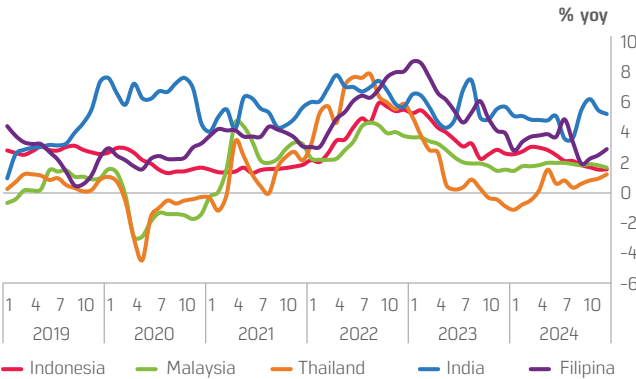
INTI	Des 2024	Rerata 2022-2024
	2,26%	2,69%
VF	Des 2024	Rerata 2022-2024
	0,12%	4,82%
AP	Des 2021	Rerata 2022-2024
	0,56%	2,79%

Inflasi inti berada dalam rezim sangat rendah, VF dan AP dalam rezim rendah.

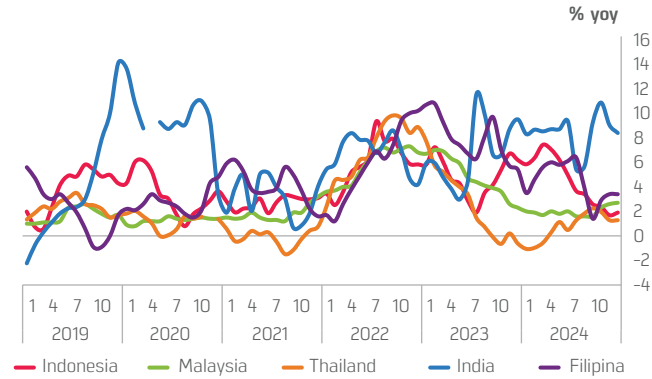


Dalam tiga tahun terakhir lebih banyak provinsi dengan realisasi inflasi di bawah kisaran sasaran, kecuali 2022

INFLASI IHK INDONESIA LEBIH RENDAH DARI KAWASAN, NAMUN INFLASI PANGAN LEBIH TINGGI



Rerata inflasi IHK Indonesia beberapa tahun terakhir lebih rendah dari negara kawasan



Rerata inflasi pangan Indonesia beberapa tahun terakhir lebih rendah dari beberapa negara kawasan

ARAHAN PRESIDEN RI DALAM RAKORNAS

PENGUATAN STRUKTUR DAN EFISIENSI PEREKONOMIAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET INFLASI MENUJU INDONESIA MAJU

- Penguatan sinergi antarlembaga untuk intensifikasi program stabilisasi harga dan pasokan pangan, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah, pemutakhiran sistem dan infrastruktur logistik untuk mendukung kelancaran distribusi, serta pengembangan integrasi data
- Struktur perekonomian yang baik dan kokoh serta efisiensi perekonomian dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran targetnya

LATAR BELAKANG

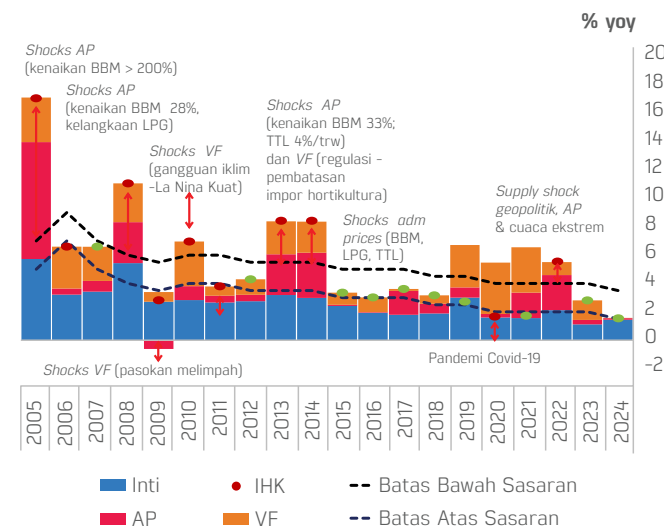
Inflasi adalah salah satu indikator utama dalam memastikan stabilitas perekonomian suatu negara.

Inflasi yang berada pada tingkat stabil dan rendah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan perkembangan inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan pencapaian pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian, Bank Indonesia dan Pemerintah berkomitmen menjaga tingkat inflasi dengan menerapkan *Inflation Targeting Framework* (ITF) yang di antaranya mencakup penetapan sasaran inflasi yang berperan sebagai acuan (*nominal anchor*). Implementasi ITF diharapkan dapat mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat, sehingga mendukung stabilitas harga.

Pemulihan kegiatan ekonomi setelah pandemi, *supply shock* dan peningkatan ketidakpastian global memengaruhi perkembangan inflasi sepanjang 2022-2024. Pemulihan ekonomi setelah pandemi mendorong peningkatan permintaan dan mobilitas domestik, meski berlangsung secara gradual. Lonjakan harga energi, gangguan rantai pasok global akibat konflik geopolitik, serta tekanan nilai tukar akibat ketidakpastian ekonomi global menyebabkan tekanan inflasi yang lebih tinggi. Selain itu, dampak fenomena cuaca yang mempengaruhi produksi pangan domestik turut berkontribusi pada peningkatan tekanan inflasi. Pada tahun 2022, inflasi IHK Indonesia tercatat sebesar 5,51% (yoy) atau di atas sasaran inflasi 3,0%±1%. Pada tahun 2023 inflasi IHK Indonesia kembali berada dalam sasaran inflasi yaitu sebesar 2,61% (yoy). Lebih lanjut, pada tahun 2024 inflasi IHK Indonesia tercatat sebesar 1,57% (yoy), berada dalam batas bawah sasaran inflasi 2,5%±1%.

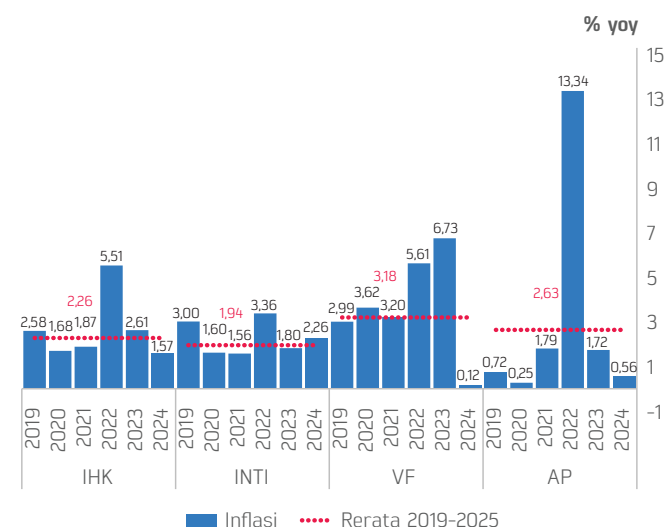
Fluktuasi capaian inflasi sepanjang 2022-2024 disumbang terutama oleh kelompok *volatile food* (VF) dan *administered prices* (AP). Inflasi IHK pada 2022 mengalami peningkatan disumbang oleh kelompok inti, VF dan AP. Peningkatan inflasi inti 2022 didorong oleh dampak ketidakpastian global dan pemulihan gradual permintaan, sementara peningkatan inflasi VF didorong oleh *shock* pasokan akibat disparitas produksi antarwaktu dan kendala distribusi. Peningkatan signifikan inflasi AP 2022 terutama didorong

oleh penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM)¹ oleh pemerintah. Lebih lanjut, pada 2023 inflasi IHK terutama disumbang oleh inflasi VF seiring dengan *supply shock* pada komoditas beras yang berlanjut hingga awal 2024. Sementara pada 2024, inflasi IHK menurun seiring dengan penurunan inflasi VF dan AP di tengah peningkatan tekanan inflasi inti akibat dampak ketidakpastian global.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.1. Inflasi IHK dan Kisaran Sasaran



Sumber: BPS diolah

Grafik 1.2. Inflasi IHK, Inti, VF dan AP Tahunan

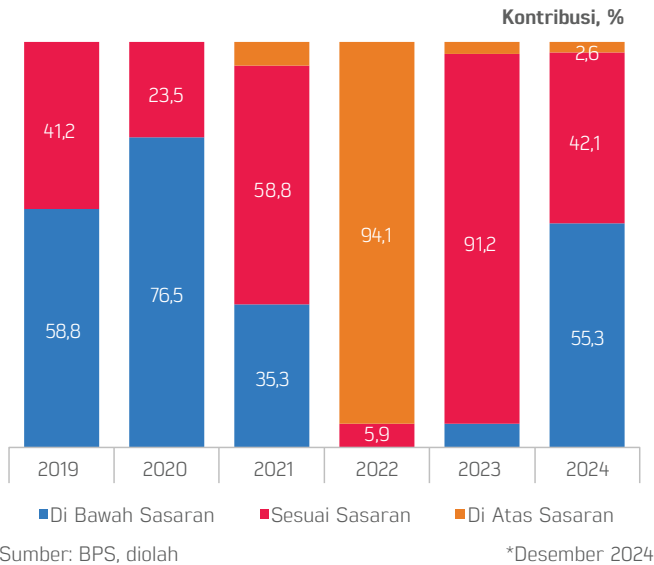
1 Pada 3 September 2022, Pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM sebagai berikut (i) Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter; (ii) Solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter; (iii) Pertamina (RON 92) dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter

Inflasi IHK di mayoritas daerah secara umum terjaga meski disparitas inflasi antardaerah mengalami peningkatan. Sejalan dengan capaian inflasi nasional, inflasi IHK di sebagian besar daerah mengalami peningkatan pada 2022, kemudian menurun pada 2023-2024. Pada 2022, 36 provinsi mencatatkan inflasi di atas sasaran 3,0±1%, sementara pada 2023 terdapat empat provinsi mencatatkan inflasi di bawah sasaran 3,0±1%. Penurunan inflasi IHK berlanjut 2024 dan sebagian besar provinsi mencatatkan inflasi di bawah kisaran sasaran inflasi 2,5±1%. Namun demikian, disparitas inflasi IHK antardaerah selama tahun 2022-2024 secara rata-rata melebar dibandingkan periode 2019-2021. Peningkatan disparitas inflasi antardaerah terutama terjadi pada tahun 2022 dan 2024 seiring dengan peningkatan volatilitas inflasi VF. Untuk itu sepanjang 2022-

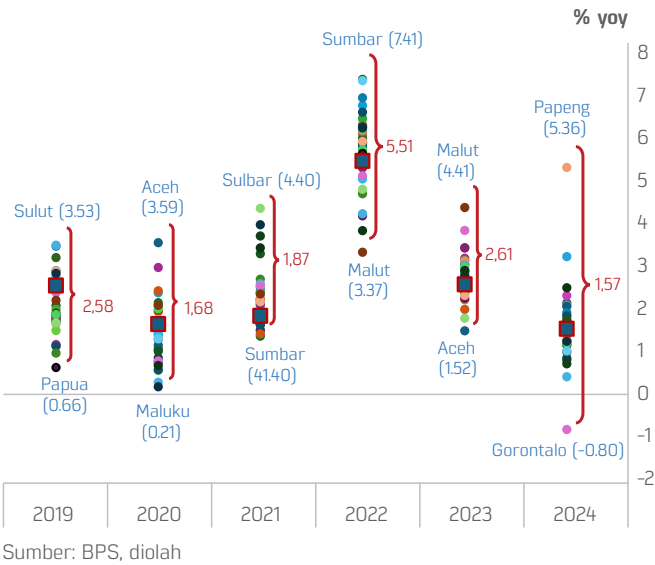
2024, koordinasi antara Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga), Pemerintah Daerah (TPID), serta Bank Indonesia terus diperkuat untuk memastikan inflasi tetap stabil dan berada pada kisaran sasaran.

Inflasi IHK Indonesia menunjukkan volatilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya di kawasan. Dalam tiga tahun terakhir (2022-2024), inflasi IHK Indonesia secara rerata mencapai 3,40% (yoy)² dengan standar deviasi sebesar 1,31%. Capaian inflasi tersebut lebih tinggi dari rerata inflasi Thailand 2,58% (yoy) dan Malaysia 2,57% (yoy), namun masih lebih rendah dibandingkan dengan rerata inflasi India 5,77% (yoy) dan

2 Realisasi Inflasi IHK Januari 2022 s.d Desember 2024



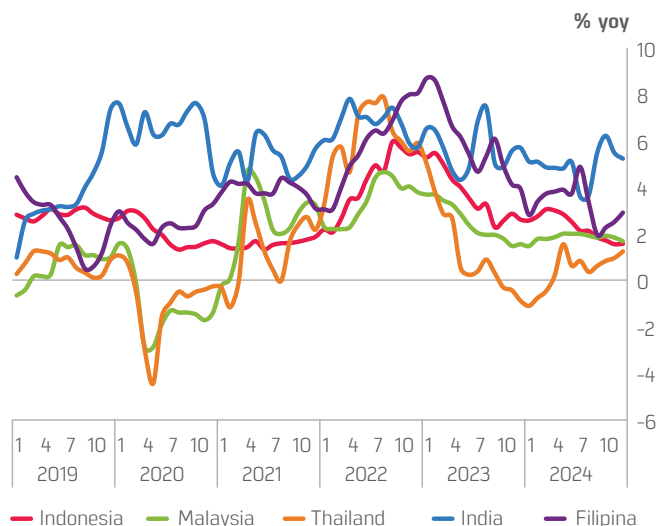
Grafik 1.3. Persentase Ketepatan Sasaran Inflasi Provinsi



Grafik 1.4. Disparitas Inflasi IHK Provinsi



Gambar 1.1. Inflasi Spasial

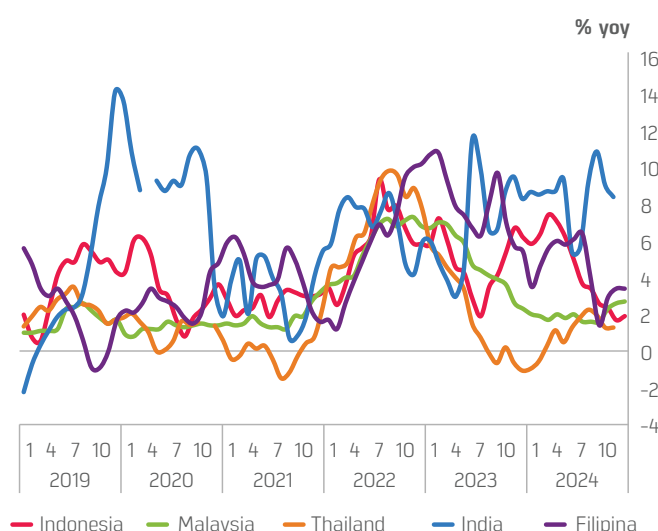


Sumber: CEIC, Diolah

Grafik 1.5. Inflasi IHK Indonesia dan Negara Kawasan

Filipina 5,03% (yoy). Selain itu, fluktuasi inflasi Indonesia cenderung lebih tinggi daripada Malaysia dan India, meski lebih rendah dibandingkan dengan Thailand dan Filipina³.

Volatilitas inflasi pangan Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan *peers*, meski mengalami peningkatan dari periode 2019–2021. Rerata inflasi pangan Indonesia sepanjang 2022–2024 sebesar 5,06% (yoy) dengan volatilitas sebesar 1,92%. Capaian inflasi pangan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, meski lebih rendah dibandingkan dengan India dan Filipina. Namun demikian, volatilitas inflasi pangan Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, India dan Filipina.



Sumber: TradingEconomics, diolah

Grafik 1.6. Inflasi Pangan Indonesia dan Negara Kawasan

³ Standar deviasi inflasi IHK Malaysia, India, Thailand dan Filipina sepanjang 2022 s.d 2024 masing-masing sebesar 0,95%, 1,04%, 1,88%, dan 2,84%

Inflasi pangan yang tinggi di Indonesia pada periode 2022–2024 dipengaruhi oleh ketidakseimbangan pasokan antarwaktu antara lain akibat dampak fenomena cuaca, ketidakseimbangan pasokan antarwilayah akibat tantangan infrastruktur distribusi pangan, dan perkembangan harga pangan global.

Dinamika perekonomian global dan domestik memberikan tantangan bagi upaya untuk menjaga stabilitas inflasi Indonesia. Perkembangan inflasi ke depan diperkirakan akan dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global seiring dengan meningkatnya risiko geopolitik dan berlanjutnya fragmentasi perdagangan global, serta dampak perubahan iklim yang berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas global. Selain itu, perkembangan domestik juga turut mempengaruhi stabilitas inflasi Indonesia antara lain keseimbangan pasokan dan permintaan di tengah perbaikan permintaan domestik yang berlangsung gradual, pergeseran pola konsumsi, dan tantangan struktural produksi dan distribusi pangan. Berbagai tantangan ini perlu direspons dengan tepat sehingga tidak mengganggu stabilitas inflasi nasional dan tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, koordinasi dan komunikasi kebijakan pengendalian inflasi yang tepat diperlukan untuk dapat meminimalkan tekanan inflasi ke depan.

Pemerintah bersama Bank Indonesia telah menetapkan sasaran laju inflasi sebagai jangka ekspektasi inflasi pada level yang stabil dan rendah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024 telah ditetapkan sasaran inflasi pada periode 2025 s.d 2027 berturut-turut sebesar 2,5±1% (yoy)⁴. Sasaran inflasi tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan daya saing perekonomian domestik terhadap regional dan menyeimbangkan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Untuk mendukung pencapaian target inflasi pada periode 2025–2027, serta sesuai dengan arahan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 313 Tahun 2023, perlu disusun Peta Jalan Pengendalian Inflasi sebagai acuan dalam mengendalikan inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah⁵. Penyusunan panduan ini mengacu pada hasil evaluasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi periode 2022–2024 dan telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan

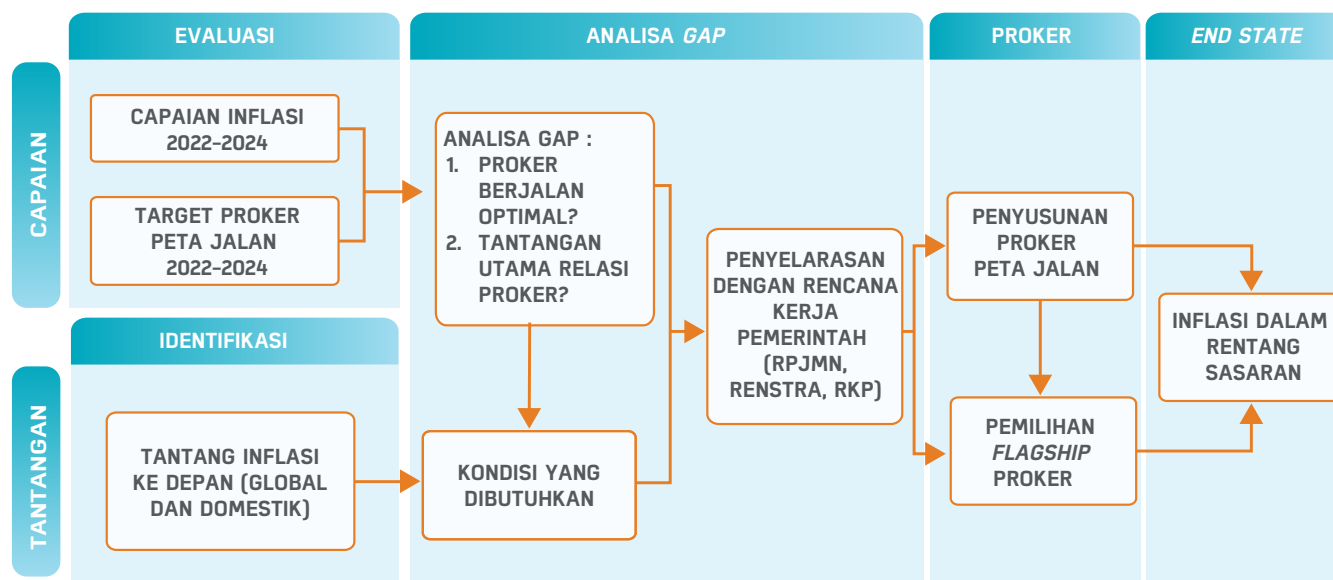
⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024 Tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027.

⁵ Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 148 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebagaimana diubah oleh Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 313 Tahun 2023

Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta Rencana Strategis kementerian/ lembaga anggota TPIP. Dengan demikian, program kerja yang disusun diharapkan dapat sejalan dengan target dan rencana kerja pemerintah. Target program kerja 2025-2027 disusun secara kuantitatif berdasarkan rencana kerja terkini agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 juga mengakomodasi arahan Presiden RI dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2024. Pada Rakornas tersebut, Presiden RI menekankan pentingnya upaya memperkuat pengendalian inflasi ke depan yang ditempuh melalui lima strategi untuk meningkatkan pengamanan produksi dan efisiensi rantai pasok pangan. Lima strategi tersebut, yaitu (i) memperkuat produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim; (ii) mengakselerasi penerapan teknologi berbasis riset dalam mendukung digitalisasi pertanian (*smart agriculture*); (iii) mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian; (iv) memutakhirkan sistem dan infrastruktur logistik yang terintegrasi guna mendukung kelancaran distribusi dan efisiensi rantai pasok antardaerah; dan (v) memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga, di tingkat pusat dan daerah, guna mendukung upaya pengendalian inflasi.

Sejalan dengan arahan Presiden RI tersebut, upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui pengamanan produksi dan perbaikan efisiensi rantai pasok pangan menjadi fokus pengendalian inflasi. Perkembangan inflasi sepanjang 2022-2024 menunjukkan bahwa kesinambungan pasokan pangan domestik memiliki peran penting dalam menentukan capaian inflasi IHK, terutama di tengah berlangsungnya *supply shock* global sejumlah komoditas pangan. Sementara itu, kebutuhan pangan domestik diperkirakan terus meningkat seiring dengan pemulihan perekonomian yang terus berlangsung. Namun demikian, berbagai tantangan struktural pemenuhan kebutuhan pangan secara berkesinambungan masih mengemuka, antara lain stagnasi perbaikan produktivitas pertanian, alih fungsi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya manusia pertanian, inefisiensi rantai distribusi pangan dan keterbatasan kemampuan mengantisipasi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya penguatan sisi hulu pertanian yang disertai dengan peningkatan efisiensi distribusi pangan diperlukan untuk menjaga kesinambungan pasokan pangan di berbagai wilayah dalam rangka mendukung tercapainya inflasi yang stabil dan rendah. Untuk itu, Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 disusun dengan mengambil tema “Penguatan Struktur dan Efisiensi Perekonomian untuk Pencapaian Target Inflasi Menuju Indonesia Maju”.



Gambar 1.2. Tahapan Penyusunan Peta Jalan 2025-2027

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BAB 2

EVALUASI PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI 2022-2024





Evaluasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024

Inflasi IHK berada pada rentang sasaran, kecuali pada tahun 2022 akibat *supply shock*, penyesuaian BBM dan cuaca

	Sasaran*	Realisasi			
	 IHK	 IHK	 Inti	 Volatile Food	 Administered Prices
2022	3,0%±1%	5,51%	3,36%	5,61%	13,34%
2023	3,0%±1%	2,61%	1,80%	6,73%	1,72%
2024	2,5%±1%	1,57%	2,26%	0,12%	0,56%

	 INFLASI INTI 	 INFLASI VOLATILE FOOD 	 INFLASI ADMINISTERED PRICES 
	"Inflasi Inti terjaga dalam sasaran"	"Inflasi <i>volatile food</i> dinamis, dipengaruhi cuaca dan permasalahan struktural"	"Inflasi <i>administered price</i> melambat setelah meningkat tinggi di 2022"
Capaian Peta Jalan 2022-2024	• Perkembangan Inflasi. Inflasi inti terjaga stabil, meski meningkat di akhir periode dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang meningkat di tengah ekspektasi inflasi yang terjaga. • Demand. Perbaikan permintaan berlangsung gradual di tengah perubahan perilaku konsumsi masyarakat. • Supply. Sisi penawaran yang terjaga didukung oleh kapasitas perekonomian yang masih dapat memenuhi permintaan dan tekanan eksternal yang ditransmisikan terbatas.	• Perkembangan inflasi. Inflasi VF 2022-2023 cukup tinggi dipengaruhi permasalahan pasokan seiring akibat cuaca, di tengah transmisi kenaikan BBM 2022 yang terbatas, terutama pada komoditas beras dan hortikultura. Inflasi VF turun pada 2024 didukung cuaca yang kondusif bagi produksi pangan dan kebijakan stabilisasi harga. • Demand. Perbaikan permintaan setelah pandemi berlangsung gradual. • Supply. Pasokan secara umum terjaga, namun terdapat disparitas pasokan antarwaktu terutama akibat kondisi cuaca ekstrem, pola budidaya dan pengolahan yang belum efisien sehingga perbaikan produktivitas menjadi terbatas, serta pemenuhan pasokan dari impor yang dilakukan secara gradual dijaga keberlanjutannya.	• Perkembangan inflasi. Inflasi AP meningkat tinggi pada 2022, seiring kebijakan pengalihan subsidi BBM akibat kenaikan harga minyak dunia, dan kemudian dalam tren turun. Penurunan inflasi AP 2023-2024 didukung penyesuaian harga energi oleh Pemerintah yang minimal. • Demand. Peningkatan permintaan berlangsung gradual, sejalan kenaikan mobilitas masyarakat pascapandemi. • Supply. Harga minyak global mulai turun pada 2023 sehingga kebijakan penyesuaian harga energi oleh Pemerintah cenderung minim. Kenaikan cukai rokok pada periode 2023-2024 lebih rendah dibandingkan 2022.
Lessons Learned	• Stabilitas perekonomian yang terjaga dan inflasi yang stabil mendorong ekspektasi inflasi menurun. • Stabilitas nilai tukar perlu terus dijaga untuk mempertahankan ekspektasi pelaku ekonomi dan meminimalkan transmisi tekanan eksternal ke domestik.	• Konsistensi strategi pengendalian inflasi, terutama intervensi pada periode tekanan harga pangan, dapat menahan kenaikan harga lebih lanjut. • Faktor cuaca dan kendala struktural (a.l. pola tanam dan infrastruktur) menyebabkan disparitas harga antarwaktu dan antardaerah. • Dukungan impor yang tepat waktu dan jumlah menopang kesinambungan pasokan dan stabilitas harga. • Perlunya menjaga dukungan sarana dan prasarana pertanian dan impor pangan yang lebih baik.	• Pergerakan harga energi global mempengaruhi harga energi domestik. • Pengalihan subsidi BBM ke bantuan sosial dapat mendukung daya beli masyarakat dan mendorong subsidi lebih tepat sasaran di tengah kenaikan harga BBM. • Kebijakan Pemerintah yang terukur mendukung stabilitas inflasi (<i>supply side</i>).

Evaluasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024



CAPAIAN PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI 2022-2024

Secara umum, program kerja pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 dalam strategi utama Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K) telah terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan.



TANTANGAN IMPLEMENTASI PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI 2022-2024

- Peningkatan ketidakpastian global dan dinamika domestik mempengaruhi perkembangan tekanan inflasi, dari sisi harga dan pasokan.
- Ketidakseimbangan pasokan antarwaktu akibat dampak fenomena cuaca, ketidakseimbangan pasokan antardaerah akibat kendala distribusi, dan perkembangan harga pangan global
- Dukungan impor pangan yang belum sepenuhnya tepat waktu maupun jumlah.
- Integrasi data pangan dan tingkat keandalan TPID

K 1 : KETERJANGKAUAN HARGA

STABILISASI HARGA

- Review HET dan/atau Harga Acuan Pembelian dan Penjualan
- Stabilisasi harga dan stok bahan pokok melalui koordinasi pemerintah pusat, daerah dan satgas pangan
- Optimalisasi kegiatan OP/SPHP beras dan komoditas pangan lainnya
- Penetapan kebijakan harga komoditas dengan mempertimbangkan sasaran inflasi IHK dan kondisi fiskal

MENGELOLA PERMINTAAN

- Menjaga volatilitas nilai tukar
- Menjaga keseimbangan internal perekonomian

K 2 : KETERSEDIAAN PASOKAN

PRODUKSI DOMESTIK, PENGUATAN CPP

- Perluasan adopsi teknologi (IOT) budidaya pertanian dan pengembangan lumbung pangan (*food estate*)
- Pengembangan lumbung pangan (*food estate*), pekarangan pangan bergizi, serta pembangunan dan optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian
- Penerapan praktik budaya sesuai GAP dan GHP, serta modernisasi pengolahan dan penyimpanan produk pertanian
- Peningkatan produksi protein hewani dan ketersediaan telur ayam
- Percepatan swasembada gula serta peningkatan CPO melalui produksi, produktivitas dan perluasan lahan
- Penguatan pasokan bahan bakar non BBM
- Penguatan cadangan pangan pemerintah

MEKANISME EKSPOR-IMPOR

- Diversifikasi negara asal impor komoditas pangan strategis melalui kerja sama MoU
- Penguatan realisasi impor pangan

MEMPERKUAT KELEMBAGAAN

- Penguatan kelembagaan petani pangan, perkebunan sawit, dan petani tebu
- Peningkatan indeks aksesibilitas pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian
- Peningkatan SRG dan PLK serta optimalisasi *Holding* BUMN Klaster Pangan
- Optimalisasi *holding* BUMN klaster pangan

K 3 : KELANCARAN DISTRIBUSI

PENGUATAN KAD

- Penguatan dan perluasan kerja sama antardaerah
- Fasilitasi Distribusi Pangan oleh (PMT), (TTIC), dan (TMT)/(TTI)

MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR

- Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antarwilayah termasuk ke daerah 3TP melalui udara, laut, maupun panjang jalan mantap
- Penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir

K 4 : KOMUNIKASI EFEKTIF

KUALITAS DATA

- Penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi
- Peningkatan kualitas dan keakuratan data PIHPS dan pasokan pangan nasional

KOORDINASI PUSAT-DAERAH

- Penyusunan peta jalan TPID
- Peningkatan keandalan TPID

EKSPEKTASI INFLASI

- Pelaksanaan bauran kebijakan yang kredibel untuk menjaga ekspektasi inflasi melalui komunikasi yang rutin dan tepercaya didukung dengan komunikasi yang baik

EVALUASI PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI 2022-2024

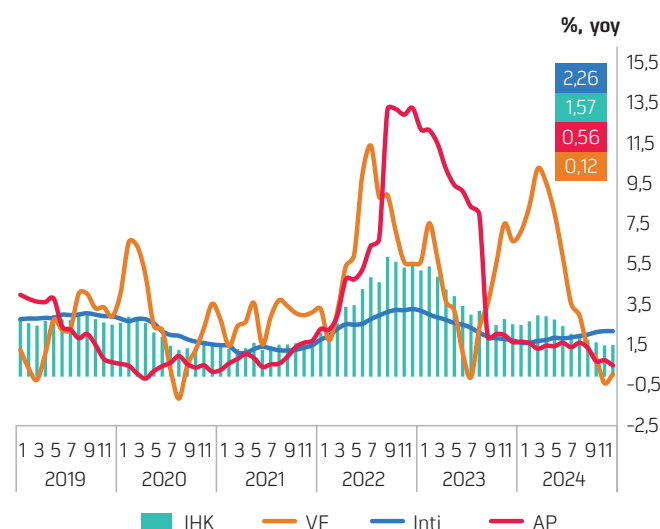
2.1 Evaluasi Pencapaian Inflasi 2022-2024

Inflasi terkendali dan terjaga dalam kisaran sasaran, kecuali pada 2022. Realisasi inflasi IHK selama 2022-2024 masing-masing tercatat sebesar 5,95%, 2,28%, dan 1,57% (yoy). Pencapaian realisasi inflasi 2022 berada di atas kisaran sasaran yang ditetapkan sebesar $3,0 \pm 1\%$ didorong oleh gangguan pasokan akibat dampak fenomena La Nina, peningkatan harga komoditas global, serta penyesuaian harga energi oleh Pemerintah. Sementara itu, realisasi inflasi pada 2023 dan 2024 terkendali dan kembali berada dalam kisaran sebesar $3,0 \pm 1\%$ dan $2,5 \pm 1\%$.

Inflasi IHK yang terkendali disumbang oleh inflasi inti yang terjaga rendah, serta inflasi VF dan AP tetap terjaga.

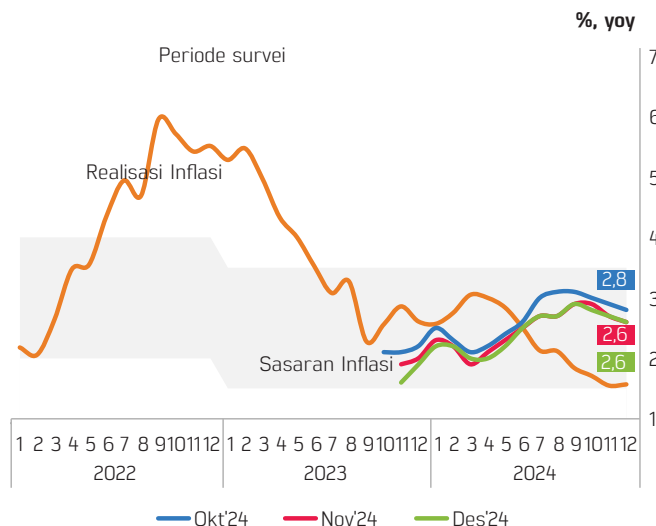
Realisasi inflasi tersebut didukung oleh ekspektasi inflasi yang terjaga dan perbaikan permintaan domestik yang masih gradual pada masa pemulihan pasca pandemi Covid-19, di tengah transmisi dampak eksternal yang dapat diminimalkan. Sinergi dan koordinasi upaya pengendalian inflasi melalui TPIP-TPID dan GNPI di berbagai wilayah juga berkontribusi pada capaian inflasi yang terkendali dalam sasarannya.

Inflasi inti cenderung rendah pada 2023-2024 setelah meningkat pada 2022 akibat dampak rambatan inflasi VF dan AP. Pada 2022, inflasi inti tercatat sebesar 3,36% (yoy), lalu menurun menjadi 1,80% (yoy) dan 2,26% (yoy) pada



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.1. Disagregasi Inflasi Tahunan



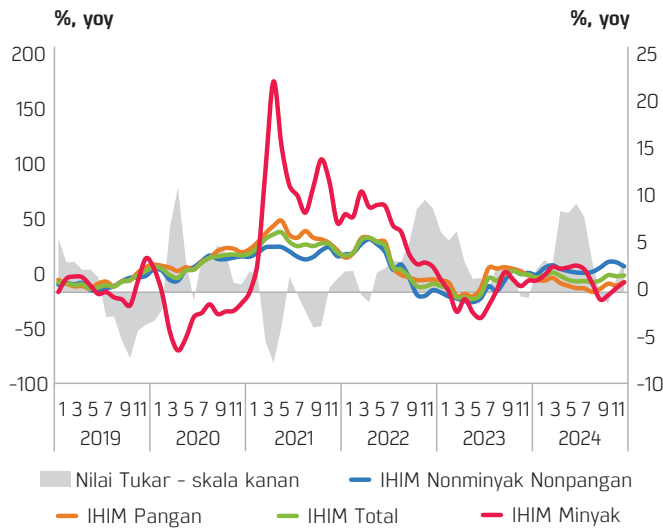
Sumber: BPS dan *Consensus Economics*

Grafik 2.2. Lintasan Ekspektasi Inflasi 2025
Consensus Forecast

2023 dan 2024. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat setelah pandemi di tengah tekanan sisi suplai, baik dari global maupun domestik. Selain itu, ekspektasi inflasi sepanjang 2022-2024 relatif terjaga dan berada pada kisaran sasaran inflasi. Peningkatan inflasi inti pada 2022 disumbang terutama oleh kenaikan inflasi barang, sedangkan inflasi jasa cenderung menurun. Pada 2023-2024, inflasi barang menurun setelah mengalami peningkatan pada 2022 seiring dengan kenaikan harga komoditas global pascapandemi Covid-19. Namun demikian, pada akhir 2024 inflasi inti barang cenderung meningkat disumbang oleh komoditas emas perhiasan akibat kenaikan harga emas global.

Tekanan inflasi inti bersumber dari eksternal di tengah permintaan domestik yang terbatas dan penyesuaian harga Pemerintah yang minimal. Kenaikan inflasi inti pada 2022 didorong terutama oleh tekanan eksternal berupa peningkatan harga komoditas global dan nilai tukar, serta kenaikan ekspektasi inflasi. Kondisi ini mendorong peningkatan harga *input* impor, serta mengakibatkan kenaikan dampak rambatan inflasi AP dan VF seiring dengan penyesuaian harga BBM oleh Pemerintah dan kenaikan harga pangan domestik. Namun demikian, sepanjang 2023 inflasi inti terjaga stabil dan cenderung rendah. Pada 2024, inflasi inti kembali meningkat didorong terutama oleh kenaikan harga beberapa komoditas global sejalan dengan ketidakpastian global yang masih tinggi dan permintaan domestik yang meningkat gradual.

Inflasi kelompok VF sepanjang 2022-2024 cenderung fluktuatif. Pada 2022, inflasi VF berada pada level tinggi sebesar 5,61% (yoy) setelah menyentuh level tertinggi



Sumber: Bloomberg

Grafik 2.3. Tekanan Eksternal

sebesar 11,47% (yoy) pada Juli 2022. Inflasi VF kembali meningkat menjadi 6,73% (yoy) pada 2023, sebelum akhirnya menurun signifikan menjadi 0,12% (yoy) pada akhir 2024. Inflasi VF 2022-2024 menghadapi berbagai sejumlah tantangan seperti kenaikan harga komoditas global dan dampak fenomena cuaca yang mengakibatkan penurunan produksi domestik. Upaya pengendalian inflasi VF diperkuat pada periode berlangsungnya *supply shock* didukung oleh intervensi pasokan yang dilakukan secara meluas dan konsisten, upaya peningkatan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan, termasuk optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam upaya pengendalian inflasi daerah.

Inflasi VF 2022 dipicu terutama oleh kenaikan harga komoditas global, kenaikan harga energi domestik, dan gangguan pasokan pangan akibat cuaca. *Re-opening* perekonomian global pasca-Covid 19 dan peningkatan ketegangan geopolitik antara lain konflik Rusia-Ukraina mengakibatkan terjadinya *shock* rantai pasok global. Perkembangan tersebut mendorong peningkatan harga berbagai komoditas global seperti CPO, sereal, dan energi yang kemudian ditransmisikan pada harga domestik. Lebih lanjut, anomali cuaca dan cuaca ekstrem menyebabkan penurunan produksi pangan domestik, terutama pada komoditas seperti cabai, bawang merah, dan beras sehingga mendorong lonjakan harga-pangan. Pada tahun 2023, pengaruh fenomena cuaca berlanjut seiring dengan berlangsungnya fenomena El Nino yang mengakibatkan penurunan produktivitas pangan domestik, khususnya beras. Pada 2024, kondisi cuaca kembali kondusif sehingga mendukung perbaikan produksi, khususnya sepanjang semester II 2024.

Inflasi kelompok VF yang terkendali didukung oleh berbagai kebijakan *extra effort* stabilisasi pasokan dan harga oleh Pemerintah. Pemerintah dan Bank Indonesia memperkuat sinergi untuk memastikan inflasi tetap berada dalam kisaran target dan dapat mendukung stabilitas perekonomian dalam masa pemulihan pasca pandemi. Koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi dilakukan melalui kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Selain itu, pembentukan Badan Pangan Nasional pada pertengahan 2021 turut memperkuat koordinasi upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan secara nasional. Sejumlah kebijakan stabilisasi harga yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain penguatan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk beras dan jagung, Gerakan Pangan Murah (GPM), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) antara daerah surplus dan defisit, program *culling dan cutting* pada komoditas daging dan telur ayam ras, optimalisasi Kerja sama Antar Daerah (KAD), dan optimalisasi fasilitasi produksi pangan domestik, serta optimalisasi pemanfaatan APBD untuk mendukung pengendalian inflasi turut mendukung penurunan tekanan inflasi kelompok VF.

Penurunan inflasi VF terutama bersumber dari inflasi beras yang menurun dan terjaga stabil seiring dengan perbaikan pasokan. Komoditas beras memiliki bobot inflasi yang tertinggi pada keranjang IHK dibandingkan komoditas pangan lain, sehingga inflasi beras yang stabil berkontribusi pada penurunan inflasi VF pada akhir periode peta jalan pengendalian inflasi 2022-2024. Sementara itu, inflasi aneka cabai dan bawang merah relatif terjaga setelah kenaikan pada 2024 didukung oleh produksi antarwaktu yang terjaga. Secara umum, pengendalian inflasi hortikultura masih menghadapi tantangan seiring sifatnya yang *perishable* dan perkembangan cuaca yang sangat mempengaruhi produktivitasnya. Adapun fluktuasi inflasi daging dan telur ayam ras cenderung menurun didukung oleh kondisi *oversupply* yang berlanjut. Namun demikian, perkembangan harga jagung pakan ternak semakin mempengaruhi perkembangan harga kedua komoditas tersebut. Lebih lanjut, dukungan pasokan impor untuk komoditas bawang putih dan daging sapi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga domestik.

Perkembangan inflasi VF masih dipengaruhi oleh faktor cuaca yang mengganggu produksi pangan dan kendala struktural. Fenomena La Nina yang berlanjut pada 2022 mengakibatkan penurunan produksi pangan, khususnya komoditas hortikultura yang sensitif terhadap kondisi basah. Lebih lanjut, fenomena El Nino yang berlangsung sejak

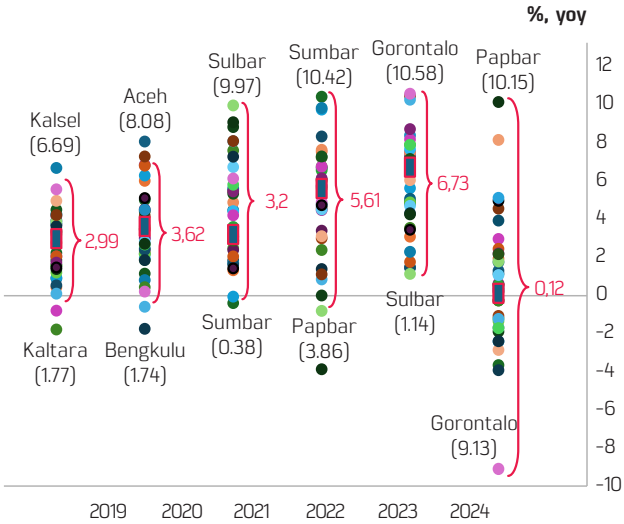
Frekuensi Penyumbang Inflasi (mtm%)					
2022		2023		2024	
Komoditas	Total	Komoditas	Total	Komoditas	Total
Rokok Kretek Filter	9	Beras	10	Sewa Rumah	11
Bahan Bakar Rumah Tangga	8	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	9	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	11
Telur Ayam Ras	8	Cabai Merah	8	Sewa Rumah	7
Bawang Merah	8	Cabai Rawit	7	Bawang Merah	7
Beras	6	Bawang Putih	7	Sewa Rumah	7
Angkutan Udara	6	Angkutan Udara	7	Ikan Segar	7
Tomat	5	Telur Ayam Ras	7	Sewa Rumah	6
Sewa Rumah	4	Sewa Rumah	6	Beras	6
Cabai Merah	4	Bawang Merah	5	Bawang Putih	6
Emas Perhiasan	4	Daging Ayam Ras	5	Telur Ayam Ras	5
Inti		VF		AP	

Sumber: BPS

Tabel 2.1. Frekuensi Penyumbang Inflasi

Semester II 2023 hingga awal 2024 menyebabkan penurunan produktivitas pangan dan pergeseran musim tanam. Penurunan produksi terutama terjadi pada komoditas padi, sehingga menjadi penyumbang utama inflasi tahun 2023-2024. Namun demikian, cuaca lebih kondusif pada Semester II 2024 sehingga turut mendukung perbaikan produksi pangan. Lebih lanjut, disparitas pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah tetap menjadi tantangan dalam menjaga kestabilan harga pangan nasional. Hal ini mengakibatkan melebarnya disparitas inflasi VF antardaerah, terutama pada 2024.

Inflasi kelompok AP terjaga sepanjang 2023-2024 sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga energi domestik. Namun demikian, kenaikan harga energi global pada 2022 mendorong Pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian harga energi domestik, khususnya Bahan bakar Minyak (BBM) dan listrik nonsubsidi. Capaian inflasi AP selama 2022-2024 berturut-turut tercatat sebesar 13,34%, 1,72%, dan 0,56% (yoy). Inflasi AP sepanjang 2023-2024 terjaga rendah dengan beberapa fluktuasi sesuai dengan pola musiman historisnya antara lain pada periode HBKN. Sepanjang 2023-2024, Pemerintah mengambil kebijakan untuk mempertahankan harga energi domestik di tengah tekanan kenaikan harga energi global, khususnya untuk harga komoditas energi subsidi bensin dan solar. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat dan

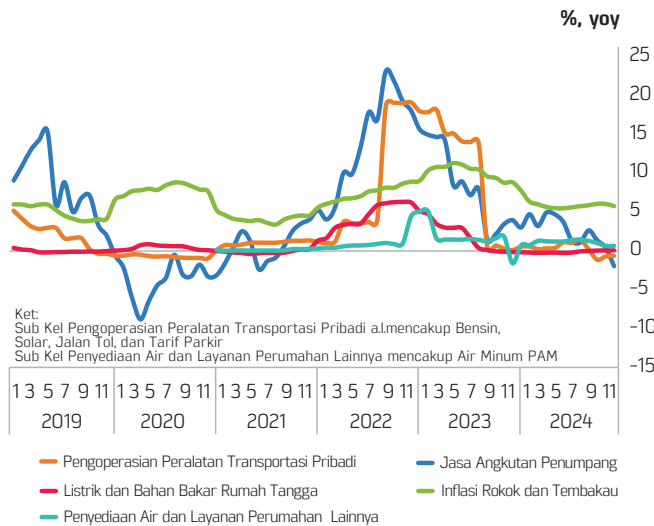


Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.4. Disparitas Inflasi VF Provinsi

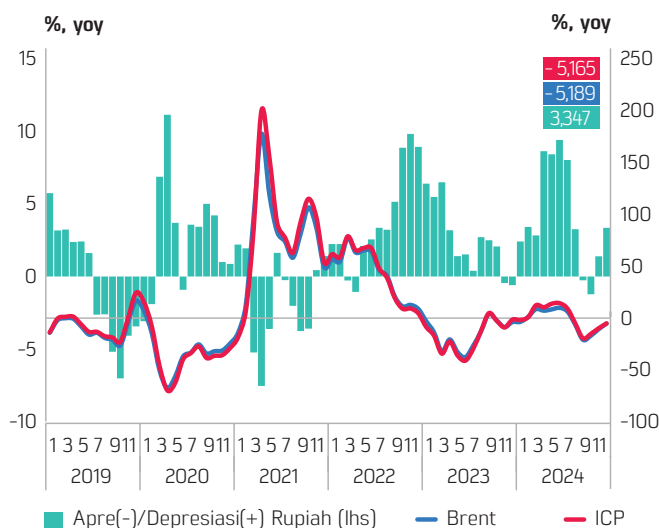
mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Selain itu, Pemerintah menerapkan kebijakan diskon Angkutan Udara (AU) pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru 2024 untuk meminimalisasi peningkatan tarif AU. Hal ini mendukung inflasi AP yang lebih rendah.

Selain penyesuaian harga energi pada 2022, inflasi AP sepanjang 2022-2024 juga disumbang oleh peningkatan permintaan, khususnya kenaikan mobilitas masyarakat, serta transmisi kebijakan tarif cukai hasil tembakau. Inflasi



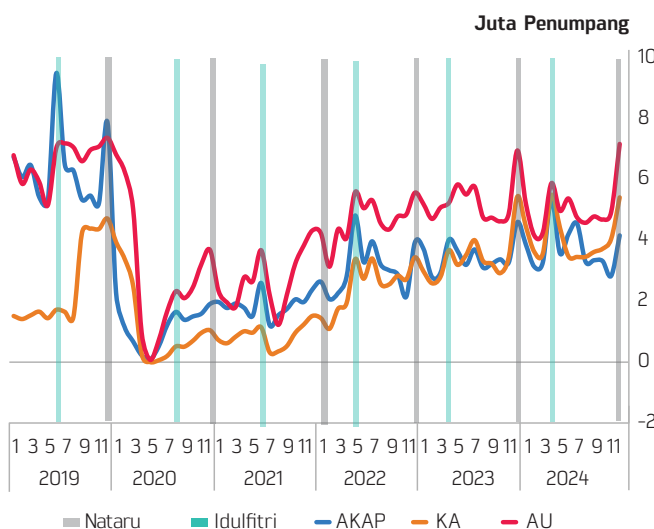
Sumber: BPS

Grafik 2.5. Perkembangan Inflasi Berdasarkan Sub Kelompok AP



Sumber: Kementerian ESDM, BI, Bloomberg

Grafik 2.6. Perkembangan Determinan Harga Energi

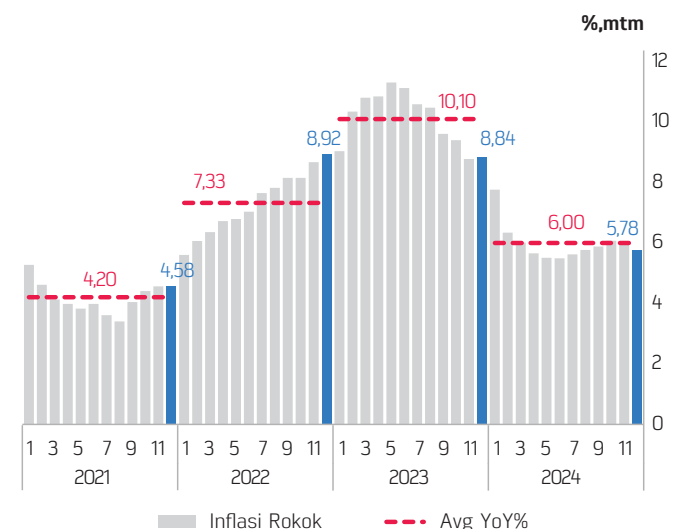


Sumber: Kemenhub

Grafik 2.7. Jumlah Penumpang Jasa Angkutan

jasa angkutan penumpang cenderung turun dan stabil pada 2023-2024, setelah sempat meningkat signifikan pada 2022. Secara tahunan, inflasi jasa angkutan penumpang sepanjang 2022-2024 masing-masing tercatat inflasi sebesar 18,05% (yoy), 3,96% (yoy) dan deflasi 1,93% (yoy). Inflasi jasa angkutan penumpang terutama disumbang oleh penyesuaian tarif setelah kenaikan BBM pada 2022, selanjutnya disumbang oleh fluktuasi tarif AU. Peningkatan inflasi pada tarif angkutan lainnya terutama terjadi pada periode peningkatan mobilitas masyarakat antara lain seperti periode HBKN. Perkembangan inflasi jasa angkutan penumpang ini didukung oleh kebijakan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga energi domestik, termasuk upaya menurunkan harga avtur di sejumlah bandara, khususnya untuk mendukung kebutuhan selama periode Natal dan Tahun Baru 2024.

Inflasi aneka rokok turut memberikan sumbangan cukup besar selama 2022-2024 seiring dengan transmisi Cukai Hasil Tembakau (CHT) kepada harga retail. Cukai Hasil Tembakau (CHT) ditetapkan sebesar 12% pada 2022, kemudian diikuti dengan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) rata-rata sebesar 10% pada 2023-2024. Secara umum, transmisi CHT oleh produsen kepada harga jual retail relatif terjaga rendah dan peningkatan harga retail yang cukup signifikan hanya terjadi pada awal tahun 2023. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perbaikan konsumsi masyarakat yang masih berlangsung terbatas, kecenderungan *downgrading* konsumsi rokok dan peningkatan peredaran rokok ilegal, sehingga mendorong produsen rokok mentransmisikan tarif cukai secara gradual dan lebih terbatas untuk menjaga pangsa pasar.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.8. Perkembangan Inflasi Komoditas Rokok

2.2 Evaluasi Pencapaian Program Kerja 2022-2024

Secara keseluruhan, program kerja dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 yang berfokus pada upaya penguatan seluruh aspek 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) telah dilaksanakan dengan baik.

Sebagian besar program kerja Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 telah terlaksana dan berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Namun demikian, terdapat beberapa program kerja yang tidak mencapai target akibat kendala implementasi di lapangan. Belum optimalnya komitmen dan dukungan dari *stakeholders* terkait, serta kendala teknis menjadi beberapa penyebab tidak tercapainya target program kerja.

2.2.1 Keterjangkauan Harga (K1)

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan mengelola permintaan secara efektif, Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program kerja TPIP yang tersebar di sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L).

Upaya untuk meningkatkan sinkronisasi kebijakan serta memperkuat evaluasi capaian program pengendalian inflasi dilakukan melalui penerbitan sejumlah ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan konsistensi pelaksanaan kebijakan, antara lain (i) Petunjuk Pelaksanaan Kementerian PPN/ Bappenas Nomor 3/ JUKLAK/SESMEN/03/2021 tentang Penandaan (*Tagging*) Kebijakan Pengendalian Inflasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; (ii) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK 0.10/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024; serta (iii) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026 dan Tahun 2027. Selain itu, sebagai upaya untuk memperkuat pengendalian inflasi di daerah, telah diterbitkan pula Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tahun 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah sebagai tindak lanjut arahan presiden untuk meminimalisasi dampak penyesuaian BBM pada akhir 2022.

Program kerja operasi pasar dilaksanakan dalam rangka mendukung keterjangkauan harga, khususnya komoditas pangan strategis. Upaya untuk memperkuat implementasi strategi intervensi untuk menjaga stabilitas harga pangan dilakukan dengan reformulasi program Ketersediaan

Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) menjadi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, serta Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah. Program SPHP memperluas cakupan stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan menyertakan sejumlah komoditas pangan strategis lainnya di luar beras. Selain itu, program SPHP melibatkan sinergi lintas sektor dan kerja sama yang lebih terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta pelaku usaha secara berkelanjutan. Pelaksanaan program SPHP beras medium tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan CBP yang mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah, dan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 01/KS.02.02/K/1/2023 sebagai petunjuk teknis pelaksanaan. Semenjak 2023, program KPSH telah disempurnakan menjadi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Perum BULOG mendapatkan amanat untuk melaksanakan penugasan Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium di seluruh Indonesia. Pelaksanaan program SPHP beras medium dilakukan melalui penyaluran CBP yang mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga bagi Keluarga Penerima Manfaat. Sepanjang 2022 hingga 2024, realisasi penyaluran CBP dalam rangka pelaksanaan SPHP masing-masing tahun mencapai 1,25 juta ton, 1,19 juta ton, dan 1,40 juta ton. Penyaluran SPHP secara umum berjalan baik, namun demikian terdapat sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas pelaksanaan SPHP antara lain keterlambatan operasional distribusi, gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem dan kondisi infrastruktur yang belum baik di beberapa daerah, maupun pelanggaran penjualan beras SPHP di atas HET. Pemerintah menempuh sejumlah upaya untuk menghadapi tantangan tersebut antara lain melalui (i) optimalisasi sistem monitoring menggunakan digitalisasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; (ii) perluasan pelaksanaan SPHP menggunakan berbagai saluran, termasuk pasar tradisional, ritel modern, distributor maupun operasi pasar yang bekerja sama dengan pemerintah daerah; dan (iii) peningkatan koordinasi lintas sektor serta memperkuat peran pengawasan di daerah agar penyaluran SPHP tepat sasaran dan sesuai dengan batas harga yang diatur. Selain



itu, pemerintah juga terus memperkuat CBP dan memperluas kerja sama dengan penggilingan padi lokal sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pasokan.

Upaya stabilisasi harga pangan juga didukung pelaksanaan operasi pasar (OP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Kementerian Perdagangan beserta Perum BULOG secara berkesinambungan melaksanakan OP komoditas pangan strategis lainnya, seperti gula pasir dan minyak goreng, yang bertujuan untuk menjaga volatilitas harga dan menjamin ketersediaan pasokan. Selain itu, sebagai upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui penyediaan pasokan pangan strategis dengan harga terjangkau bagi masyarakat, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menyelenggarakan program GPM. GPM dilaksanakan di sejumlah lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan melibatkan berbagai pihak di antaranya, gapoktan, asosiasi, distributor pangan, BUMN pangan seperti Perum BULOG dan ID FOOD, serta pelaku usaha pangan lainnya dalam pemenuhan pasokan pangan pada GPM. Pelaksanaan GPM pada tahun 2022 tercatat sebanyak 442 kali yang tersebar di 30 Provinsi dan 110 Kab/Kota. Pelaksanaan GPM di tahun 2023 berhasil dilakukan sebanyak 1.626 kali yang tersebar di 36 Provinsi dan 324 Kab/Kota. Sementara itu, GPM tahun 2024 terus diperluas dan dilaksanakan sebanyak 9.546 kali yang tersebar di 38 Provinsi dan 480 Kab/Kota.

Perum BULOG mendapatkan penugasan stabilisasi pasokan dan harga jagung pakan ternak dan kedelai. Stabilitas harga kedua komoditas tersebut berkaitan erat dengan stabilitas harga komoditas pangan daging ayam ras dan telur ayam ras, serta produk turunan kedelai. Peningkatan

harga jagung domestik dan kedelai global, terutama pada tahun 2022, mendorong Perum BULOG untuk melakukan intervensi pasokan jagung pakan ternak dan kedelai dengan menggunakan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) yang sebesar 50 ribu ton dan Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP) yang sebesar 200 ribu ton melalui impor. Selain itu, Perum BULOG diberikan penugasan untuk memberikan subsidi selisih harga pembelian bahan baku kedelai sebesar Rp 1.000/kg kepada pengrajin tempe dan tahu. Secara keseluruhan tahun 2022, realisasi penyediaan jagung pakan kepada peternak ayam petelur skala mikro dan kecil tahun 2022 mencapai 24.968 ton, sedangkan realisasi program bantuan penggantian selisih harga pembelian kedelai sebesar 168.475 ton⁶. Selain upaya stabilisasi harga, Pemerintah melalui satuan tugas pangan yang dikoordinasikan oleh Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait secara konsisten melakukan kegiatan pemantauan dan harga maupun pasokan pangan di daerah dalam rangka memastikan stabilitas harga pangan dan kesesuaiannya dengan ketentuan terkait harga pangan. Lebih lanjut, Badan Pangan Nasional secara berkala juga melakukan *review* harga acuan baik di tingkat produsen maupun tingkat konsumen.

Koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) terus dilaksanakan untuk merumuskan dan mengantisipasi dampak perkembangan eksternal dan kebijakan Pemerintah terhadap inflasi Administered Prices (AP), terutama terkait harga energi dan penetapan tarif Pemerintah. Koordinasi tersebut mencakup simulasi dampak inflasi,

6 Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilitas Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen.

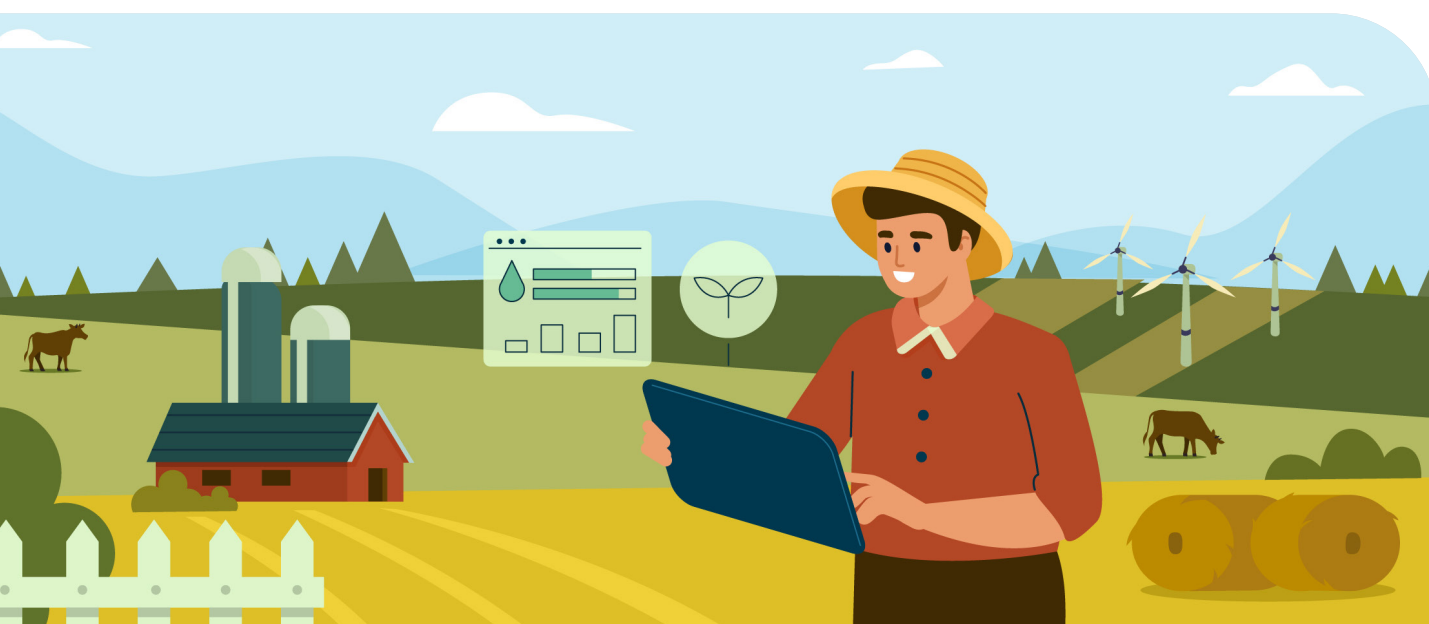
pengaturan *timing*, *magnitude*, dan *sequencing* penyesuaian harga/tarif. Peningkatan tekanan permintaan pasca-Covid, *supply shock* dan ketidakpastian geopolitik global mengakibatkan peningkatan tekanan inflasi, salah satunya pada komoditas energi global. Perkembangan tersebut mendorong Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga energi domestik untuk mengurangi beban subsidi dan/atau kompensasi energi yang ditanggung Pemerintah. Sejumlah penyesuaian kebijakan terkait energi yang dilakukan oleh Pemerintah mencakup penetapan (i) *pertalite* menjadi BBM yang dikompensasi oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tahun 2022 dan berlaku surut sejak 1 Januari 2022; (ii) respons pemerintah atas kenaikan harga minyak dunia dalam bentuk penambahan besaran subsidi dan kompensasi untuk energi dari Rp 152,5 triliun menjadi sebesar Rp 502,4 triliun melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022; (iii) penyesuaian harga BBM melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak; serta (iv) penyesuaian formula tarif penyediaan listrik, termasuk faktor harga batubara acuan melalui Peraturan ESDM Nomor 8 Tahun 2023. Selain itu, berbagai sinergi dan koordinasi dilakukan untuk mengantisipasi dampak rambatan dari kebijakan penyesuaian harga energi domestik untuk menjaga daya beli dan ekspektasi inflasi masyarakat. Upaya untuk meminimalkan dampak rambatan penyesuaian harga energi domestik tersebut dilakukan melalui peningkatan fasilitas bantuan sosial antara lain berupa (i) Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM kepada kelompok rentan sebesar Rp150.000 per bulan selama 4 bulan bagi 20,65 juta Keluarga

Penerima Manfaat (KPM)⁷; (ii) Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 kepada 14,6 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta⁸; (iii) Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 2% Dana Transfer Umum (DTU) bagi pengendalian inflasi daerah, seperti operasi pasar murah, subsidi transportasi, dan dukungan sektor UMKM⁹; dan (iv) penetapan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan anggaran Bantuan Tidak Terduga bagi upaya pengendalian inflasi daerah¹⁰.

Pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan yang mempengaruhi tarif angkutan.

Pada tahun 2022, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menerapkan kebijakan pengenaan *fuel surcharge* kepada penumpang maskapai melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 142 Tahun 2022 sejalan dengan fluktuasi harga energi global yang menyebabkan peningkatan biaya operasional maskapai, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan tarif dasar dalam aturan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) AU. Kebijakan penyesuaian *fuel surcharge* tersebut kembali dilakukan pada tahun 2023 melalui penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Besaran Biaya Tambahan (*Surcharge*) yang Disebabkan Adanya

- 7 Keputusan Dirjen Pemberdayaan Sosial Nomor 158/5/HK.01/8/2022 tentang Juknis pelaksanaan BLT BBM 2022
- 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Upah Bagi Pekerja/Buruh.
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022
- 10 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ Tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Di Daerah



Fluktuasi Bahan Bakar (*Fuel Surcharge*) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Namun demikian, pada 2024 diterbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 150 Tahun 2024 mengenai penurunan besaran biaya tambahan *fuel surcharge* untuk tarif penumpang yang diberlakukan secara khusus selama masa Hari Raya Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga keterjangkauan tarif penerbangan bagi masyarakat dan mendukung kelancaran mobilitas selama periode libur panjang periode HBKN. Upaya menjaga keterjangkauan tarif angkutan udara juga ditempuh melalui penambahan armada maskapai, menjaga ketersediaan konektivitas dan pelayanan di daerah tertinggal terdepan terluar (3T), mendorong kerja sama antarmaskapai, termasuk kerja sama maskapai dengan Pemerintah Daerah untuk menjaga *load factor*.

Upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dilakukan secara konsisten oleh Bank Indonesia untuk meredam dampak inflasi yang bersumber dari faktor eksternal dan menjaga keterjangkauan harga domestik. Secara umum, sepanjang 2022 hingga 2024, nilai tukar Rupiah terjaga sesuai dengan fundamental perekonomian nasional dan mekanisme pasar. Secara tahunan, Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat mengalami depresiasi sebesar 3,90% (yoy) pada 2022. Meskipun demikian, depresiasi Rupiah tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara berkembang lainnya, seperti India dan Filipina. Konsistensi Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan Rupiah mampu mendukung apresiasi nilai tukar Rupiah pada 2023 sebesar 2,59% (yoy). Namun demikian, ketidakpastian global yang berlanjut mengakibatkan nilai tukar Rupiah kembali terdepresiasi sebesar 3,88% (yoy) pada 2024. Bank Indonesia menempuh berbagai langkah stabilisasi nilai tukar untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, di antaranya melalui penetapan kebijakan suku bunga secara konsisten dan terukur dengan didukung oleh intervensi di pasar valas, strategi operasi moneter *pro-market*, dan kecukupan cadangan devisa. Lebih lanjut, stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk menjaga volatilitas jangka pendek dan mengendalikan *imported inflation* dilakukan melalui intervensi di pasar *spot*, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Selain itu, penguatan koordinasi dengan Pemerintah juga dilakukan untuk mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dalam rangka memperkuat kecukupan cadangan devisa.

Stabilisasi harga juga dilakukan melalui upaya menjaga keseimbangan internal perekonomian dengan mengelola permintaan. Dari sisi moneter, telah ditempuh bauran kebijakan yang akomodatif berupa penurunan suku bunga kebijakan pada September 2024 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di tengah inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang stabil. Selain itu, Bank Indonesia juga meningkatkan insentif likuiditas dan pelonggaran instrumen makroprudensial guna makin mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) diterapkan untuk mendorong penyaluran kredit bagi sejumlah sektor prioritas, sementara kebijakan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) yang longgar diterapkan untuk mendukung fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan. Di sisi fiskal, APBN dioptimalkan sebagai *shock absorber* dari dampak ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi belanja subsidi dan perlindungan sosial yang tepat sasaran dan fokus pada program produktif. Pada belanja subsidi, pemerintah mengalokasikan anggaran baik pada subsidi energi maupun nonsubsidi antara lain berupa pupuk, dan *Public Service Obligation* (PSO). Selain itu, pemerintah meningkatkan anggaran perlindungan sosial pada berbagai program baik yang rutin diselenggarakan seperti bantuan Kartu Sembako, maupun secara insidental seperti BLT BBM, dan BLT Minyak goreng. Selain perluasan belanja bantuan sosial untuk mendukung daya beli masyarakat, optimalisasi peran APBN juga dilakukan dalam pengendalian inflasi, termasuk meredam dampak El Nino dan stabilisasi harga pangan melalui anggaran ketahanan pangan. Anggaran ketahanan pangan ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan pasokan, akses dan kualitas pangan, termasuk penguatan aspek infrastruktur fisik maupun nonfisik pendukung produksi dan distribusi pangan.

Peran Pemerintah Daerah semakin diperkuat melalui dukungan anggaran daerah bagi dalam pengendalian inflasi. Optimalisasi peran daerah dalam pengendalian inflasi didukung oleh pengalokasian anggaran APBN ke daerah, di antaranya melalui DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas kelancaran arus distribusi barang, produksi pangan, serta kualitas infrastruktur perdagangan. Selain itu, terdapat pula alokasi dana insentif fiskal sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas komitmen dalam upaya pengendalian inflasi di tingkat daerah. Kombinasi kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung efektivitas dan inovasi pengendalian inflasi di daerah.

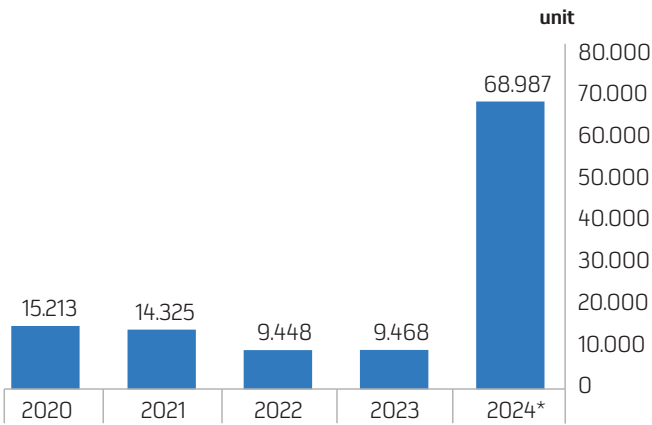
2.2.2 Ketersediaan Pasokan (K2)

Upaya menjaga ketersediaan pasokan dilakukan melalui optimalisasi lahan, serta sarana dan prasarana produksi untuk memperkuat produksi. Kementerian Pertanian secara konsisten berupaya meningkatkan produksi pangan domestik melalui (i) pengembangan pekarangan pangan bergizi¹¹; (ii) peningkatan hasil perkebunan tebu, kelapa sawit, serta swasembada gula; dan (iii) peningkatan hasil produksi ternak. Upaya peningkatan produksi pangan sepanjang 2022-2024 berjalan baik meski menghadapi tantangan dampak fenomena cuaca La Nina (2022) dan El Nino (2023). Kondisi tersebut mengakibatkan terganggunya kesinambungan produksi pangan domestik.

Realisasi pengembangan kawasan pangan, optimalisasi bantuan sarana produksi, serta peningkatan hasil produksi perkebunan dan peternakan sesuai sasaran. Pengembangan kawasan pangan (a.l. komoditas padi, jagung) dan hortikultura dilakukan melalui pengembangan lahan kawasan pangan baru maupun optimalisasi kawasan pertanian pangan yang telah ada melalui penguatan dukungan sarana produksi seperti bibit unggul, pupuk dan peningkatan kemampuan budidaya. Program kawasan pangan ini didukung oleh pengembangan budidaya padi rawa dan padi lahan kering. Lebih lanjut, mekanisme budidaya yang memperkuat aspek *on-farm* dan *off-farm* terus dikembangkan untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan domestik. Pengembangan kawasan padi terintegrasi pada 2023 terealisasi sebesar 266,08 ribu ha, sementara fasilitasi pengembangan kawasan padi pada 2024 mencakup 186,85 ribu ha lahan penerima fasilitas sarana produksi biofortifikasi dan 1.820,43 ribu ha lahan penerima fasilitasi sarana produksi benih. Sementara itu, pengembangan pekarangan pangan bergizi mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan skala rumah tangga pada 13.500 kelompok masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Kementerian Pertanian juga memperkuat pengembangan kawasan pangan hortikultura di sentra utama Jawa Tengah seperti Temanggung dan Wonosobo.

Upaya penguatan produksi domestik juga melibatkan perbaikan pola budidaya, antara lain pada komoditas hortikultura yang bersifat *perishable*. Kementerian Pertanian melaksanakan program pengembangan fasilitasi *nursery* sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kualitas produksi hortikultura, khususnya untuk komoditas

11 Program mencakup pengembangan komoditas hortikultura bawang merah dan aneka cabai.



*) Data sd Oktober 2024
• Total Alsintan Pra Panen (Traktor Roda 2, Traktor Roda 4, Pompa Air)
• Kenaikan signifikan pada 2024 bersumber dari peningkatan bantuan pompa air sebesar 61.601 unit

Sumber: Kementan

Grafik 2.9. Perkembangan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian

cabai dan bawang merah. Program memfasilitasi ketersediaan sediaan cabai dan bawang merah siap tanam dengan menggunakan teknologi *soilblock* yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan menjamin kualitas varietas yang digunakan. Pembangunan fasilitas *nursery* mencapai 37 unit yang tersebar di 32 provinsi pada tahun 2023 yang mencakup prasarana *screenhouse*, sarana irigasi, sarana produksi, dan alat cetak *soilblock*. Program ini juga turut mendukung pengembangan kawasan hortikultura yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian.

Upaya peningkatan produksi pangan domestik juga didukung dengan optimalisasi bantuan sarana produksi dan infrastruktur pertanian. Perbaikan kualitas infrastruktur pertanian terus dilakukan baik dalam bentuk pembangunan maupun rehabilitasi jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian padi melalui perbaikan Indeks Pertanaman (IP)¹². Namun demikian, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi menghadapi sejumlah kendala antara lain penyediaan tanah dan gangguan cuaca yang mengakibatkan target program kerja tidak tercapai secara optimal.

Upaya meningkatkan kualitas pengolahan pasca-panen dilakukan untuk mengurangi *loss*, meningkatkan kualitas hasil panen dan pengelolaan stok yang lebih baik. Peningkatan kualitas pengolahan pasca-panen melalui penyediaan sarana dan prasarana pengolahan serta penyimpanan produk pertanian antara lain berupa fasilitasi *combine harvester*, *cold storage*, *rice milling unit* serta pengolahan cabai dan

12 Indeks pertanaman (IP) adalah rata-rata frekuensi penanaman dan panen dalam satu tahun pada lahan yang sama

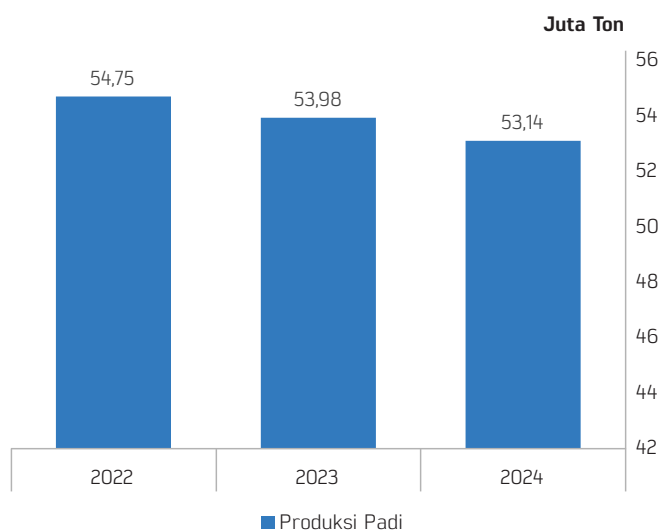
bawang. Pada 2024, Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Pangan Nasional memfasilitasi penyaluran 12 unit *cold storage* dan *dry storage* sejumlah, 1.400 unit *combine harvester* dan 1 unit *Rice Milling Unit*. Pengelolaan berbagai sarana produksi tersebut, khususnya alat dan mesin pertanian, didukung oleh fasilitasi pembentukan Unit Pengembangan Jasa Alsintan (UPJA) terutama di daerah sentra produksi. Kementerian Pertanian terus mendorong pengembangan UPJA melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan UPJA untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan teknis. antara lain ; (i) penyediaan bantuan alsintan kepada UPJA untuk memperkuat layanan; dan (ii) penguatan kelembagaan UPJA. Selain itu, peningkatan kualitas pengelolaan cadangan pangan yang dikelola oleh Perum BULOG dilakukan melalui

pembangunan dan modernisasi gudang serta *rice milling unit*, sehingga dapat mendukung proses pengolahan yang lebih efisien dan kualitas penyimpanan stok yang lebih baik.

Upaya peningkatan produksi pangan domestik juga didukung dengan optimalisasi bantuan sarana produksi dan infrastruktur pertanian. Perbaikan kualitas infrastruktur pertanian terus dilakukan baik dalam bentuk pembangunan maupun rehabilitasi jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian padi melalui perbaikan Indeks Pertanaman (IP)¹³. Namun demikian, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi menghadapi sejumlah kendala antara lain penyediaan tanah dan gangguan cuaca yang mengakibatkan target program kerja tidak tercapai secara optimal.

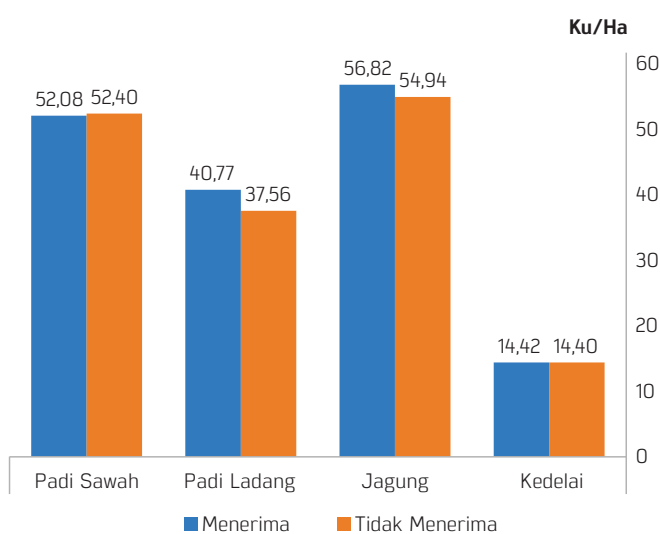
Upaya meningkatkan kualitas pengolahan pasca-panen dilakukan untuk mengurangi *loss*, meningkatkan kualitas hasil panen dan pengelolaan stok yang lebih baik. Peningkatan kualitas pengolahan pasca-panen melalui penyediaan sarana dan prasarana pengolahan serta penyimpanan produk pertanian antara lain berupa fasilitasi *combine harvester*, *cold storage*, *rice milling unit* serta pengolahan cabai dan bawang. Pada 2024, Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Pangan Nasional memfasilitasi penyaluran 12 unit *cold storage* dan *dry storage* sejumlah, 1.400 unit *combine harvester* dan 1 unit *Rice Milling Unit*. Pengelolaan berbagai sarana produksi tersebut, khususnya alat dan mesin pertanian, didukung oleh fasilitasi pembentukan Unit Pengembangan Jasa Alsintan (UPJA) terutama di daerah sentra produksi. Kementerian Pertanian terus mendorong pengembangan UPJA melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan UPJA untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan teknis. antara lain ; (i) penyediaan bantuan alsintan kepada UPJA untuk memperkuat layanan; dan (ii) penguatan kelembagaan UPJA. Selain itu, peningkatan kualitas pengelolaan cadangan pangan yang dikelola oleh Perum BULOG dilakukan melalui pembangunan dan modernisasi gudang serta *rice milling unit*, sehingga dapat mendukung proses pengolahan yang lebih efisien dan kualitas penyimpanan stok yang lebih baik.

Penguatan produksi domestik disertai pula dengan penguatan pengelolaan cadangan pangan beras, jagung, dan kedelai melalui pemanfaatan Penyertaan Modal Negara (PMN) Perum BULOG. Perum BULOG memperoleh PMN pada tahun 2016-2017 sebesar Rp 2 triliun yang ditujukan



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.10. Perkembangan Produksi Padi



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.11. Produktivitas Menurut Mesin Pertanian yang Diterima Petani Tahun 2023

13 Indeks pertanaman (IP) adalah rata-rata frekuensi penanaman dan panen dalam satu tahun pada lahan yang sama

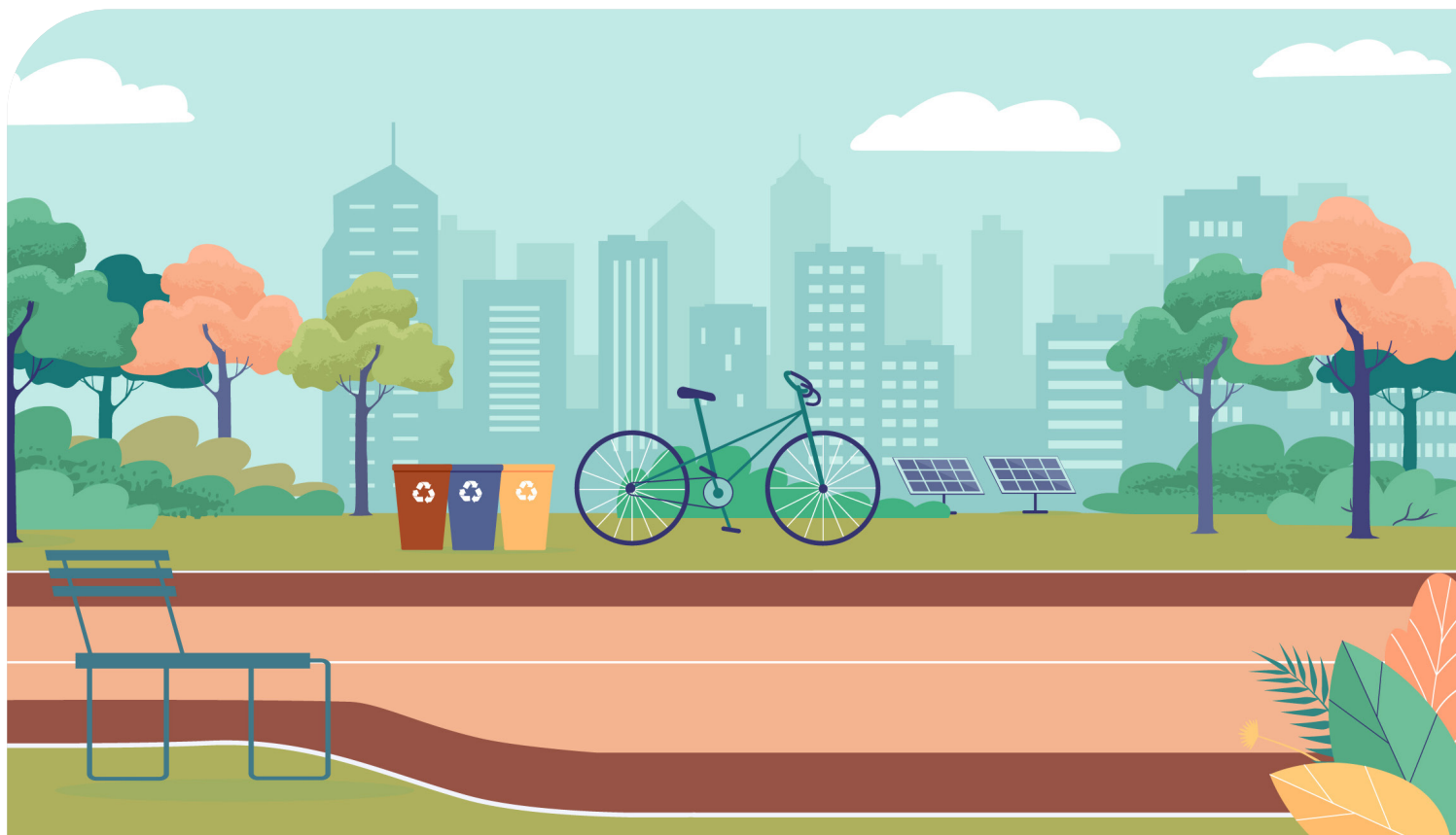
untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur pascapanen, antara lain berupa fasilitas pengolahan gabah dan beras, serta fasilitas penyimpanan gabah dan beras. Realisasi fisik dari proyek yang didanai PMN tersebut telah mulai berjalan pada 2022 secara bertahap. Beberapa fasilitas seperti *Modern Rice Milling Plant* (MRMP) di Kendal, telah mulai beroperasi pada pertengahan 2022. Selain pembangunan sarana produksi dan infrastruktur, sisa anggaran yang ada dipergunakan untuk pembangunan modernisasi maupun renovasi gudang cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh Perum BULOG.

Pemerintah melakukan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan pangan, serta menjaga kestabilan harga di pasar. Perum BULOG secara konsisten berupaya menjaga ketersediaan CBP di level 1-1,5 juta ton, serta melakukan penyaluran bahan pangan melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara berkala. Sepanjang tahun 2022-2024, upaya untuk menjaga tingkat CBP beras pada tingkat yang memadai menghadapi sejumlah tantangan akibat keterbatasan pasokan dalam negeri maupun *shock* pasokan luar negeri seiring dengan gangguan dampak fenomena cuaca yang mengakibatkan penurunan produktivitas beras. Tingkat CBP pada 2022 mencapai titik terendah sepanjang tiga tahun terakhir yaitu sebesar 269,23 ribu ton (posisi Desember 2022), sehingga

mengakibatkan peningkatan harga beras nasional. Lebih lanjut, seiring dengan dukungan pasokan luar negeri dan perbaikan produksi domestik, tingkat CBP kembali meningkat pada 2023 menjadi sebesar 1,29 juta ton (posisi Desember 2023) dan mencapai 1,86 juta ton (posisi Desember 2024).

Perum BULOG memegang peran penting dalam upaya stabilisasi harga beras melalui penyaluran program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Pada tahun 2022, total penyaluran SPHP beras mencapai 1,2 juta ton, meningkat dibandingkan dengan penyaluran pada 2021 sebesar 768,79 ribu ton. Penyaluran SPHP tetap tinggi pada tahun 2023 sebesar 1,2 juta ton dan meningkat menjadi 1,4 juta ton pada 2024. Peningkatan penyaluran SPHP beras tersebut dilakukan untuk menahan kenaikan harga beras yang berlangsung sejak pertengahan 2022 hingga awal 2024. Berbagai strategi dilakukan oleh Pemerintah melalui Perum BULOG untuk meningkatkan ketersediaan beras SPHP di tingkat distributor hingga retail dalam jumlah memadai dan volume kemasan yang sesuai dengan preferensi masyarakat untuk memastikan ketersediaan pasokan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) terus diperkuat melalui penetapan landasan pengelolaan CPP oleh Badan Pangan Nasional dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional. Pengelolaan CPP mengacu



pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 yang mengatur jenis, jumlah, penyelenggaraan, serta penugasan dan pendanaan terkait CPP. Dalam pelaksanaannya, Badan Pangan Nasional berperan sebagai penyelenggara CPP, dengan Perum BULOG dan ID FOOD sebagai operator yang bertanggungjawab atas pengelolaan cadangan pangan 13 komoditas pangan strategis yang meliputi beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, telur ayam, gula konsumsi, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, dan ikan kembung. Namun demikian, sebagai awal, penyelenggaraan dan pengelolaan CPP terutama difokuskan pada komoditas beras, jagung, dan kedelai. Badan Pangan Nasional juga telah menetapkan jumlah stok minimal untuk setiap komoditas, yaitu beras stok akhir tahun minimal 1,2 juta ton, jagung stok akhir tahun minimal 60 ribu ton, dan kedelai stok akhir tahun minimal 20 ribu ton. Untuk mendukung pengelolaan CPP, Pemerintah juga telah menempatkan sarana dan prasarana penyimpanan rantai dingin (*cold chain*) di wilayah konsumen dan produsen guna memperpanjang masa simpan produk pangan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan ketersediaan pangan di seluruh wilayah.

Upaya menjaga pasokan juga didukung oleh penguatan kelembagaan petani, peningkatan akses keuangan, dan perlindungan risiko, guna mendukung keberlanjutan pertanian di Indonesia. Salah satu upaya peningkatan akses keuangan dilakukan melalui pembiayaan sektor pertanian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran KUR sektor pertanian menunjukkan perkembangan yang baik dengan partisipasi debitur yang meningkat. Pada 2022, KUR sektor pertanian tercatat Rp113,43 triliun dengan jumlah debitur sebesar 2,73 juta debitur. Lebih lanjut, pada 2023 penyaluran KUR sektor pertanian mencapai Rp80,6 triliun atau 80,6% dari target kepada 1,64 juta debitur dan pada 2024 sebesar Rp 91,18 triliun atau 91,2% dari target kepada 1,79 juta debitur. Penyerapan terbesar berasal dari subsektor perkebunan, diikuti tanaman pangan, peternakan, hortikultura, kombinasi pertanian, dan jasa. Selain itu, untuk mengoptimalkan penyaluran KUR, Kementerian Pertanian menerbitkan Permentan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pelaksanaan KUR Sektor Pertanian¹⁴, untuk meningkatkan kemudahan bagi petani mendapatkan pembiayaan Sistem Resi Gudang (SRG) melalui pinjaman KUR. Selain itu, penguatan kelembagaan petani juga dilakukan melalui fasilitasi kemitraan dan deregulasi kelapa sawit di sejumlah provinsi.

Sejumlah program kerja lain juga telah dilaksanakan untuk mendorong penguatan kelembagaan petani. Pemerintah terus memperkuat implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi petani, serta meningkatkan nilai pembiayaan jaminan resi gudang dan penggunaan SRG untuk beras maupun komoditas lainnya. Penerbitan resi gudang untuk komoditas gabah, beras, jagung, kedelai, bawang merah, ayam karkas beku, ikan dan gula mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, penerbitan nilai resi gudang mencapai Rp797 miliar dan meningkat menjadi sebesar Rp1,03 triliun pada 2024. Peningkatan tersebut didorong oleh penambahan gudang dan penambahan pengelola gudang SRG, serta peningkatan plafon pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang dari Rp75 juta per-debitur/tahun menjadi Rp500 juta per-debitur/tahun. Hingga 2024, Pemerintah memiliki 54 gudang yang aktif menerbitkan resi gudang dengan 118 pengelola gudang yang telah memiliki izin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu, integrasi SRG dengan Pasar Lelang Komoditas (PLK) juga diperkuat, sehingga transaksi PLK pada 2024 mencapai Rp813,7 miliar, meningkat dari 2023 yang sebesar Rp66,01 miliar.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha pertanian, Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan fasilitasi perlindungan dari risiko usaha bagi petani dan peternak. Program asuransi pertanian dan peternakan bertujuan untuk melindungi petani dan peternak dari risiko kerugian akibat bencana alam, serangan hama, dan penyakit. Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi premi sebesar 80% untuk kedua skema perlindungan pertanian yaitu Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K). Pada tahun 2023, AUTS/K telah melindungi 2.487 ekor sapi dan kerbau di seluruh Indonesia. Sementara itu, cakupan kepersertaan AUTP mencapai 278,83 ribu ha pada 2024, dengan jumlah peserta 480.000 petani. Wilayah dengan realisasi tertinggi untuk AUTP antara lain Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Untuk lebih mengoptimalkan program AUTP dan AUTS/K Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian dalam rangka meningkatkan kemudahan akses petani dan peternak terhadap program asuransi pertanian, termasuk kemudahan pendaftaran dan penguatan sosialisasinya.

¹⁴ Permentan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pelaksanaan KUR Sektor Pertanian yang merupakan turunan dari Permenko Nomor 15 Tahun 2020 dan Permenko Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Pemenuhan pasokan pangan impor yang tepat jumlah dan tepat waktu masih menghadapi sejumlah kendala.

Pemenuhan pasokan pangan domestik masih memerlukan dukungan pasokan dari impor seiring dengan keterbatasan pasokan domestik, seperti pada komoditas beras, bawang putih, daging sapi, daging kerbau, gula dan garam. Keterlambatan dalam mengantisipasi penurunan dukungan pasokan dalam negeri komoditas tersebut melalui pengadaan luar negeri mengakibatkan kenaikan harga pangan domestik. Peningkatan harga beras sepanjang 2022 hingga awal 2024 dan harga bawang putih pada awal 2022 hingga 2023 disebabkan oleh keterlambatan realisasi impor untuk mendukung kesinambungan pasokan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi mekanisme penetapan kuota dan perizinan impor pangan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas, serta memperkuat pemantauan realisasi impor oleh pelaku usaha dan diversifikasi negara asal impor.

2.2.3 Kelancaran Distribusi

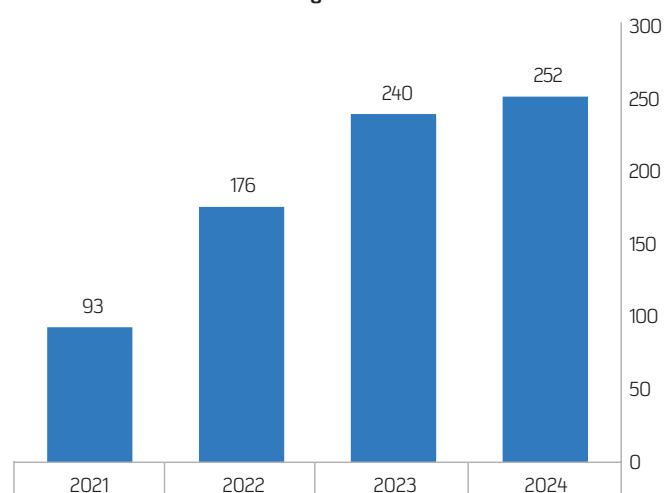
Untuk memastikan pemenuhan komoditas bahan pokok serta mengurangi disparitas pasokan antar wilayah, Pemerintah berupaya mengoptimalkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Penandatanganan perjanjian KAD terus menunjukkan peningkatan sepanjang 2022 hingga 2024 dengan capaian penandatanganan perjanjian KAD sejumlah 251 perjanjian pada 2024, meningkat dari tahun 2023 sejumlah 240 MoU KAD. Perluasan KAD terus dioptimalkan untuk mendukung pemenuhan pasokan komoditas pangan, serta mengurangi disparitas pasokan antarwilayah. Metode pendekatan bisnis ke bisnis (B2B) masih menjadi skema utama dalam implementasi perjanjian KAD. Penguatan KAD juga ditempuh melalui replikasi model bisnis, serta implementasi teknologi dan digitalisasi seperti *contract farming* dan *digital farming*. Implementasi KAD pada 2024 difokuskan untuk mendukung upaya stabilisasi pasokan pada komoditas pangan strategis, khususnya beras, cabai rawit dan cabai merah. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam memperkuat KAD antara lain peran BUMD yang masih terbatas, pasokan KAD sebagian besar masih berasal dari Jawa dan komitmen antardaerah dalam penyediaan pasokan dan realisasi KAD secara berkelanjutan.

Program kerja Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dilakukan dalam rangka mengurangi disparitas pasokan antardaerah.

FDP merupakan upaya fasilitasi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, untuk mendorong distribusi pangan yang lebih merata, terutama dari daerah surplus produksi

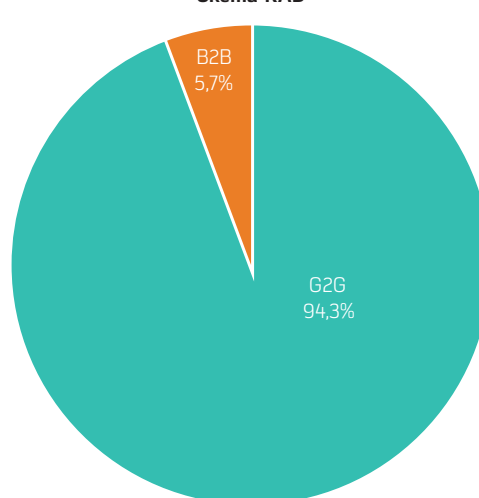
pangan ke daerah defisit. Pelaksanaan FDP dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan biaya distribusi, meliputi biaya transportasi (termasuk bongkar dan muat) dan/atau kemasan/*packing* (termasuk sortasi dan biaya pengemasan). Secara operasional, program ini diberikan kepada produsen dan/atau penyedia jasa distribusi yang bermitra dengan Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Sejumlah komoditas pangan yang menjadi obyek program FDP. Realisasi tersebut mencakup distribusi dari wilayah surplus ke wilayah defisit dengan total volume sejumlah 2.635 ton yang mencakup komoditas jagung sejumlah 1.176 ton, kedelai 645,7 ton, beras 197 ton, minyak goreng 175 ton, bawang merah 160,6 ton, gula 94,5 ton, telur ayam ras 83,9 ton, terigu 49,8 ton, daging ayam ras 30 ton, cabai merah keriting 16,8 ton, cabai merah rawit 5,3 ton, dan bawang putih 2,1 ton.

Perkembangan Jumlah KAD



Sumber: Bank Indonesia

Skema KAD



Sumber: Bank Indonesia

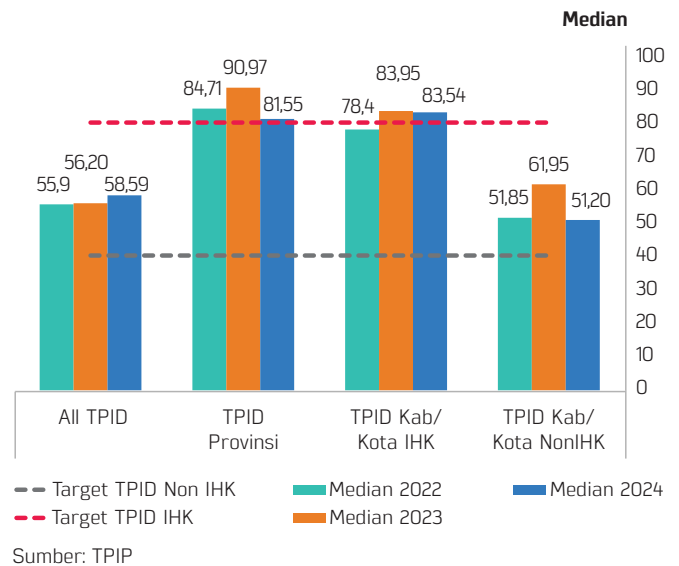
Grafik 2.12. Perkembangan Jumlah Kerja sama Antar Daerah dan Skema KAD

2.2.4 Komunikasi Efektif (K4)

Komunikasi yang efektif dalam pengendalian inflasi terus diupayakan melalui penguatan strategi komunikasi kebijakan, ketersediaan data pangan strategis, dan pemantauan anggaran pengendalian inflasi. Strategi Komunikasi kebijakan yang tepat memiliki peran penting dalam menjaga ekspektasi inflasi masyarakat, terutama di tengah dinamika ketidakpastian yang berlangsung di lingkup eksternal maupun domestik. Diseminasi informasi tentang kebijakan pengendalian inflasi disampaikan secara transparan melalui berbagai kanal yang dilengkapi fakta relevan untuk membantu pasar memahami kebijakan pemerintah, sehingga kepercayaan publik dapat terjaga dan mampu meredam dampak tekanan inflasi.

Penyediaan data pangan strategis yang berkualitas dan terkini terus diperkuat untuk mendukung perumusan kebijakan pangan. Sejumlah Kementerian/Lembaga secara konsisten telah menyediakan data perkembangan harga pangan strategis baik di tingkat produsen maupun konsumen yang dapat diakses kapan saja melalui *website* maupun aplikasi. Badan Pangan Nasional mengelola *website* dan aplikasi Panel Harga Pangan yang menyediakan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen yang melibatkan perolehan data dari 35 provinsi dan 454 Kabupaten/Kota. Selain itu, Badan Pangan Nasional juga telah menginisiasi penyusunan neraca pangan daerah sejak tahun 2023. Pemantauan harga mencakup antara lain gabah, beras, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula pasir serta minyak goreng. Panel harga pangan ini berfungsi sebagai indikator sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk mendeteksi gejala harga dan sinyal kebutuhan stabilisasi harga maupun pasokan.

Penyediaan sistem informasi data pangan juga dilengkapi dengan penyediaan data harga melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional dan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP). Data harga pangan PIHPS dikembangkan oleh Bank Indonesia sejak 2012, menyediakan data harga harian pangan di tingkat konsumen dan pedagang besar di seluruh wilayah. Upaya peningkatan korelasi antara data harga PIHPS dengan Badan Pusat Statistik telah berjalan dengan baik melalui peningkatan kualitas perolehan data sehingga mampu menjadi salah satu referensi indikator inflasi komoditas pangan strategis. Korelasi PIHPS dengan realisasi inflasi sebesar 0,84 pada 2024. Sementara itu, data harga komoditas strategis SP2KP dikelola oleh Kementerian Perdagangan mencakup



Grafik 2.13. Perkembangan Keandalan TPID 2022-2024

data harga 26 barang pokok dan penting yang diperoleh berdasarkan survei di 512 kabupaten/kota. Bersama dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian Perdagangan mengolah data SP2KP menjadi Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang digunakan sebagai *proxy* inflasi tingkat kabupaten/kota.

Penguatan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi antara pusat dan daerah terus dilakukan antara lain melalui pembinaan kapasitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Program kerja ini merupakan upaya bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia untuk mendorong keandalan TPID dalam pencapaian target inflasi daerah melalui berbagai upaya dan inovasi strategi pengendalian inflasi daerah. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 tahun 2017 Pasal 19 bahwa evaluasi kinerja TPID dilakukan dalam rangka mengukur efektivitas koordinasi pengendalian inflasi daerah dan memberikan apresiasi atas peran aktif TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota untuk mendukung pencapaian inflasi nasional. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi maupun *capacity building* dilakukan secara rutin mendorong peningkatan jumlah partisipasi dalam evaluasi kinerja TPID 2023 (*Awards 2024*) hingga mencapai 92,5%. Pada tahun 2024, tingkat keandalan TPID IHK sebesar 86, berada di atas rentang target median. Namun demikian, tingkat keandalan TPID non IHK yang sebesar 58,20 masih perlu menjadi perhatian.

2.3 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)

Gap analysis dan identifikasi *lessons learned* dari program kerja pengendalian inflasi 2019-2021 dalam kerangka 4K

dilakukan untuk memastikan keberlangsungan program kerja yang dinilai strategis dan memiliki capaian yang baik, sekaligus untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi dalam upaya optimalisasi program kerja pengendalian inflasi ke depan.

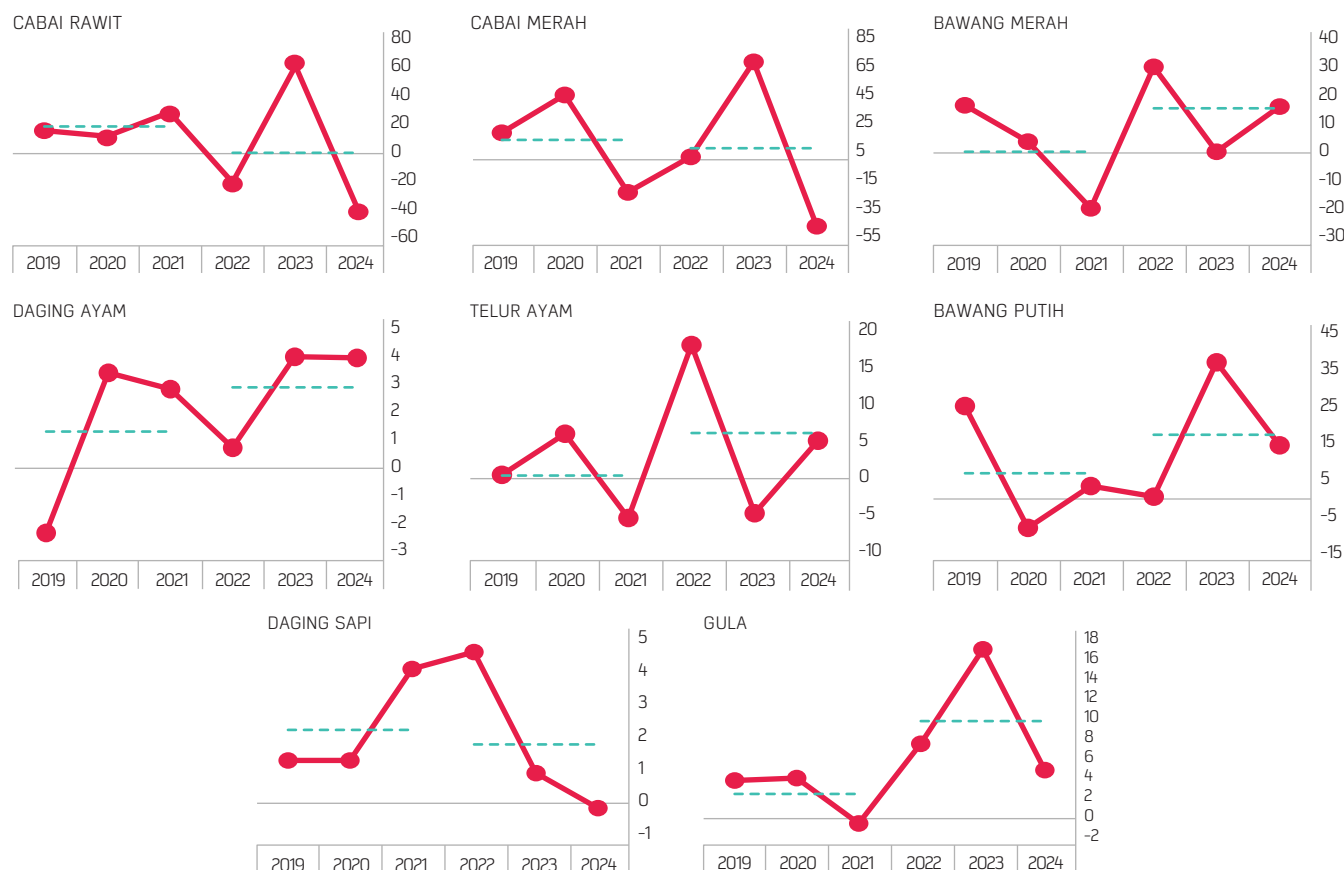
2.3.1 Keterjangkauan Harga (K1)

Keberhasilan dalam menjaga keterjangkauan harga tercermin dari inflasi yang terjaga stabil, terutama untuk komoditas pangan strategis. Stabilitas harga barang impor terjaga seiring dengan upaya konsisten dalam mengendalikan volatilitas nilai tukar. Selain itu, tekanan permintaan tetap terkendali tercermin dari *output gap* yang menyempit secara gradual.

Analisis kesenjangan menunjukkan bahwa inflasi tetap terjaga, meski mengalami kenaikan pada 2022 akibat disrupsi pasokan global dan penyesuaian harga energi domestik. Inflasi IHK dan komponennya mengalami kenaikan signifikan pada 2022 akibat ketidakpastian global yang tinggi sehingga mendorong kenaikan harga komoditas impor, fluktuasi nilai tukar, dan *supply shock* global. Selain itu, penurunan produktivitas pangan, inefisiensi rantai distribusi pangan domestik, terbatasnya implementasi teknologi pertanian, serta subsidi energi yang besar dan belum

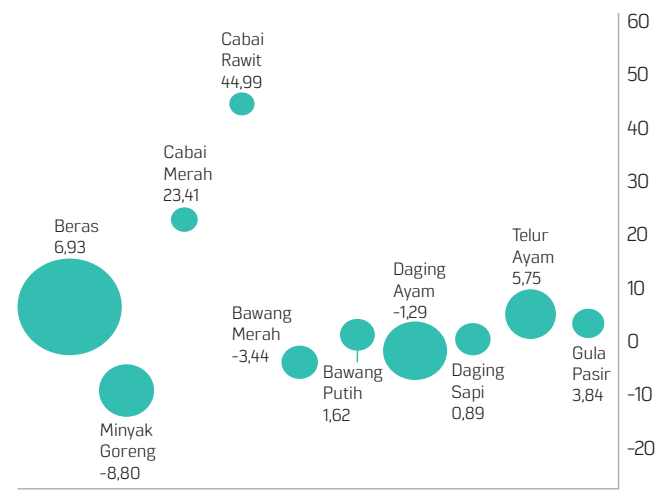
sepenuhnya tepat sasaran turut meningkatkan tekanan inflasi domestik. Namun demikian, inflasi kembali melandai dan semakin rendah pada 2023 dan 2024 sejalan dengan berbagai upaya intervensi dan kebijakan stabilisasi harga dan pasokan jangka pendek, serta implementasi kebijakan fiskal maupun moneter yang turut mendukung penurunan harga. Kebijakan jangka pendek tersebut juga didukung oleh berlanjutnya implementasi kebijakan struktural perekonomian antara lain terkait peningkatan kualitas infrastruktur. Ke depan, pertumbuhan ekonomi domestik perlu terus optimalkan di tengah kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian. Dukungan kebijakan diperlukan untuk menjaga keseimbangan eksternal perekonomian, menjangkar ekspektasi inflasi, melanjutkan perbaikan struktural ekonomi, mengatasi tantangan struktural produksi dan distribusi pangan nasional. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat menurunkan volatilitas inflasi pangan, serta mendukung keberlanjutan transformasi subsidi dan transisi energi.

Lessons learned kebijakan stabilisasi harga pangan menunjukkan pentingnya memastikan keberlanjutan dan efektivitas implementasi program kerja di lapangan untuk terus menjaga kestabilan harga. Evaluasi program kerja pada 2022-2024 menunjukkan bahwa upaya pengendalian



Sumber: PIHPS, diolah

Grafik 2.14. Perkembangan Harga Tahunan Komoditas Pangan Utama

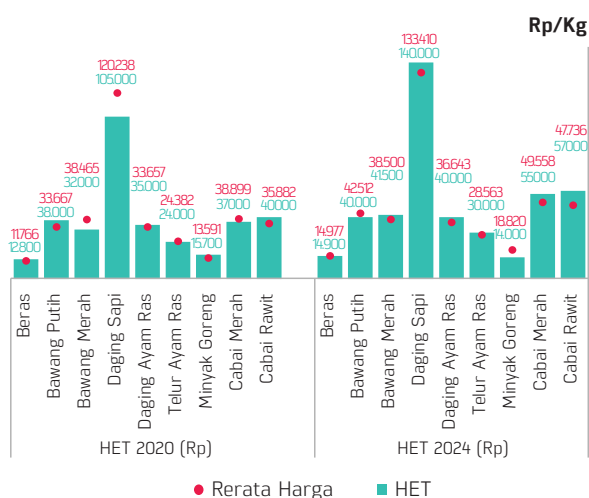


Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.15. Selisih Standar Deviasi dan Bobot Komoditas Pangan Strategis

inflasi melalui pengawasan harga dan stok komoditas pangan strategis, optimalisasi kegiatan Operasi Pasar/ Gerakan Pasar Murah/Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, evaluasi harga acuan/eceran pangan, koordinasi kebijakan harga energi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah, serta upaya menjaga keseimbangan internal perekonomian berhasil menurunkan inflasi IHK ke dalam kisaran sasaran inflasi setelah mengalami kenaikan pada 2022. Ke depan, program kerja yang efektif dalam mendukung pengendalian harga tersebut perlu terus diperkuat dan dijaga kesinambungannya.

Upaya menjaga kestabilan harga menghadapi tantangan dari peningkatan ketidakpastian global dan kesinambungan produksi pangan domestik. Volatilitas nilai tukar dan kenaikan harga komoditas global turut berkontribusi pada inflasi



Ket: Rerata Harga Periode Januari-Desember

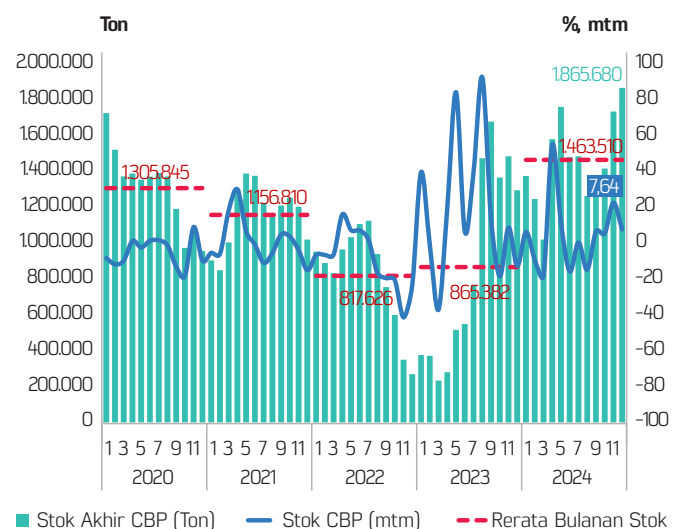
Sumber: Bapanas, PIHPS, diolah

Grafik 2.16. Perbandingan HET dan Harga Jual

domestik, baik inflasi inti, *volatile food*, maupun *administered prices*. Tekanan eksternal tersebut mendorong selisih harga jual energi dengan harga keekonomiannya yang lebar akibat kebijakan Pemerintah untuk menahan penyesuaian harga energi dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, kesinambungan produksi pangan domestik juga dihadapkan pada tantangan stagnasi produktivitas, alih fungsi lahan pertanian, penggunaan teknologi pertanian yang masih terbatas, dampak perubahan iklim, dan fluktuasi harga pangan global. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah bersama Bank Indonesia perlu terus berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menjaga keseimbangan internal dan eksternal perekonomian untuk terus menjaga stabilisasi harga.

2.3.2 Ketersediaan Pasokan (K2)

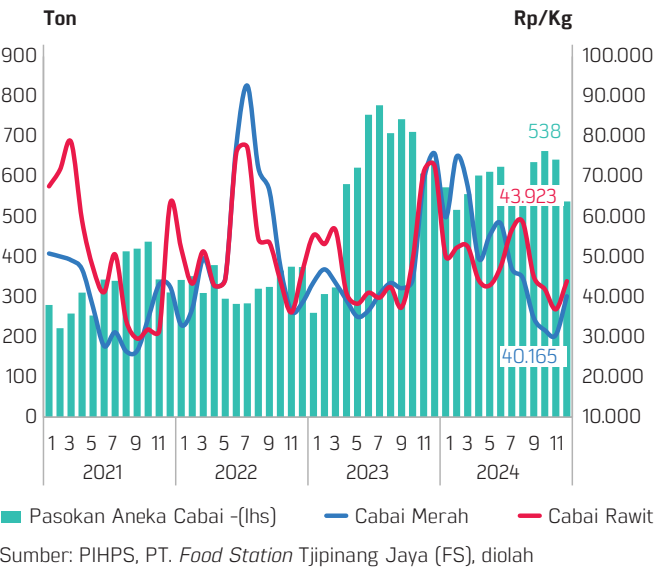
Upaya menjaga ketersediaan pasokan dapat dilihat antara lain dari tingkat produksi dan pasokan pangan domestik, serta penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Data BPS menunjukkan produksi beras menurun dalam tiga tahun terakhir akibat dampak fenomena cuaca La Nina dan El Nino yang menyebabkan penurunan produksi beras secara global. Selain itu, penguatan CPP, terutama berupa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum BULOG, berdasarkan data per Desember 2024 telah kembali berada pada level yang memadai pada level 1-1,5 juta ton yaitu sebesar 1,9 juta ton. Tingkat CBP ini jauh lebih baik dari posisi akhir tahun 2022 yang hanya sebesar 270 ribu ton. Perkembangan pasokan pangan domestik dan cadangan pangan ini mendukung terjaganya kembali inflasi *volatile food*.



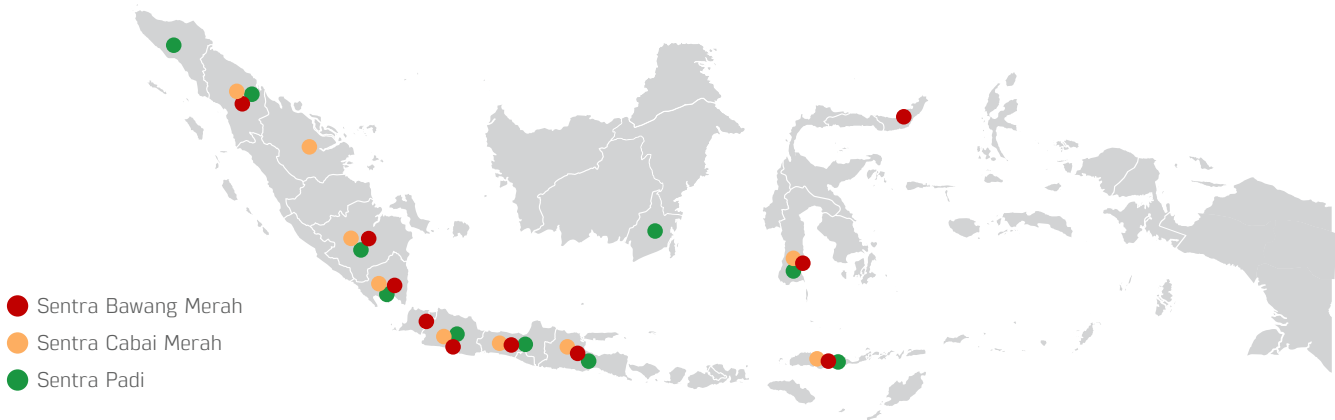
Sumber: Perum BULOG, diolah

Grafik 2.17. Perkembangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

Upaya menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis masih dihadapkan pada tantangan kesinambungan pasokan antarwaktu dan antarwilayah. Inflasi beberapa komoditas pangan strategis pada 2022-2024 menunjukkan peningkatan volatilitas jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan volatilitas tersebut antara lain terjadi pada komoditas beras, cabai merah dan bawang merah. Peningkatan volatilitas inflasi beras akibat kesinambungan pasokan antarwaktu yang terganggu seiring dengan gangguan produksi akibat dampak El Nino dan *shock* pasokan beras global. Sementara itu, inflasi komoditas cabai merah dan bawang merah menunjukkan kenaikan volatilitas seiring dengan meningkatnya kondisi cuaca ekstrem yang berdampak pada produktivitas tanaman dan perilaku tanam petani yang bergantung pada dinamika harga di pasar. Selain itu, sentra produksi pangan yang terpusat di Jawa mengakibatkan disparitas pasokan maupun harga yang cukup tinggi antarwilayah.



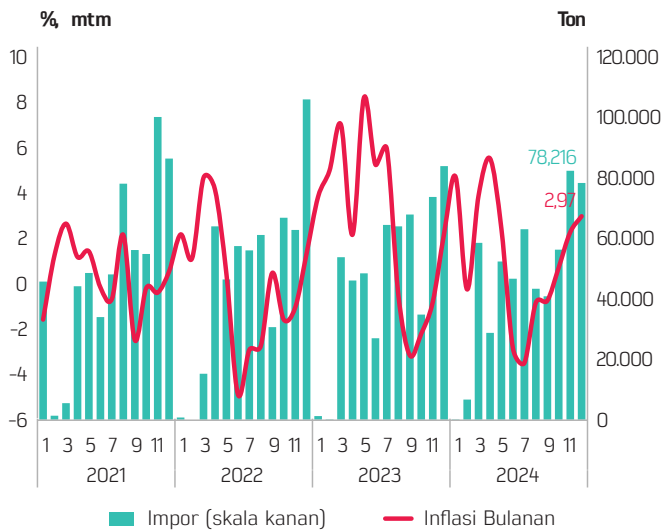
Grafik 2.18. Pasokan dan Harga dan Pasokan Aneka Cabai



Gambar 2.1. Sebaran Sentra Produksi Pangan Tahun 2023

Lessons learned sepanjang 2022-2024 terkait upaya menjaga ketersediaan pasokan menunjukkan bahwa penguatan produksi pangan domestik dan peningkatan efektivitas dukungan pasokan impor perlu terus dilakukan secara berdampingan. Peningkatan produksi dan kesinambungan produksi pangan domestik, baik melalui perluasan kawasan produksi maupun perbaikan produktivitas, perlu terus diupayakan. Hal tersebut dilakukan antara lain melalui penguatan kemampuan dan teknologi budidaya, fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian, dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pertanian. Selain itu, dukungan pasokan impor dengan volume dan waktu impor yang tepat diperlukan untuk mendukung kesinambungan pasokan antarwaktu serta menjaga tingkat cadangan pangan pemerintah, khususnya untuk komoditas pangan yang tidak sepenuhnya dapat diproduksi di dalam negeri. Ketersediaan cadangan pangan yang memadai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan ekspektasi ketersediaan pangan.

Dukungan sarana dan prasarana pertanian, serta peningkatan kemampuan budidaya perlu didukung pula oleh pengelolaan pasca panen dan impor pangan yang lebih baik. Fasilitasi sarana dan prasarana pertanian oleh Pemerintah menunjukkan kenaikan seiring dengan peningkatan dukungan anggaran ketahanan pangan antaran lain berupa penyediaan pupuk subsidi, benih unggul, infrastruktur pengairan, sarana pengelolaan dan penyimpanan pasca panen. Namun demikian, peningkatan kualitas budidaya dan adopsi teknologi pertanian oleh petani masih relatif rendah akibat keterbatasan pendidikan SDM pertanian, luas lahan, serta akses terhadap penyuluhan pertanian dan teknologi. Selain itu, kualitas pengelolaan dan penyimpanan pasca panen masih terbatas, sehingga



Sumber: BPS, Kemendag, DSta, Bapanas, diolah

Grafik 2.19. Perkembangan Impor dan Inflasi Bawang Putih

mempengaruhi produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Lebih lanjut, *gap analysis* terkait impor menunjukkan bahwa efisiensi mekanisme importasi masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan belum optimalnya waktu dan volume realisasi impor pangan sebagaimana tercermin dari dinamika inflasi bawang putih dan daging sapi.

Peningkatan kelembagaan dan kapasitas pembiayaan petani terus diupayakan untuk mendukung penguatan kualitas usaha pertanian. Pembiayaan pertanian tercatat meningkat signifikan sepanjang 2022–2024 baik melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas (PLK). Penyaluran KUR pada periode 2022 hingga 2024 masing-masing mencapai 126%, 81% dan 91% dari target dengan jumlah debitur yang meningkat¹⁵. Sementara itu, transaksi SRG dan PLK komoditas pangan juga terus meningkat dengan capaian pertumbuhan tahunan pada 2024 masing-masing sebesar 30% dan 1133%¹⁶. Penguatan dan perluasan pembiayaan pertanian tidak lepas dari keberadaan kelembagaan petani yang kuat, untuk itu penguatan kelembagaan petani seperti korporatisasi pertanian perlu terus dikembangkan.

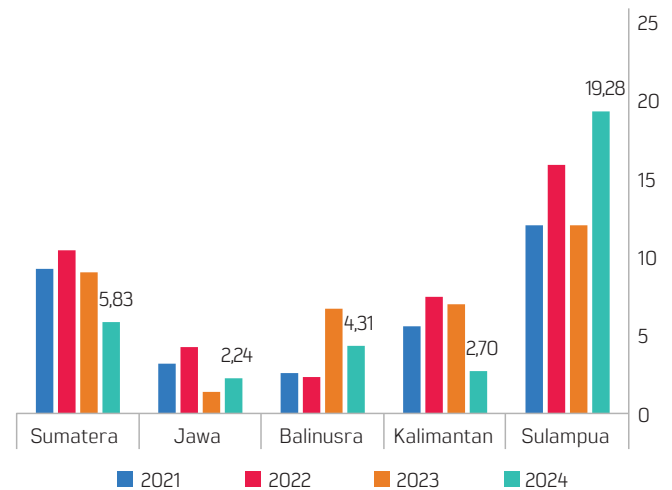
¹⁵ Target Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian sebesar Rp 133,43 triliun pada 2022, Rp 100 triliun pada 2023 dan 2024.

¹⁶ Komoditas SRG mencakup gabah, beras, jagung kedelai, bawang merah, ayam karkas beku, ikan dan gula. Komoditas PLK terutama mencakup karet dan teh.

2.3.3 Kelancaran Distribusi (K3)

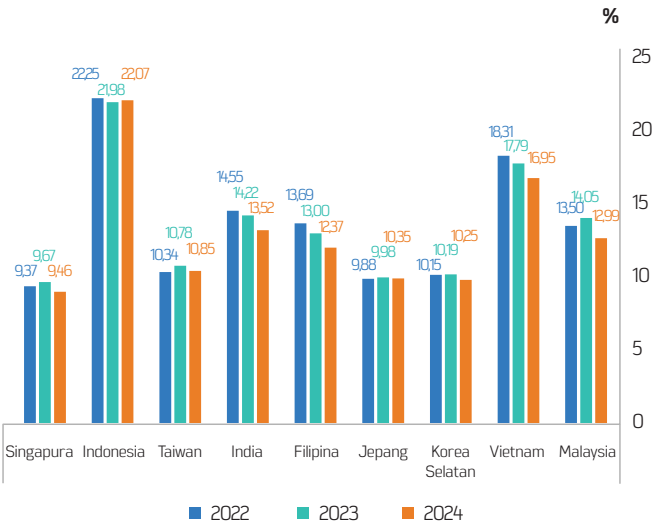
Berbagai upaya penguatan KAD, fasilitasi distribusi dan optimalisasi infrastruktur konektivitas antarwilayah dapat meningkatkan kelancaran distribusi untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah, serta menurunkan disparitas harga antardaerah. Namun demikian, disparitas inflasi spasial terpantau masih tinggi, terutama di wilayah Sulampua. Pada 2024–2025, disparitas inflasi VF meningkat seiring dengan tingginya inflasi VF di Sulampua, yaitu sebesar 21,19%.

Disparitas inflasi spasial tersebut juga disumbang oleh rantai distribusi domestik yang belum efisien, sehingga mengakibatkan biaya logistik yang tinggi. Berdasarkan data yang bersumber dari *International Monetary Fund* (IMF) 2024, biaya logistik Indonesia mencapai 22,07% dari PDB. Biaya tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan negara kawasan yakni Singapura, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan integrasi konektivitas, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas logistik perintis yang inisiasi oleh Pemerintah memiliki peran penting mendukung upaya peningkatan efisiensi logistik nasional. Infrastruktur konektivitas dan logistik yang terintegrasi dan efisien diharapkan mampu menekan biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan meningkatkan kerja sama perdagangan antardaerah.



Sumber: BPS

Grafik 2.20. Disparitas Inflasi VF Tahunan 2022–2024



Sumber: Statista, IMF

Grafik 2.21. Biaya Logistik per PDB

Lessons learned dari upaya menjaga kelancaran distribusi menunjukkan bahwa diperlukan optimalisasi infrastruktur konektivitas dan penguatan efisiensi rantai distribusi, terutama bahan pangan. Kondisi disparitas pasokan dan harga antardaerah masih belum sepenuhnya dapat diatasi, sehingga perbaikan distribusi antardaerah perlu terus diupayakan. Berbagai upaya peningkatan infrastruktur telah menjadi fokus pembangunan Pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir, namun demikian optimalisasi pemanfaatan infrastruktur konektivitas masih perlu terus didorong untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan perdagangan domestik. Program kerja untuk mendukung kelancaran distribusi antara lain kerja sama dan fasilitasi distribusi antardaerah perlu diteruskan dan didukung pula dengan keberlanjutan upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antarwilayah, termasuk ke daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan). Penguatan konektivitas dan distribusi perdagangan domestik juga akan mampu mendukung penguatan peran digitalisasi dalam meminimalisasi disparitas pasokan dan harga antardaerah.

2.3.4 Komunikasi Efektif (K4)

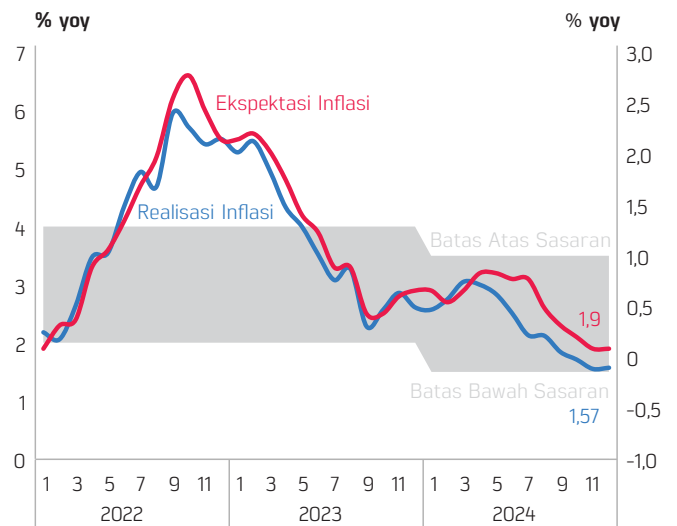
Berbagai program kerja komunikasi efektif telah berjalan dengan baik antara lain dalam bentuk menjaga ekspektasi inflasi, peningkatan kualitas dan ketersediaan data pangan, serta penguatan keandalan TPID. Program kerja tersebut ditujukan untuk (i) mengendalikan ekspektasi inflasi dalam kisaran sasaran didukung komunikasi kebijakan yang efektif; (ii) menjaga korelasi kuat antara data harga pangan hasil survei dengan inflasi BPS agar dapat dimanfaatkan sebagai indikator dini pergerakan harga dan pasokan¹⁷; serta (ii) meningkatkan keandalan TPID dalam menjaga stabilitas inflasi daerah melalui berbagai inovasi strategi.

Ekspektasi inflasi terjangkau dalam kisaran sasaran. Hal ini didukung oleh penguatan sinergi dan koordinasi pengendalian inflasi antara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, serta Bank Indonesia dan *stakeholders* lainnya. Komunikasi kebijakan dilakukan secara berkala dan efektif untuk memastikan masyarakat menerima informasi yang tepat mengenai kebijakan pengendalian inflasi yang ditempuh. Selain itu, upaya menjaga komunikasi yang efektif juga didukung oleh ketersediaan data inflasi dan data pangan yang terus mengalami ditingkatkan kualitasnya dan dapat diakses oleh publik. Untuk itu, pengembangan data pangan yang mencakup data harga, produksi dan pasokan yang terintegrasi perlu terus dilanjutkan untuk mendukung perumusan kebijakan.

Sinergi pengendalian inflasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah semakin diperkuat melalui harmonisasi program kerja dengan implementasi *tagging* anggaran pengendalian inflasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Implementasi *tagging* anggaran pengendalian inflasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa program yang berkontribusi pada pengendalian inflasi dapat diidentifikasi, direncanakan, dan dianggarkan secara sistematis dalam

17 Korelasi antara data harga pangan dalam PIHPS dan data inflasi BPS dijaga agar minimal mencapai 0,8

dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 3/Juklak/SESMEN/03/2021. Harmonisasi program kerja dalam perencanaan maupun realisasi program kerja pengendalian inflasi tersebut mengacu pada peta jalan pengendalian inflasi TPIP-TPID. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa upaya pengendalian inflasi dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan efektivitas intervensi kebijakan di tingkat lokal. Sementara itu, tingkat keandalan TPID dalam menjaga stabilitas inflasi daerah secara umum mengalami peningkatan. Namun demikian, penguatan kapasitas TPID masih perlu menjadi perhatian, terutama bagi TPID di Kabupaten/Kota non IHK dan yang terletak pada area *remote*. Penguatan kapasitas mencakup kemampuan mengidentifikasi sumber tekanan inflasi, pemanfaatan data statistik daerah dan anggaran Pemerintah Daerah, serta langkah perumusan strategi pengendalian inflasi.



Sumber: BPS, *Consensus Economics* (survei terakhir pada bulan terkait)

Grafik 2.22. Ekspektasi Inflasi dan Realisasi

BAB 3

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI 2025-2027





PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI 2025-2027

INFLASI IHK TERJAGA RENDAH DAN STABIL

INFLASI INTI



- Ketidakpastian ekonomi global mengakibatkan peningkatan volatilitas harga komoditas global dan nilai tukar yang dapat tertransmisi pada inflasi bahan baku produksi (*cost-push inflation*)
- Perbaikan permintaan domestik yang meningkat secara gradual (*demand pull inflation*)
Dampak transmisi dari inflasi *Volatile Food* dan *Administered Price*
- Sinergi dan implementasi bauran kebijakan ekonomi nasional yang ditempuh secara konsisten dan terukur untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional
- Strategi komunikasi kebijakan untuk menjangkar ekspektasi inflasi yang konsisten

INFLASI VOLATILE FOOD



- Pasokan komoditas pangan terjaga didukung kondisi cuaca yang lebih kondusif
- Tantangan struktural berupa disparitas harga dan pasokan pangan antarwaktu dan antardaerah yang belum teratasi sepenuhnya, termasuk distribusi pangan ke wilayah 3T
- Transmisi perkembangan harga pangan global kepada harga domestik
- Optimalisasi dan efektivitas upaya menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan
- Peningkatan kebutuhan pangan akibat implementasi akseleratif program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Dampak perubahan iklim yang dapat mengganggu aktivitas produksi dan distribusi pangan

INFLASI ADMINISTERED PRICES



- Peningkatan harga komoditas global, terutama komoditas energi, dan tekanan nilai tukar
- Keberlanjutan program transformasi subsidi energi dengan penajaman target penerima subsidi dan perubahan skema penyaluran subsidi
- Penyesuaian tarif seiring dengan perbaikan permintaan dan mobilitas masyarakat
- Penyesuaian tarif daerah dan tarif lainnya yang diatur Pemerintah, termasuk perpajakan
- Kebijakan fiskal Pemerintah sebagai *shock absorber*

SASARAN INFLASI

KONDISI YANG DIHARAPKAN



2025

2,5%±1%

2026

2,5%±1%

2027

2,5%±1%

INTI

- Ekspektasi inflasi terjaga di tengah potensi kenaikan inflasi dari sisi penawaran dan permintaan

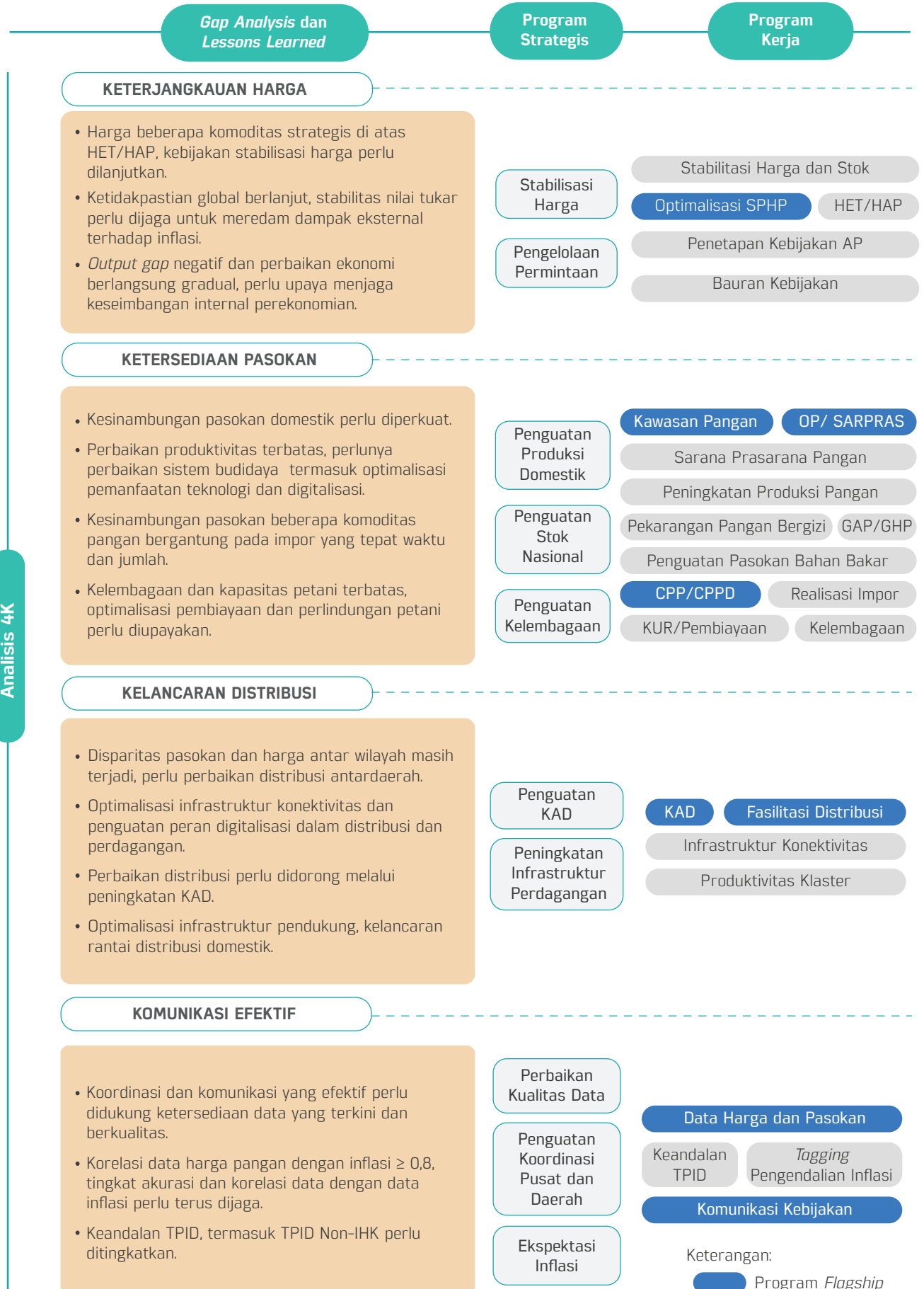
VF

- Perbaikan tantangan struktural VF melalui strategi 4K
- Penurunan volatilitas dan disparitas inflasi untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi

AP

- Penerapan transformasi subsidi energi dengan mempertimbangkan *magnitude*, *timing*, dan *sequencing* dampaknya terhadap inflasi
- Penyesuaian kebijakan tarif pemerintah lainnya dengan mempertimbangkan pencapaian target sasaran inflasi

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI 2025–2027



PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI 2025-2027

Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 disusun sebagai panduan dan rekomendasi pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka pencapaian sasaran inflasi tahun 2025-2027.

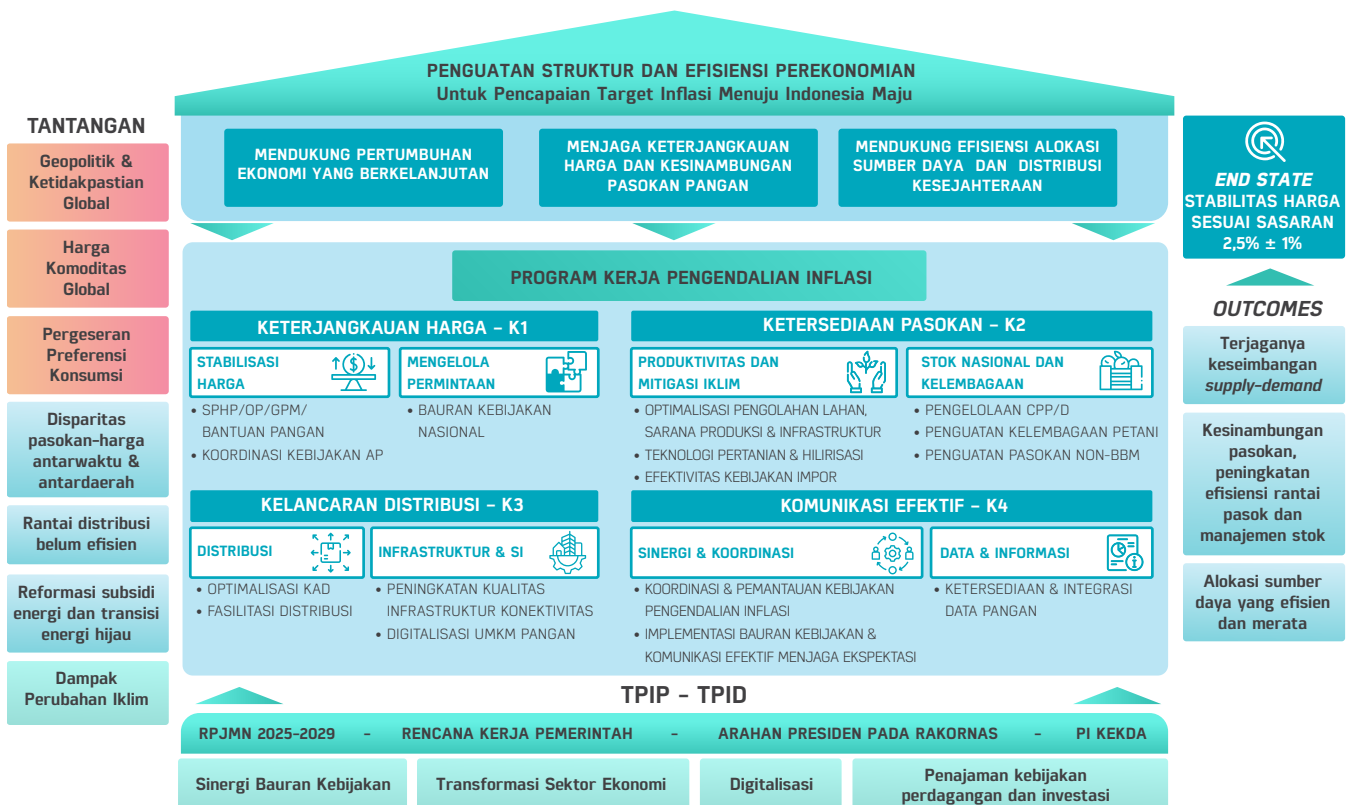
Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyepakati sasaran inflasi tahun 2025, 2026, dan 2027 masing-masing sebesar 2,5% dengan deviasi $\pm 1\%$, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2024. Sasaran inflasi dimaksud ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu (i) tingkat inflasi yang optimal untuk mendukung lintasan pertumbuhan ekonomi menuju negara berpenghasilan tinggi; (ii) level inflasi yang optimal dan kompetitif dengan negara mitra dagang, serta mendukung daya saing perekonomian Indonesia dibandingkan dengan negara *peers*; (iii) level dan kisaran sasaran yang mempertimbangkan volatilitas inflasi VF dan AP; dan (iv) ruang kebijakan moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 menitikberatkan pada berbagai upaya untuk memperkuat struktur dan efisiensi perekonomian dalam rangka mendukung pencapaian target inflasi menuju Indonesia maju. Upaya

pengendalian inflasi bertumpu pada penguatan ketersediaan pasokan dan penguatan kelancaran distribusi agar dapat menjamin kesinambungan pasokan antarwaktu dan antardaerah. Upaya tersebut juga tetap disertai dengan penguatan efektivitas pengendalian inflasi jangka pendek dari aspek keterjangkauan harga melalui berbagai intervensi stabilisasi harga. Selain itu, upaya untuk memperkuat sinergi dan koordinasi serta ketersediaan data pangan yang *reliable* juga terus diperkuat sebagai bagian dari komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat.

3.1 Arah Kebijakan

Tekanan inflasi berpotensi meningkat pada jangka menengah sejalan dengan agenda untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjangkau dalam kisaran sasaran. Dari sisi eksternal, perekonomian global diliputi oleh ketidakpastian global yang masih tinggi, sehingga mengakibatkan terjadinya divergensi pemulihan ekonomi antara *Emerging Markets* (EM) dengan *Advanced Economies* (AE) yang kemudian berlanjut dengan peningkatan fragmentasi ekonomi dan perdagangan dunia. Perkembangan tersebut dapat mengakibatkan tekanan harga komoditas global maupun stabilitas nilai tukar. Selain itu, terdapat pula potensi peningkatan inflasi global sebagai dampak dari perubahan iklim global dan kebijakan proteksionisme perdagangan pangan.



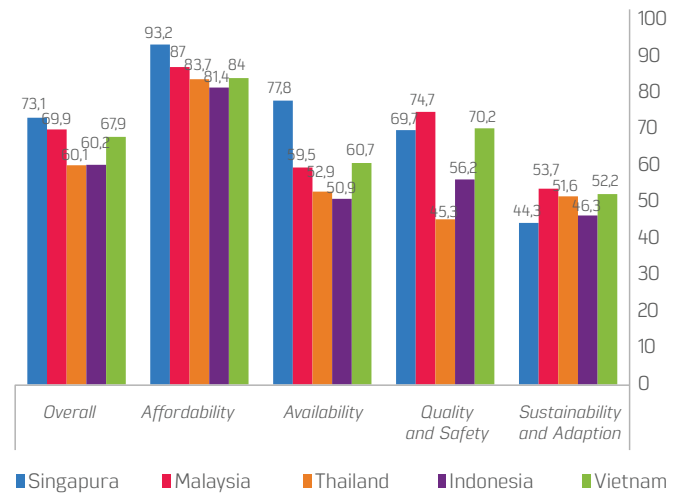
Gambar 3.1. Framework Peta Jalan 2025-2027

Dinamika eksternal dan kendala struktural domestik diperkirakan menambah tekanan di sisi domestik.

Kenaikan harga komoditas global yang meningkatkan biaya bahan baku dapat mendorong pelaku usaha dalam negeri untuk mentransmisikan kenaikan harga produksinya kepada konsumen. Selain itu, ketidakpastian global dapat turut meningkatkan tekanan nilai tukar rupiah. Dari sisi domestik, risiko inflasi antara lain berasal dari kenaikan permintaan seiring dengan pemulihan ekonomi, disparitas pasokan antarwaktu, dan rantai distribusi yang belum sepenuhnya efisien. Namun demikian, terdapat peluang dari adanya inisiasi implementasi teknologi pertanian dan upaya penguatan logistik domestik yang terus diupayakan untuk diperluas. Selain itu, *gap* antara harga jual dan harga keekonomian komoditas energi yang masih lebar, serta berlanjutnya transformasi subsidi turut berpotensi meningkatkan tekanan inflasi.

Panduan arah kebijakan pengendalian inflasi ke depan yang terangkum dalam Peta Jalan Inflasi 2025–2027 memiliki peran penting dalam mengorkestrasi upaya pengendalian inflasi. Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025–2027 mengambil tema “Penguatan Struktur dan Efisiensi Perekonomian Untuk Pencapaian Target Inflasi Menuju Indonesia Maju”. Arah pengendalian inflasi pada peta jalan tersebut mengacu pada kerangka 4K, yaitu (i) Keterjangkauan Harga yang berfokus pada upaya stabilisasi harga dan pengelolaan permintaan; (ii) Ketersediaan Pasokan yang berfokus pada upaya menjaga kesinambungan pasokan baik melalui produksi dalam negeri, pasokan dari luar negeri, serta penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan kelembagaan petani; (iii) Kelancaran Distribusi yang berfokus pada penguatan Kerja sama AntarDaerah (KAD) dan infrastruktur konektivitas antarwilayah; serta (iv) Komunikasi Efektif yang berfokus pada penguatan ketersediaan dan kualitas data harga dan pasokan pangan, koordinasi pemerintah pusat-daerah, dan pengelolaan ekspektasi.

Salah satu fokus utama Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025–2027, sejalan dengan arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2024, adalah untuk memperkuat produksi pangan dan meningkatkan efisiensi rantai pasok pangan. Hal ini ditempuh untuk meningkatkan stabilitas perekonomian melalui penguatan ketahanan pangan domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Dinamika inflasi pada periode 2022–2024 menunjukkan bahwa ketahanan pangan Indonesia masih perlu terus diperkuat. Indeks ketahanan pangan Indonesia relatif rendah dibandingkan beberapa negara kawasan sejalan dengan (i) akses pangan yang belum



Grafik 3.1. Indeks Ketahanan Pangan

merata; (ii) ketimpangan distribusi pangan antardaerah; (iii) masih lemahnya adopsi teknologi pangan; dan (iv) tingginya risiko keberlanjutan produksi pangan jangka panjang antara lain terkait dampak perubahan iklim. Di sisi lain, kebutuhan pangan semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan masih tingginya tingkat *food waste* di Indonesia. Namun demikian, berbagai upaya peningkatan kualitas infrastruktur pertanian dan konektivitas yang telah dilakukan, serta perkembangan teknologi pertanian, baik dari sisi budidaya maupun pengolahan, dapat dioptimalkan untuk mendukung penguatan produksi pangan domestik dan integrasi ekosistem sektor pertanian dari sisi hulu hingga hilir.

3.2 Program Kerja

Program kerja pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025–2027 disusun dengan mengacu pada kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Penetapan program kerja berpedoman pada arah kebijakan utama dalam mencapai sasaran inflasi yang mencakup sinergi kebijakan moneter, fiskal dan kebijakan sektoral, hasil *gap analysis* dan *lessons learned* dari implementasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022–2024. Selain itu, penyusunan termasuk memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra) terkait. Program kerja tersebut menjadi acuan pelaksanaan tugas pengendalian inflasi oleh Kementerian/Lembaga terkait sesuai kewenangannya dalam rangka memastikan pencapaian sasaran inflasi 2025–2027.

3.2.1 Keterjangkauan Harga (K1)

Sejumlah program kerja untuk menjaga stabilitas harga dan mengelola permintaan terus dilanjutkan dan diperkuat.

Upaya stabilisasi harga dilakukan baik pada tingkat produsen maupun konsumen, melalui kebijakan penetapan harga pangan strategis yang menyeimbangkan biaya faktor produksi dan margin usaha dengan daya beli masyarakat, kegiatan pengawasan harga dan kecukupan stok secara berkala, serta optimalisasi kegiatan SPHP, operasi pasar dan Gerakan Pasar Murah. Lebih lanjut, stabilitas harga turut menjadi faktor pertimbangan utama dalam penetapan kebijakan komoditas *administered prices* (AP), di tengah tekanan eksternal dan reformasi fiskal, serta upaya dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Sementara itu, upaya mengelola sisi permintaan dilaksanakan untuk menjaga keseimbangan internal perekonomian terutama untuk mengantisipasi tekanan inflasi ke depan.

3.2.1.1 Stabilisasi Harga

1. Penguatan stabilisasi dan pengawasan harga maupun stok bahan pokok, termasuk pada periode HBKN.

Keberhasilan upaya stabilitas harga diukur melalui rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas Harga Acuan pembelian (HAP)/Harga Pembelian Pemerintah (HPP)/Harga Keekonomian. Selain itu, stabilitas harga di tingkat konsumen diukur berdasarkan rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian. Dalam pelaksanaannya, upaya stabilitas harga dan pasokan dilakukan melalui sinergi antara berbagai Kementerian/Lembaga dengan Badan Pangan Nasional sebagai koordinator. Sementara itu, kegiatan pengawasan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di lapangan akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) secara berkala, termasuk saat HBKN. Lebih lanjut, koordinasi stabilisasi dan pengawasan harga maupun pasokan ini dilakukan secara berkala antara TPIP dan TPID dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri.

2. Optimalisasi kegiatan Operasi Pasar (OP)/Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dan/atau komoditas lainnya. Program SPHP akan dilaksanakan sepanjang tahun sesuai dengan kebijakan Badan

Pangan Nasional oleh Perum BULOG. Volume penyaluran SPHP mengacu pada penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perum BULOG yang mencakup komoditas beras, jagung dan kedelai. Penyaluran SPHP beras ditargetkan berada di kisaran 1,3-1,5 juta ton per tahun dengan tetap menjaga tingkat stok beras akhir tahun sekitar 1,5 juta ton. Sementara itu, penyaluran SPHP komoditas selain beras menyesuaikan dengan kebutuhan stabilitas harga dan pasokan jika terjadi kenaikan harga. Selain itu, upaya menjaga keterjangkauan harga juga didukung oleh optimalisasi pelaksanaan OP, antara lain pada periode musiman kenaikan permintaan maupun gangguan pasokan.

3. Evaluasi harga eceran dan acuan komoditas pangan strategis.

Badan Pangan Nasional secara rutin melaksanakan *review* HET dan/atau Harga Acuan Pembelian dan Penjualan komoditas pangan strategis, dengan target setidaknya *review* dilakukan satu kali dalam setahun. Tinjauan ulang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan/atau Harga Acuan Pembelian dan Penjualan komoditas pangan strategis dilakukan berdasarkan perkembangan rata-rata harga di tingkat produsen dan konsumen, serta memperhatikan keseimbangan antara keberlanjutan usaha pertanian (biaya produksi dan margin usaha) dan daya beli masyarakat (keterjangkauan harga).

4. Koordinasi penetapan kebijakan AP antara lain pengaturan harga energi dan tarif angkutan udara.

Kebijakan AP ke depan menjadi sangat krusial mengingat terdapat potensi penyesuaian harga komoditas AP, khususnya energi domestik, seiring dengan upaya reformasi fiskal dan transformasi subsidi oleh pemerintah. Selain itu, ketidakpastian global yang meningkat dan deviasi antara harga jual komoditas energi domestik dengan harga keekonomiannya yang masih lebar turut meningkatkan potensi penyesuaian harga energi domestik ke depan. Sementara itu, terdapat pula potensi penyesuaian ketentuan tarif batas/batas bawah dan potensi penyesuaian tarif daerah yang dapat memengaruhi perkembangan inflasi. Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan beserta K/L terkait lainnya akan berkoordinasi memastikan penerapan kebijakan komoditas AP yang terkoordinasi dengan memerhatikan *magnitude*, *timing*, dan *sequencing* serta memperhatikan seluruh aspek sektoral agar inflasi IHK tetap dalam sasarannya. Koordinasi serupa untuk penetapan penyesuaian tarif akan diperkuat di tingkat daerah dalam rangka menjaga stabilitas inflasi daerah.



3.2.1.2 Pengelolaan Permintaan

5. Upaya menjaga keseimbangan internal perekonomian terus dilakukan di tengah dinamika ekonomi global.

Kebijakan ekonomi domestik ke depan akan berfokus pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah antisipasi tekanan inflasi yang berasal dari dampak rambatan global maupun domestik. Ke depan, kebijakan pengendalian inflasi akan dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain (i) pemulihan ekonomi global di tengah isu geopolitik dan divergensi kebijakan; (ii) pergeseran demografi dan perilaku konsumsi; (iii) gangguan rantai pasok pangan, disparitas pasokan, dan harga antarwaktu dan antardaerah; serta (iv) integrasi data dan komunikasi kebijakan.

Bauran kebijakan ekonomi nasional yang dapat mendukung pertumbuhan sesuai dengan kapasitas perekonomian. Bauran kebijakan akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi, stabilitas sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Koordinasi yang erat antara otoritas moneter dan otoritas fiskal terus dilakukan untuk menghasilkan bauran kebijakan yang efektif, termasuk sinergi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mendorong kredit dan pembiayaan. Sementara itu, kebijakan fiskal difokuskan pada upaya mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat reformasi struktural. Selain itu, bauran kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan ekonomi, digitalisasi, serta hilirisasi dan ketahanan pangan juga terus diperkuat untuk mendukung program Asta Cita Pemerintah.

Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakannya yang berfokus pada stabilitas (*pro-stability*) dan pertumbuhan (*pro-growth*) guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sehingga inflasi terjaga dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah ditempuh dalam rangka memitigasi dampak ketidakpastian global terhadap pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas perekonomian. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dilakukan melalui stabilisasi pasar valuta asing spot, *Domestic Non-Deliverable Forward*, pembelian SBN di pasar sekunder, dan intervensi di pasar *Non-Deliverable Forward*. Implementasi kebijakan stabilisasi nilai tukar tersebut didukung oleh upaya penguatan cadangan devisa yang dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan cadangan devisa dan penguatan kerja sama keuangan internasional antara lain (i) penguatan Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI); (ii) penggunaan mata uang lokal melalui kerja sama *local currency settlement*; dan (iii) memperluas instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Lebih lanjut, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

3.2.2 Ketersediaan Pasokan (K2)

Upaya untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan dilaksanakan melalui berbagai program strategis, antara lain optimalisasi produksi domestik komoditas pangan, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang mencakup beras serta komoditas penting lainnya, serta penguatan mekanisme kebijakan impor guna menutupi kekurangan



produksi pangan strategis di dalam negeri. Di samping itu, penguatan kelembagaan petani di antaranya petani pangan, perkebunan sawit dan petani tebu terus diupayakan guna meningkatkan produktivitas dan mendukung terjaminnya ketersediaan pasokan secara berkelanjutan.

3.2.2.1 Penguatan Produksi Domestik

1. **Pengembangan Kawasan Pangan dan Program Strategis Nasional (PSN) Pangan untuk meningkatkan produksi pertanian.** Sebagai upaya pemenuhan pasokan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi domestik secara berkelanjutan yang salah satunya melalui pengembangan kawasan pangan. Sepanjang tahun 2025–2027, pengembangan luas tanam kawasan pangan padi ditargetkan mencapai sekitar 500–504 ribu Ha per tahun dengan target total produksi beras domestik mencapai 32 juta ton per tahun. Peningkatan pasokan melalui program ini diharapkan mendukung upaya membangun landasan struktural bagi penguatan produksi pangan domestik yang lebih terintegrasi dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian nasional.
2. **Optimalisasi bantuan sarana produksi dan infrastruktur pertanian.** Upaya peningkatan produktivitas pertanian pangan perlu didukung oleh penguatan kualitas dan akses infrastruktur pertanian, serta optimalisasi pemanfaatan sarana produksi. Upaya ini dapat mendukung perbaikan pola budidaya dan pengolahan produk pangan, serta mendukung ketahanan pasokan domestik, Kementerian Pertanian

melanjutkan pemberian bantuan pupuk bersubsidi sejumlah 100 ribu Ha per tahun. Selain itu, Pemerintah melanjutkan fasilitasi alsintan berupa traktor roda empat sebanyak 3.500 unit, traktor roda dua sebanyak 7.000 unit dan pompa air sebanyak 7.000 unit per tahun sebagai upaya mendorong adopsi teknologi pertanian dan meningkatkan efisiensi usaha tani, sehingga mendukung upaya peningkatan produktivitas pertanian. Sementara itu, upaya penguatan kualitas dan akses infrastruktur pertanian juga akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian sepanjang tahun 2025 hingga 2027 antara lain melalui pembangunan 16 unit bendungan, pembangunan jaringan irigasi dengan cakupan wilayah pengairan sebesar 57 ribu ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 454,8 ribu ha. Selain itu, fasilitasi pompa irigasi tetap dilanjutkan untuk mendukung peningkatan Indeks Pertanaman dengan target penyaluran sejumlah 775 unit per tahun. Lebih lanjut, Perum BULOG akan mengoptimalkan realisasi anggaran PMN yang ditujukan untuk mendukung penguatan infrastruktur pangan.

3. **Penguatan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan produk pangan.** Program kerja ini berfokus pada upaya peningkatan jumlah dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana pasca-panen komoditas pangan dalam rangka menekan kehilangan hasil pascapanen dan menjaga kualitas komoditas pangan. Program kerja ini menargetkan fasilitasi sarana pengolahan pasca-panen dan penyimpanan baik *dry storage* maupun *cold storage* sepanjang 2025 hingga 2027.

4. **Peningkatan produksi hasil perkebunan tebu dan kelapa sawit.** Kementerian Pertanian terus mempercepat langkah menuju swasembada gula konsumsi sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel). Untuk itu, Kementerian Pertanian mendorong percepatan swasembada gula melalui peningkatan luas lahan tebu dengan target mencapai 535 ribu Ha secara tahunan pada 2025–2027. Peningkatan luas lahan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi tebu menjadi sebesar 37 juta ton per tahun dan produksi gula sebesar 2,8 juta ton per tahun.

Penguatan produksi kelapa sawit dilakukan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Program kerja ini tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tetapi juga diarahkan untuk mendukung permintaan ekspor. Kementerian Pertanian melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi budidaya kelapa sawit, termasuk melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), peningkatan produktivitas, dan perluasan area perkebunan kelapa sawit. Upaya tersebut dapat mendukung optimalisasi lahan sawit menjadi seluas 16,8 Juta Ha dan perbaikan produktivitas per hektare menjadi sebesar 3,7 ton/Ha agar dapat mendukung peningkatan produksi kelapa sawit menjadi sebesar 47,6 juta ton per tahun.

5. **Peningkatan produksi hasil ternak dan perikanan.** Konsumsi protein hewani domestik cenderung meningkat seiring dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022, rata-rata konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia mencapai 17,74 gram/kapita/hari dengan konsumsi per kapita daging sebesar 4,79 gram/kapita/hari, meningkat dari 4,05 gram/kapita/hari pada Susenas 2020. Untuk itu, sebagai upaya memastikan ketersediaan pangan protein terutama berasal dari komoditas ternak dan perikanan, Kementerian Pertanian menargetkan produksi daging tahunan sepanjang 2025 hingga 2027 sebesar 4,71 juta ton¹⁸. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan turut menargetkan peningkatan jumlah produksi ikan menjadi sebesar 24,58 juta ton per tahun.

Pasokan daging ayam ras dan telur ayam ras terus dijaga melalui upaya memastikan kesinambungan produksi peternakan dan perbaikan produktivitas. Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan produktivitas daging dan telur ayam ras sebesar 1,48% (yoy) per tahun dengan tetap memperhatikan perkembangan konsumsi per kapita per tahun guna menjaga keseimbangan *supply* dan *demand*. Selain itu, penguatan produksi juga dilakukan melalui program pemberian bantuan bibit ayam, pakan, dan kandang kepada peternak rakyat. Produksi daging ayam ras ditargetkan mencapai 4,97 juta ton per tahun, sedangkan produksi telur ayam ras ditargetkan mencapai 6,29 juta ton per tahun.

6. **Pengembangan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) dilakukan untuk mengoptimalkan lahan pekarangan dalam mendukung pemenuhan pangan keluarga.** Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) merupakan program unggulan Kementerian Pertanian yang dilakukan pada skala mikro yaitu rumah tangga untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan produksi pangan berbasis wilayah. Dalam pengembangan P2B, rumah tangga akan difasilitasi bantuan seperti benih dan bibit bermutu, pupuk, serta alat produksi. Pendampingan juga diberikan untuk menjamin kualitas dan kesinambungan produksi. Pada periode 2025–2027, pengembangan P2B akan difokuskan pada komoditas bawang merah dan cabai merah melalui program Pengembangan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di 37 Provinsi. Target pelaksanaan P2B berupa fasilitasi penyaluran benih hortikultura sebanyak 6 juta *polybag*/175 ribu *sachet* bagi 13.500 kelompok. P2B menjadi bagian dari strategi dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui produksi bahan pangan lokal di pekarangan rumah tangga.
7. **Penerapan praktik budidaya sesuai *Good Agricultural Practices* (GAP), dan *Good Handling Practices* (GHP).** Penerapan GAP dalam budidaya ditujukan untuk menjamin keamanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil pertanian. Di sisi lain, penerapan GHP berfokus pada penanganan pascapanen yang baik untuk menjaga mutu produk pangan hingga sampai ke konsumen. Perluasan penerapan GAP dan GHP dilakukan melalui pelatihan Sekolah Lapang Hortikultura yang menjadi sarana pembelajaran interaktif bagi petani. Kementerian Pertanian menargetkan fasilitasi Sekolah Lapang GAP Hortikultura kepada 41 kelompok dan Sekolah Lapang

18 Komoditas daging mencakup daging sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam ras pedaging, dan itik

GHP Hortikultura kepada 6 kelompok setiap tahunnya. Penerapan GAP dan GHP secara konsisten juga dapat meningkatkan produktivitas dan harga jual produk, sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

8. Penguatan pasokan bahan bakar dengan non BBM. Melanjutkan implementasi B35 yang telah berjalan baik, maka Pemerintah menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 341.K/EK.01/MEM.E/2024 sebagai dasar dari implementasi B40 yaitu penggunaan campuran 40% biodiesel dalam bahan bakar minyak jenis solar yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2025¹⁹. Program mandatori B40 bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Untuk memperkuat implementasi kebijakan B40, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 345.K/EK.01/MEM.E/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang menetapkan alokasi penyaluran biodiesel domestik untuk tahun 2025 hingga 2027 sebesar 15,6 juta kiloliter (KL). Dengan mempertimbangkan kebijakan bioenergi yang telah dilaksanakan dengan baik secara bertahap sesuai *timeline* dari B20, B30, B35 hingga B40, ke depan Pemerintah berupaya melihat peluang implementasi mandatori biodiesel B50 sebagai kelanjutan dari program B40. Untuk itu, Pemerintah akan memulai uji teknis pada sektor pertambangan, maritim, industri, dan transportasi untuk mengevaluasi kinerja mesin dan kesiapan infrastruktur implementasi B50.

3.2.2.2 Penguatan Stok Nasional

9. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Daerah (CPP dan CPPD). Program kerja penguatan cadangan pangan pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Upaya penguatan cadangan pangan dilandasi oleh sejumlah ketentuan yaitu Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan pada 2025 diterbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;

Komoditas	Target Minimal Pengelolaan	Stok Akhir
Daging Sapi	20.000 ton	2.500 ton
Daging Kerbau	100.000 ton	10.000 ton
Daging Ayam	12.000 ton	600 ton
Ikan Kembung	250 ton	50 ton
Gula Konsumsi	260.000 kg	26.000 kg
Minyak Goreng	105.000 kl	5.000 kl
Telur Ayam	5.000 ton	
Bawang Merah	100 ton	
Bawang Putih	1.000 ton	
Aneka Cabai	100 ton	

Sumber: Badan Pangan Nasional

Tabel 3.1. Target Pengelolaan dan Stok Akhir Cadangan Pangan Komoditas Lainnya

Badan Pangan Nasional menetapkan target level pengelolaan dan stok akhir tahun Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maupun CPP. Target pengelolaan tersebut mencakup komoditas jagung, kedelai, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, ikan kembung, gula konsumsi, minyak goreng, telur ayam, bawang merah, bawang putih dan aneka cabai telah diatur melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 591 Tahun 2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2025. Selain itu, pemerintah menetapkan penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat petani untuk komoditas beras dan jagung²⁰. Ketentuan pengelolaan CBP dan CPP diperkuat pula dengan ketentuan terkait pengadaan dan penyaluran cadangan pangan tersebut antara lain (i) Peraturan Badan Pangan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen; (ii) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah. Upaya penguatan CBP ini menargetkan pengelolaan CBP sepanjang tahun oleh Perum BULOG sebesar 3 juta ton didukung oleh penguatan pengadaan

19 Keputusan Menteri ESDM No 341.K/EK.01/MEM.E/2024 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Sebesar 40%

20 Keputusan Kepala Badan Pangan nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras serta Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 18 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung di Tingkat Petani.

dalam negeri melalui penetapan HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram²¹ dan penunjukan Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) guna mendukung pengembangan alternatif pendanaan di luar subsidi. Selain itu, Perum BULOG juga mendapatkan penugasan pengelolaan cadangan pangan jagung sebesar 1 juta ton jagung sepanjang tahun dengan stok akhir tahun jagung sebesar 60 ribu ton, serta cadangan pangan kedelai sebesar 100 ribu ton dengan stok akhir tahun sebesar 20 ribu ton. Adapun pengelolaan CPP untuk komoditas minyak goreng, cabai, gula, ayam, telur, ikan, bawang merah, bawang putih, dan, daging sapi diamanatkan kepada ID FOOD.

Pengelolaan cadangan pangan tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat, tetapi juga melibatkan peran aktif pemerintah daerah. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terus dilanjutkan untuk mendukung ketahanan pangan di daerah dan mempercepat respons penanganan krisis pangan. Program pengelolaan CPPD menargetkan tersedianya CPPD di 33 provinsi dan perluasan pengelolaan CPPD yang masih terbatas pada komoditas beras dengan menambahkan komoditas pangan strategis lainnya. Selain itu, pengelolaan CPPD beras juga akan terus diperkuat efektivitasnya, terutama dalam mendukung stabilisasi harga pangan di seluruh provinsi.

10. Penguatan mekanisme dan realisasi impor bahan pangan untuk mendukung ketersediaan pasokan.

Untuk mendukung kesinambungan pasokan pangan domestik, khususnya untuk komoditas pangan yang tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan dari domestik, maka pemenuhan pasokan pangan melalui impor menjadi alternatif. Namun demikian, pemenuhan pasokan pangan melalui impor masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain terkait mekanisme perizinan dan realisasi impor. Untuk itu, pemerintah secara konsisten terus berupaya meningkatkan efektivitas mekanisme impor pangan dan pemantauan realisasinya, sehingga mendukung ketersediaan pasokan pangan impor yang tepat waktu dan jumlah. Upaya tersebut ditempuh melalui *review* dan penerbitan Peraturan Kementerian Perdagangan terkait kebijakan dan pengaturan impor untuk kelompok komoditi pangan.

3.2.2.3 Penguatan Kelembagaan

11. Peningkatan akses pembiayaan melalui KUR dan perlindungan asuransi usaha bagi petani, nelayan dan UMKM Pangan serta Sistem Resi Gudang (SRG).

Penerapan SRG terus diperluas agar dapat memberikan manfaat strategis bagi petani melalui fasilitas penyimpanan komoditas di gudang terakreditasi dan menggunakan resi gudang sebagai jaminan pembiayaan. Kementerian Perdagangan mendorong penggunaan SRG bagi komoditas pangan strategis guna menstabilkan harga, mendukung efisiensi distribusi dan memperkuat ekosistem perdagangan pangan. Optimalisasi pemanfaatan 280 gudang SRG yang tersebar di 29 provinsi (144 kabupaten/kota) di Indonesia terus dilanjutkan, disertai dengan upaya mendorong keterlibatan swasta. Ke depan, kenaikan transaksi pembiayaan SRG terus didorong tumbuh dengan target peningkatan per tahun sebesar 3%, terutama untuk komoditas gabah, beras, jagung, kedelai, bawang merah, ayam karkas beku, ikan dan gula.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus mengoptimalkan peran Pasar Lelang Komoditas (PLK) sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem perdagangan nasional. PLK berperan penting dalam menciptakan transparansi harga, memperluas akses pasar bagi petani dan pelaku usaha kecil, serta mendorong efisiensi rantai perdagangan. Namun demikian, saat ini pemanfaatan PLK oleh pelaku usaha masih belum sepenuhnya optimal, sehingga pemerintah akan terus mendorong pemanfaatannya. Ke depan, optimalisasi PLK diharapkan dapat mendorong peningkatan transaksi PLK sebesar 3% per tahun.

Pada 2025–2027, pemerintah melanjutkan program pembiayaan bagi petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperkuat sektor pertanian. Penyaluran KUR sektor pertanian yang terus tumbuh perlu terus didukung, termasuk disertai dengan penguatan perlindungan bagi usaha pertanian. Pada tahun 2025, pemerintah telah menyiapkan dana KUR sebesar Rp300 triliun secara nasional, dengan 33% di antaranya dialokasikan untuk sektor pertanian, termasuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta *Rice Milling Unit* (RMU)²². Kombinasi

21 Pengadaan beras oleh BULOG sebanyak 3 juta ton dan penyerapan HPP sebesar Rp 6.500 tertuang dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 24/TS.03.03/K/1/2025

22 Berdasarkan Informasi Anekdot dan Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia HM.4.6/450/SET.M.EKON.3/12/2024



antara akses pembiayaan yang lebih mudah melalui KUR dan penguatan perlindungan risiko usaha melalui asuransi pertanian diharapkan dapat terus mendukung penguatan sektor pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan masa depan.

- 12. Penguatan kelembagaan petani pangan, perkebunan sawit, dan petani tebu.** Untuk meningkatkan produksi dan menjamin ketersediaan pangan, penguatan kelembagaan petani perlu dilakukan secara konsisten guna memperkuat kapasitas serta mendorong kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Namun demikian, penguatan kelembagaan ini masih menghadapi sejumlah kendala pelaksanaan di lapangan, antara lain akibat rendahnya jumlah petani yang tergabung dalam kelompok formal, sehingga menyulitkan pemberian bantuan pemerintah, pelaksanaan program kemitraan, hingga akses pembiayaan. Upaya penguatan kelembagaan petani oleh Kementerian Pertanian difokuskan pada petani komoditas pangan, perkebunan sawit, serta petani tebu. Penguatan kelembagaan akan dilakukan melalui fasilitasi kemitraan dan deregulasi kelapa sawit di 19 provinsi dan implementasi mekanisme beli putus tebu pada 23 pabrik gula. Program fasilitasi kemitraan mendorong kerja sama antara perkebunan rakyat dan perusahaan guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Sementara itu, program mekanisme beli putus tebu bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih produktif antara petani dan pabrik gula, meningkatkan efisiensi industri pengolahan gula nasional, serta mendukung peningkatan produksi gula domestik.

3.2.3 Kelancaran Distribusi (K3)

Dalam rangka menjaga kelancaran distribusi, Pemerintah melakukan berbagai program kerja strategis untuk mendukung kelancaran aliran barang dan jasa antardaerah.

Sejumlah program untuk mendukung kelancaran distribusi berupa penguatan implementasi KAD, fasilitasi distribusi pangan dan peningkatan infrastruktur perdagangan, sebagai upaya mengurangi disparitas inflasi antardaerah

3.2.3.1 Penguatan KAD

- 1. Penguatan dan Perluasan KAD.** Mengacu pada hasil *lessons learned* dari program KAD pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022–2024, KAD memiliki peran penting dalam mengurangi disparitas pasokan antardaerah, untuk itu penguatan dan perluasan implementasi KAD perlu terus diupayakan. Saat ini, perjanjian KAD telah dibentuk di berbagai daerah, namun demikian sejumlah KAD tidak melanjutkan kerja sama maupun mencatatkan transaksi, sehingga realisasi KAD masih perlu terus didorong. Dalam rangka penguatan dan perluasan KAD sepanjang 2025 hingga 2027 akan difokuskan pada optimalisasi transaksi dengan target pelaksanaan KAD penambahan jenis komoditas yang diperdagangkan, dan/atau peningkatan volume transaksi sebesar 10% setiap tahunnya. Selain itu, peran BUMD sebagai *offtaker* perlu diperkuat untuk mendukung pelaksanaan KAD.
- 2. Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) melalui distribusi antarwilayah dan bazar/gelar/Gerakan Pangan Murah (GPM).** Fasilitasi distribusi bertujuan untuk mendukung

peningkatan kelancaran distribusi antardaerah dan menjaga kesinambungan pasokan, terutama dari daerah surplus menuju daerah yang mengalami defisit pasokan. Pelaksanaan FDP yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mendukung stabilisasi inflasi, terutama pada tahun 2022 dan 2023 ketika terjadi lonjakan harga pangan. Untuk itu, pelaksanaan FDP melalui distribusi antarwilayah dan kegiatan bazar/gelar/GPM akan dilanjutkan. Pelaksanaan bazar/gelar/ GPM akan dilakukan di 38 Provinsi/514 Kab/Kota. Sementara itu, Target yang juga perlu dicapai berupa fasilitasi distribusi pangan (FDP) mengalami peningkatan sebesar 500 ton setiap tahunnya.

Pelaksanaan program FDP dan bazar/gelar/Gerakan Pangan Murah (GPM) dilakukan melalui sinergi antara Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Perum BULOG, ID Food, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah dan poktan/gapoktan/distributor/asosiasi. Pelaksanaan FDP juga dapat didukung oleh fasilitasi dari anggaran Pemerintah Daerah untuk pengendalian inflasi antara lain berupa pemberian Subsidi Ongkos Angkut (SOA) komoditas pangan, terutama pada periode kenaikan harga pangan yang signifikan di daerah.

3.2.3.2 Peningkatan Infrastruktur Perdagangan

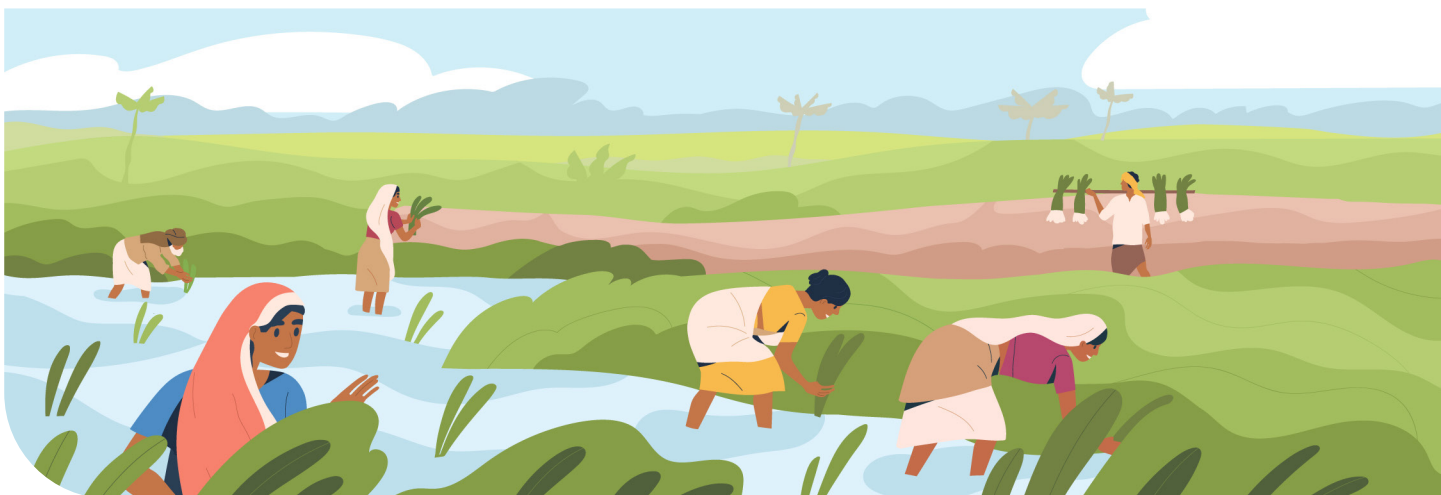
1. **Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antarwilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah 3TP.** Program ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk memastikan kelancaran distribusi hingga ke wilayah pelosok dalam rangka menurunkan disparitas harga antardaerah. Upaya yang akan dilakukan mencakup pemberian subsidi angkutan

udara, penyelenggaraan angkutan laut perintis dan tol laut, serta penambahan jalan kualitas mantap dan peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas darat lainnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Target yang akan dicapai pada tahun 2025, 2026, dan 2027 meliputi (a) 47 subsidi rute angkutan udara, yang terdiri dari 46 perintis kargo, 1 subsidi kargo setiap tahun; (b) penyelenggaraan angkutan laut perintis 107 trayek, tol laut 39 trayek, dan angkutan kapal ternak sebanyak 6 trayek; (c) persentase kemandirian jalan nasional sebesar 94.3%; (d) pembangunan dan perbaikan jembatan, jalan, tol dan jalan daerah.

2. **Peningkatan produktivitas kluster pangan lebih tinggi dari 10%.** Peningkatan produktivitas kluster pangan terus dioptimalkan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penguatan adopsi praktik budidaya yang efisien dan produktif (*Good Agricultural Practices*), serta penggunaan input produksi yang tepat guna dan ramah lingkungan. Bank Indonesia secara aktif memfasilitasi pendampingan teknis dan adopsi pemanfaatan teknologi pertanian kepada petani melalui program kluster binaan Bank Indonesia.

3.2.4 Komunikasi Efektif (K4)

Pengendalian inflasi juga didukung oleh komunikasi efektif melalui tiga program strategis (i) peningkatan ketersediaan dan kualitas data, (ii) penguatan koordinasi pusat dan daerah, serta (iii) pengendalian ekspektasi inflasi. Perbaikan kualitas data dilakukan untuk mendukung proses perumusan kebijakan yang lebih efektif, termasuk upaya mengurangi risiko spekulasi akibat informasi asimetris. Selain itu, koordinasi pusat dan daerah juga terus diperkuat dalam rangka harmonisasi upaya pengendalian dan mendukung



keandalan TPID. Penguatan Implementasi *tagging* anggaran pengendalian inflasi oleh Kementerian/Lembaga. Pemerintah melalui Bappenas mengimplementasikan program kerja optimalisasi *tagging* anggaran di tingkat Rincian *Output* (RO).

3.2.4.1 Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data

1. Penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi di pusat dan daerah. Ketersediaan data pasokan dan harga pangan yang terintegrasi dan terkini, baik di pusat maupun di daerah, memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pengendalian inflasi. Penyediaan data harga komoditas pangan strategis maupun barang penting akan terus dilanjutkan secara sinergi oleh Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan dan Bank Indonesia. Badan Pangan Nasional terus memastikan keberlanjutan ketersediaan dan memperkuat kualitas data panel harga yang menyediakan data harga harian di tingkat produsen dan konsumen di 38 provinsi dan 504 kabupaten/kota. Selain itu, penguatan penyediaan data juga dilakukan pada Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) oleh Kementerian Perdagangan yang telah dilakukan di 38 Provinsi di Indonesia. Peningkatan kualitas dan keakuratan data PIHPS sebagai *leading indicator* pergerakan harga dan pasokan komoditas pangan strategis nasional juga terus dilakukan secara konsisten oleh Bank Indonesia. Data PIHPS dapat digunakan sebagai *early warning system* kondisi harga pangan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjadi acuan pengambilan respons kebijakan antisipatif terhadap gejolak harga dan penurunan pasokan pangan. Penguatan data PIHPS ke depan antara lain mencakup penambahan kota/kabupaten survei menyesuaikan wilayah cakupan survei IHK oleh BPS dan peningkatan korelasi data PIHPS dengan realisasi inflasi. Pada 2025 hingga 2027, korelasi data harga PIHPS dengan realisasi inflasi akan terus dijaga minimal sebesar 0,8 agar dapat menunjukkan keakuratan data PIHPS sebagai *leading indicator* inflasi pangan strategis nasional.

Ketersediaan data pasokan yang memadai juga turut mendukung efektivitas pengendalian inflasi. Ketersediaan data ini dirancang untuk memantau stok

pangan masyarakat serta menghitung surplus dan defisit pasokan pangan sehingga dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan intervensi pangan. Badan Pangan Nasional secara konsisten menyajikan data neraca pangan strategis nasional dan meneruskan penguatan penyediaan data neraca pangan daerah di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, pengembangan kawasan pangan juga disertai dengan pengembangan sistem pendataan stok beras di penggilingan padi yang akan dapat mendukung penyediaan data pasokan di tingkat distribusi sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi dan stabilisasi harga.

3.2.4.2 Memperkuat Koordinasi Pusat dan Daerah

2. Peningkatan keandalan TPID melalui Program Pembinaan TPID. Program pembinaan TPID/*capacity building*/sosialisasi perlu dilakukan secara kontinu untuk mempertahankan tingkat keandalan TPID di tiap daerah. Dalam rangka memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah, peningkatan peran dan kapabilitas daerah melalui forum TPID perlu dilakukan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Lebih lanjut, evaluasi kinerja TPID juga akan dilakukan secara berkala untuk menilai capaian kinerja TPID. Evaluasi kinerja TPID tersebut dilakukan berdasarkan tiga aspek, yakni (i) aspek proses yang mencerminkan pelaksanaan program kerja pengendalian inflasi daerah, (ii) aspek *output* yang merupakan pelaksanaan program unggulan daerah dalam rangka pengendalian inflasi, serta (iii) aspek *outcome* yang mencerminkan hasil dari upaya daerah dalam melakukan koordinasi pengendalian inflasi yaitu diukur dari hasil capaian tingkat inflasi daerah dibandingkan targetnya. Dalam program kerja ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia menargetkan tingkat keandalan TPID IHK sebesar 80-90% (median) dan TPID non-IHK sebesar 50-60% (median) untuk periode 2025–2027.

3. Penguatan Implementasi *tagging* anggaran pengendalian inflasi oleh Kementerian/Lembaga. Pemerintah melalui Bappenas mengimplementasikan program kerja optimalisasi *tagging* anggaran di tingkat

Rincian *Output* (RO). Program kerja ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan dalam forum TPIP dan TPID, antara lain *High Level Meeting* (HLM), serta Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional maupun Daerah (Rakornas/Rakorpusda). Ke depan, penguatan program ini dilakukan pada beberapa aspek, yaitu (i) penajaman proses *tagging* pada tingkat di bawah RO melalui kolaborasi yang lebih kuat bersama Kemenkeu, (ii) pengembangan *tagging* anggaran dinamis pengendalian inflasi akan difokuskan untuk menghasilkan laporan yang lebih komprehensif, serta (iii) evaluasi tematik program pengendalian inflasi berdasarkan jangka waktu dan dampak.

3.2.4.3 Pengendalian Ekspektasi Inflasi

4. **Penguatan strategi komunikasi kebijakan untuk menjangkar ekspektasi inflasi.** Pengendalian inflasi berkaitan erat dengan pelaksanaan bauran kebijakan, termasuk upaya pengendalian inflasi yang diikuti dengan komunikasi efektif dan berkesinambungan. Untuk mendukung upaya tersebut, komunikasi kebijakan dilakukan melalui publikasi *press release*, *press conference*, dan upaya strategis komunikasi lainnya yang memanfaatkan berbagai macam media/jalur komunikasi. Upaya tersebut diharapkan dapat menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Keberhasilan menjangkar ekspektasi inflasi tecermin dari angka proyeksi inflasi *Consensus Forecast* (CF) yang berada dalam kisaran target yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar $2,5\% \pm 1\%$ pada 2025 hingga 2027.

LAMPIRAN

TABEL PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI 2025-2027





4K	Program Strategis	Program Kerja	Timeline Target			Keterangan
			2025	2026	2027	
Keterjangkauan Harga	Stabilitas Harga	1. Penguatan stabilisasi dan pengawasan harga maupun stok bahan pokok, termasuk pada HBKN	Rerata Harga Produsen Maks 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP Produsen			Bapanas, Satgas Pangan
			Minimal 4x per tahun			
		2. Optimalisasi kegiatan OP/SPHP beras dan/ atau komoditas lainnya	Penyaluran beras SPHP 1,5 Juta ton per tahun			BULOG, Bapanas, BI
		3. Evaluasi Harga Eceran dan Acuan Komoditas Pangan	Review HPP, HET, HAP minimal 1x per tahun			Kemenko, Kemenkeu, ESDM, Kemenhub
	4. Koordinasi penetapan kebijakan AP (a.l harga energi dan Angkutan Udara)	Rekomendasi kebijakan dengan <i>magnitude, timing, sequencing</i> , serta dampak inflasi yang terukur				
	Mengelola Permintaan	5. Bauran kebijakan ekonomi nasional yang dapat mendukung pertumbuhan yang sesuai dengan kapasitas perekonomian	Sasaran Inflasi 2,5%±1%			Kemenkeu, BI
Ketersediaan Pasokan	Produksi Domestik	1. Pengembangan kawasan pangan dan PSN Pangan	Peningkatan Produksi Beras	Pengembangan Kawasan Padi		Kementan, Kemenko Ekon, Kemenko Pangan
			Produksi Beras 32 Juta Ton			
			Luas Tanam Padi 500 ribu Ha	Luas Tanam Padi 504 ribu Ha	Luas Tanam Padi 504 ribu Ha	
				Pelaksanaan Pendataan Beras di Penggilingan Padi		
		2. Optimalisasi bantuan sarana produksi dan Infrastruktur pertanian	Jaringan irigasi 10 ribu ha	Jaringan irigasi 19 ribu ha	Jaringan irigasi 28 ribu ha	Kemen PUPR
			Rehabilitasi 75.863 ha	Rehabilitasi 147000 ha	Rehabilitasi 232.000 ha	
			Pembangunan 16 unit Bendungan			
			Bantuan irigasi perpompaan 775 unit			Kementan
			Traktor Roda 4 3500 unit, Traktor Roda 2 7000 unit, pompa air 7000 unit.			
			Bantuan pupuk bersubsidi 100 ribu ha			
			Penyerapan anggaran PMN dan Operator Investasi Pemerintah (OIP)			BULOG
			3. Penguatan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan produk pangan	Gedung Beku <i>Portable</i> 46 unit dan 31 unit		

4K	Program Strategis	Program Kerja	Timeline Target			Keterangan
			2025	2026	2027	
		4. Peningkatan produksi hasil perkebunan tebu dan kelapa sawit	Target luas lahan 535 ribu ha, produksi tebu 37 juta ton, produksi gula 2,8 juta ton			Kementan
			Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 120 rb ha/tahun Target produksi 47694.640 ton CPO, produktivitas 3,7 ton/ha, dan luas areal kebun kelapa sawit 16.833.985 ha.			
		5. Peningkatan produksi hasil ternak dan perikanan	Produksi daging 4,71 juta ton, produksi ikan 24,58 juta ton			Kementan, KKP
			Peningkatan produktivitas daging dan telur ayam ras sebesar 1,48% (yoy)			Kementan
		6. Pengembangan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) serta peningkatan produksi benih bawang putih melalui pengembangan kawasan perbenihan	Pengembangan pekarangan pangan bergizi (P2B) di 37 Provinsi			Kementan, BI
			Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) sebanyak 13.500 kelompok			
			Benih sayuran 6 juta <i>polybag</i> /175 ribu <i>sachet</i>			
			Pemeliharaan stok bening bawang putih 400 ha			
		7. Penerapan praktik budidaya sesuai <i>Good Agricultural Practices (GAP)</i> dan <i>Good Handling Practices (GHP)</i>	Jumlah kelompok yang difasilitasi Sekolah Lapang GAP Hortikultura sebanyak 41 kelompok			Kementan, Bapanas
			Jumlah kelompok yang difasilitasi Sekolah Lapang <i>GHP</i> Hortikultura (<i>SL GHP</i>) sebanyak 6 kelompok			
	8. Penguatan pasokan bahan bakar dengan non BBM	Penyaluran biodiesel domestik 15,6 juta KL			Kemen ESDM	
	Penguatan Stok Nasional	9. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Daerah (CPP dan CPPD)	Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) melalui SPHP Pengelolaan Jagung 1 jt ton dan stok akhir tahun sebesar 60rb ton			BULOG, Bapanas, Kemenko Pangan
			Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP) minimal sebesar 100 rb ton dan stok akhir tahun 20rb ton			
			Tersedianya Cadangan Komoditas Pangan dan pengelolaan CPPD oleh 33 provinsi/daerah			
10. Penguatan mekanisme dan realisasi impor bahan pangan untuk mendukung ketersediaan pasokan		Permendag tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor untuk Kelompok komoditi Pangan			Kemendag, Kemenko Ekon, Kemenko Pangan	
		Pengaturan komoditas Pangan baru dalam Permendag tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor untuk Kelompok komoditi Pangan				

4K	Program Strategis	Program Kerja	Timeline Target			Keterangan
			2025	2026	2027	
	Penguatan Kelembagaan	1. Peningkatan akses pembiayaan melalui KUR dan perlindungan asuransi usaha bagi petani, nelayan dan UMKM pangan serta Sistem Resi Gudang	Transaksi pembiayaan SRG meningkat 3% dari tahun sebelumnya			Kemendag
			Transaksi PLK (Pasar Lelang Komoditas) online meningkat 3% dari tahun sebelumnya			
			Target cakupan asuransi usaha tani mencapai 413.000 Ha			
		2. Penguatan kelembagaan petani pangan, perkebunan sawit dan petani tebu	Fasilitasi kemitraan dan deregulasi kelapa sawit: 19 provinsi			Kementan
			Mekanisme beli putus tebu dengan pabrik gula: 23 pabrik gula			
			Koperasi Desa Merah putih untuk nelayan			
Kelancaran Distribusi	Penguatan Kerja sama Antar Daerah	1. Penguatan dan Perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD)	Jumlah pelaksanaan KAD dan/atau penambahan jenis komoditas dan/atau volume transaksi meningkat 10% dari tahun sebelumnya.			Kemendagri BI
		2. Fasilitasi Distribusi Pangan melalui distribusi antarwilayah dan bazar/gelar/gerakan pangan murah	Pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), GPM, dan Bazar di 38 Provinsi/514 Kab/Kota			Bapanas, BI, Kementan
			Volume fasilitasi distribusi meningkat sebesar 500 ton/tahun			
	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	3. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah 3TP	Subsidi Jembatan Udara sebanyak 43 Rute yang terdiri dari Angkutan Udara Perintis kargo 42 rute. dan Subsidi Angkutan Udara Kargo 1 rute.			Kemenhub, Kemen PU, Kemenko Ekon, Kemenko Infra
			Angkutan Laut Perintis 107 dengan 30 trayek mekanisme penugasan dan 7 trayek mekanisme pelelangan			
			Angkutan Laut Tol laut 39 trayek dengan 20 trayek mekanisme penugasan dan 19 trayek mekanisme pelelangan			
			Angkutan Laut Ternak 6 trayek dengan 2 trayek mekanisme penugasan dan 4 trayek mekanisme pelelangan			
			Persentase kemandapan jalan nasional sebesar 94,3% dan Pembangunan jalan nasional 583,3 km			
			Pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 6.200,7 m			
			Preservasi dan penggantian jembatan 68.290 m			
			Flyover/ Underpass/ Terowongan sepanjang 3.513,5 m			
			Jalan Bebas Hambatan/Tol sepanjang 521,7 km			
			Dukungan Inpres Jalan Daerah 250 km			
		4. Peningkatan produktivitas klaster pangan > 10%	Produktivitas tahun berjalan meningkat > 10% (39 klaster)	Produktivitas tahun berjalan meningkat > 10% (80 klaster)	Produktivitas tahun berjalan meningkat > 10% bagi 120 UMKM	BI

4K	Program Strategis	Program Kerja	Timeline Target			Keterangan
			2025	2026	2027	
Komunikasi Efektif	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data	1. Penyediaan sistem informasi data harga dan pasokan pangan yang terintegrasi Daerah	Korelasi data harga (PIHPS) dengan realisasi inflasi minimal 0,8			BI
			Ketersediaan data Neraca Pangan di 38 Provinsi. 514 kabupaten/kota dan 1 Pusat			Bapanas
			Ketersediaan data Panel Harga di tingkat produsen dan konsumen tersedia di 38 Provinsi dan 504 Kab/Kota di Indonesia setiap tahun			Kemendag
			Cakupan daerah yang melaporkan data harga harian 26 barang kebutuhan pokok pada Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP): 514 kab/kota			
			Presentasi kinerja penginputan data di 514 kabupaten/ kota pada SP2KP: 93%			
	Koordinasi Pusat dan Daerah	2. Peningkatan keandalan TPID antara lain melalui program pembinaan TPID	Tingkat keandalan TPID IHK: 80-90 (median)			Kemenko Ekon, Kemendagri, BI
			Tingkat keandalan TPID non IHK: 50-60 (median)			
			Permen Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional			Bappenas
			3. Penguatan implementasi <i>tagging</i> anggaran pengendalian inflasi oleh K/L daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan yang disampaikan dalam forum TPIP dan TPID (HLM, Rakornas, Rakorpusda)		
	Pengendalian Ekspektasi Inflasi	4. Penguatan strategi komunikasi kebijakan untuk menjangkar ekspektasi inflasi	Ekspektasi inflasi dari angka proyeksi inflasi <i>Consensus Forecast (CF)</i> kisaran sasaran inflasi 2,5%±1%			Kemenko Ekon, BI, Kemenkeu, Kemenko Pangan

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

